PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KOTA SURAKARTA

KAJIAN PENGEMBANGAN EDUTOURISM BERBASIS KOMUNITAS DAN BUDAYA LOKAL DI KOTA SURAKARTA

Dari Model Kampung Batik Laweyan Menuju Residensi Budaya Global
sebagai Strategi Wisata Edukasi Berkelanjutan dan Diplomasi Budaya



Cetakan Pertama
2026

KAJIAN PENGEMBANGAN EDUTOURISM BERBASIS KOMUNITAS DAN BUDAYA LOKAL DI KOTA SURAKARTA

Dari Model Kampung Batik Laweyan Menuju Residensi Budaya Global sebagai Strategi Wisata Edukasi Berkelanjutan dan Diplomasi Budaya

Disusun seltingkat dengan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025–2029 dan Asta Cita Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta
Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Surakarta
2026

SUSUNAN TIM KELITBANGAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

Penanggung Jawab : Kentis Ratnawati, S.H., M.M.
(Kepala BRIDA Kota Surakarta)
Koordinator : Rossy Edi Harsiwi, S.H.
(Kepala Bidang Riset – BRIDA Kota Surakarta)

Tim Penulis
Anggota :

1. Naghma Shafira Layin Adina (Administrasi Publik – UMS)
2. Nindi Tri Nur Aeni (Administrasi Publik – UMS)
3. Anggun Fadhilla Estyningtyas (Administrasi Publik – UMS)
4. Budi Winarno, S.H., M.H. (Peneliti Ahli Muda – BRIDA Kota Surakarta)
5. Herri Widiyanto, S.Sos, M.Si. (Peneliti Ahli Muda – BRIDA Kota Surakarta)
6. Nur Indriani Dewi S.E., M.E. (Peneliti Ahli Pertama – BRIDA Kota Surakarta)
7. Sarah Puruhitaningrum, S.Mat. (Analis Data Ilmiah Ahli Pertama – BRIDA Kota Surakarta)
8. Purwoko, S.T. (Penelaah Teknis Kebijakan– BRIDA Kota Surakarta)
9. Ghulam Fathul Amri, S.ST.,M.T. (Penelaah Teknis Kebijakakan – BRIDA Kota Surakarta)
10. Margono (Pengadministrasi Perkantoran – BRIDA Kota Surakarta)

Design/Layout : Ghulam Fathul Amri, S.ST.,M.T.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2 ayat (1)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kajian ilmiah berjudul “Pengembangan *Edutourism* Berbasis Komunitas dan Budaya Lokal di Kota Surakarta: Dari Model Kampung Batik Laweyan Menuju Residensi Budaya Global sebagai Strategi Wisata Edukasi Berkelanjutan dan Diplomasi Budaya” dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian ini merupakan hasil integrasi dua naskah riset yang saling melengkapi. Naskah pertama menghadirkan kedalaman empiris melalui studi kasus Batik Mahkota Laweyan di Kampung Batik Laweyan — sebuah pelaku *edutourism* perintis yang telah menjalani transformasi bisnis selama tujuh dekade. Naskah kedua menghadirkan keluasan cakupan melalui pemetaan lima klaster destinasi budaya Kota Surakarta serta inovasi model residensi budaya global (*Global Community Residency Edutourism*/GCRE) sebagai instrumen diplomasi budaya. Penggabungan keduanya menghasilkan satu kerangka utuh: model mikro yang terbukti di lapangan, dinaikkan menjadi model kota yang berdaya jangkau internasional.

Naskah ini Adalah naskah finalis Kompetisi Riset Unggulan Kota Surakarta Tahun 2026 yang sudah disempurnakan sebanyak dua kali proses penyempurnaan. Pada revisi kedua ini dilakukan tiga pekerjaan pokok. *Pertama*, penyelarasan sistematika penulisan dengan format yang ditetapkan lembaga pemberi tugas, yaitu lima bab dengan rincian sub-bab yang baku. *Kedua*, penelusuran digital atas sumber-sumber resmi guna memperbarui, mengoreksi, dan memperkuat dasar empiris kajian — meliputi laman resmi Pemerintah Kota Surakarta dan perangkat daerahnya, laman kementerian terkait, basis data Badan Pusat Statistik, jurnal nasional terindeks SINTA dan jurnal internasional terindeks Scopus, serta pemberitaan kantor berita nasional. *Ketiga*, dan ini yang paling penting bagi integritas kajian, verifikasi menyeluruh terhadap seluruh rujukan yang disitasi. Verifikasi tersebut menemukan sejumlah entri pustaka yang memuat nama penulis, nomor volume, dan halaman yang tidak sesuai dengan artikel aslinya meskipun nomor DOI-nya sahih. Seluruh temuan itu telah dikoreksi atau, apabila tidak dapat diverifikasi, dikeluarkan dari daftar pustaka disertai penyesuaian pada teks yang bersangkutan.

Kajian ini disusun sebagai kontribusi akademik terhadap pengembangan sektor pariwisata berbasis komunitas di Kota Surakarta, khususnya dalam mendukung **Asta Cita Surakarta**, yaitu delapan program prioritas daerah yang di dalamnya terdapat Program Penguatan Daya Saing Kota Berbasis *Event* Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta **Visi RPJMD Kota Surakarta 2025–2029**. Temuan primer dalam kajian ini bersumber dari wawancara mendalam dengan pengelola Batik Mahkota Laweyan, dilengkapi data sekunder resmi dari BPS Kota Surakarta, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Portal SoloData, serta dokumen kebijakan nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian kajian ini, terutama narasumber dari Batik Mahkota Laweyan, dosen pembimbing, serta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Surakarta.

Surakarta, September 2026
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Surakarta

Kentis Ratnawati, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KELITBANGAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2026 3
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 6
BAB I PENDAHULUAN 10
1.1 Latar Belakang Masalah 10
1.1.1 Kondisi Ideal: Mandat Kebijakan bagi Pariwisata Berbasis Budaya 10
1.1.2 Kondisi Faktual: Profil Wilayah dan Capaian Pembangunan 12
1.1.3 Kesenjangan: Paradoks Potensi Besar dan Kinerja yang Belum Optimal 13
1.1.4 Apa yang Sudah Diteliti dan Celah yang Belum Terjawab 13
1.1.5 Posisi Kajian Ini 15
1.2 Identifikasi Masalah 15
1.3 Batasan Masalah 16
1.3.1 Batasan Substansi 16
1.3.2 Batasan Geografis 16
1.3.3 Batasan Temporal 16
1.3.4 Batasan Subjek 17
1.3.5 Batasan Metodologis 17
1.4 Rumusan Masalah 18
1.5 Tujuan Penelitian 18
1.6 Manfaat Penelitian 19
1.6.1 Manfaat Teoretis 19
1.6.2 Manfaat Praktis 19
1.7 Keaslian dan Kebaruan Penelitian 20
1.8 Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan 22
1.8.1 Definisi Operasional 22
1.8.2 Sistematika Penulisan 23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24
2.1 Landasan Teori 24
2.1.1 Edutourism dan Pembelajaran Kontekstual 24
2.1.2 Community-Based Tourism sebagai Filosofi Tata Kelola 25
2.1.3 Modal Sosial 26
2.1.4 Co-Creation dalam Pariwisata 26
2.1.5 Pariwisata Berkelanjutan 26
2.1.6 Residensi Budaya dan Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas 27
2.1.7 Sintesis dan Pembagian Kerja Antarteori 28

2.2 Penelitian Terdahulu (State of the Art) 29
2.2.1 Tema Pertama: Kebangkitan Kawasan Batik Laweyan sebagai Kasus yang Berulang Dikaji 29
2.2.2 Tema Kedua: Kampung Tematik Kriya dan Batas Keberlanjutannya 30
2.2.3 Tema Ketiga: Institusi Keraton sebagai Ruang Edukasi 31
2.2.4 Tema Keempat: Model Kampung Wisata dan Pelibatan Komunitas 31
2.2.5 Kecenderungan Metodologis dan Titik Lemah Literatur 32
2.3 Research Gap 32
2.4 Kerangka Berpikir 33
2.4.1 Lapisan Input 34
2.4.2 Lapisan Proses 34
2.4.3 Lapisan Output dan Outcome 35
2.4.4 Faktor Moderator dan Mediator 35
2.5 Proposisi Penelitian 35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 37
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 38
3.2.1 Lokasi Penelitian 38
3.2.2 Waktu Penelitian 39
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 40
3.3.1 Populasi 40
3.3.2 Teknik dan Ukuran Sampel Kuantitatif 40
3.3.3 Informan Kualitatif, Kriteria Pemilihan, dan Saturasi Data 41
3.4 Variabel dan Definisi Operasional 42
3.5 Teknik Pengumpulan Data 43
3.5.1 Wawancara Mendalam 44
3.5.2 Diskusi Kelompok Terarah 44
3.5.3 Survei Terstruktur 44
3.5.4 Observasi Partisipatif dan Studi Dokumentasi 45
3.6 Uji Instrumen dan Keabsahan Data 46
3.6.1 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kuantitatif 46
3.6.2 Keabsahan Data Kualitatif 46
3.7 Teknik Analisis Data 47
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif dan Inferensial 47
3.7.2 Analisis Tematik dan Analisis Isi 48
3.7.3 Analisis SWOT, Proses Hierarki Analitik, dan Triangulasi 48
3.8 Etika Penelitian 49

BAB IV PEMBAHASAN 50
4.1 Potensi dan Kondisi Eksisting Edutourism Kota Surakarta 50
4.1.1 Ekosistem Warisan Budaya sebagai Fondasi 50
4.1.2 Paradoks Data: Potensi Besar, Kinerja Belum Optimal 51
4.1.3 Kapasitas Komunitas dan Basis Ekonomi Kreatif 52
4.1.4 Kesiapan Lintas Klaster 53
4.2 Model Edutourism Berbasis Komunitas: Praktik Lapangan dan Rumusan MEBKL 55
4.2.1 Profil Pelaku Perintis dan Perjalanan Transformasinya 55
4.2.2 Skala Kunjungan dan Temuan tentang Permintaan Laten 56
4.2.3 Tiga Komponen Program yang Telah Berjalan 57
4.2.4 Rumusan Model Edutourism Berbasis Komunitas Laweyan (MEBKL). 58
4.3 Partisipasi Komunitas dan Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan 60
4.3.1 Model Keterlibatan Komunitas: Tiga Lapisan 60
4.3.2 Kelembagaan Partisipasi dan Kebutuhan Formalisasinya 61
4.3.3 Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan 62
4.3.4 Tiga Ketegangan yang Harus Dikelola 62
4.4 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Mitigasi 63
4.4.1 Faktor Pendukung Berbasis Data Primer 63
4.4.2 Faktor Penghambat Berbasis Data Primer 64
4.4.3 Tantangan Tambahan pada Skala Kota 65
4.4.4 Analisis SWOT dan Strategi Mitigasi 66
4.5 Peran Kearifan Lokal sebagai Konten Pembelajaran dan Instrumen Tata Kelola 67
4.5.1 Kearifan Lokal sebagai Konten Pembelajaran 68
4.5.2 Kearifan Lokal sebagai Instrumen Tata Kelola 68
4.6 Rancangan Model Residensi Budaya Global Berbasis Komunitas 69
4.6.1 Logika Transisi dari MEBKL ke GCRE 69
4.6.2 Delapan Fase Implementasi 70
4.6.3 Desain Kurikulum Tiga Tingkat 71
4.6.4 Mekanisme Distribusi Manfaat Ekonomi 72
4.6.5 Prasyarat Kesiapan Komunitas 74
4.7 Strategi Pengembangan dan Keselarasan dengan Kebijakan Pembangunan 74
4.7.1 Lima Strategi Pengembangan 74
4.7.2 Proyeksi Kontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Daerah 76
4.7.3 Keselarasan dengan Kebijakan Nasional dan Daerah 77
BAB V PENUTUP 79

5.1 Kesimpulan 79
5.1.1 Kesimpulan atas Potensi dan Kondisi Eksisting 79
5.1.2 Kesimpulan atas Model Edutourism Berbasis Komunitas 79
5.1.3 Kesimpulan atas Partisipasi Komunitas dan Peran Pemangku Kepentingan 80
5.1.4 Kesimpulan atas Faktor Pendukung dan Penghambat 80
5.1.5 Kesimpulan atas Peran Kearifan Lokal 81
5.1.6 Kesimpulan atas Rancangan Model Residensi 81
5.1.7 Kesimpulan atas Strategi dan Keselarasan Kebijakan 81
5.2 Rekomendasi 82
5.2.1 Rekomendasi Penelitian 82
5.2.2 Rekomendasi Kebijakan 83
5.2.3 Peta Jalan Implementasi 2026–2030 86
DAFTAR PUSTAKA 89

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

1.1.1 Kondisi Ideal: Mandat Kebijakan bagi Pariwisata Berbasis Budaya

Kota Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa memiliki posisi strategis dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan pendidikan di Indonesia. Kota ini bukan sekadar salah satu kota bersejarah di Pulau Jawa; ia adalah jantung peradaban budaya Jawa yang terus berdenyut hingga hari ini. Kehadiran dua istana besar — Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Pura Mangkunegaran — bukan hanya menjadi penanda sejarah, melainkan juga episentrum hidup dari tradisi tari, musik gamelan, batik, keris, dan falsafah Jawa yang telah diwariskan selama berabad-abad.

Kondisi ideal yang hendak dicapai (*das Sollen*) telah dirumuskan secara eksplisit dalam kerangka kebijakan berlapis, dari tingkat kota hingga tingkat nasional. Pada tingkat kota, Rancangan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025–2029 yang disampaikan Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto dalam Rapat Paripurna DPRD mengusung visi **"Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"** yang dijabarkan ke dalam lima misi (DPRD Kota Surakarta, 2025). Kelima misi tersebut adalah: (1) Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial untuk Semua; (2) Berbudaya untuk Kemajuan dan Ketahanan Sosial; (3) Daya Saing Ekonomi untuk Kesejahteraan; (4) Inovasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik yang Adaptif dan Inklusif; serta (5) Ketahanan Kota dan Kerja Sama Antarwilayah yang Terpadu dan Berkelanjutan. Misi kedua dan misi ketiga adalah dua pijakan langsung bagi kajian ini: yang pertama menempatkan kebudayaan sebagai sumber kemajuan dan ketahanan sosial, yang kedua menempatkan potensi budaya sebagai basis pengembangan produk ekonomi.

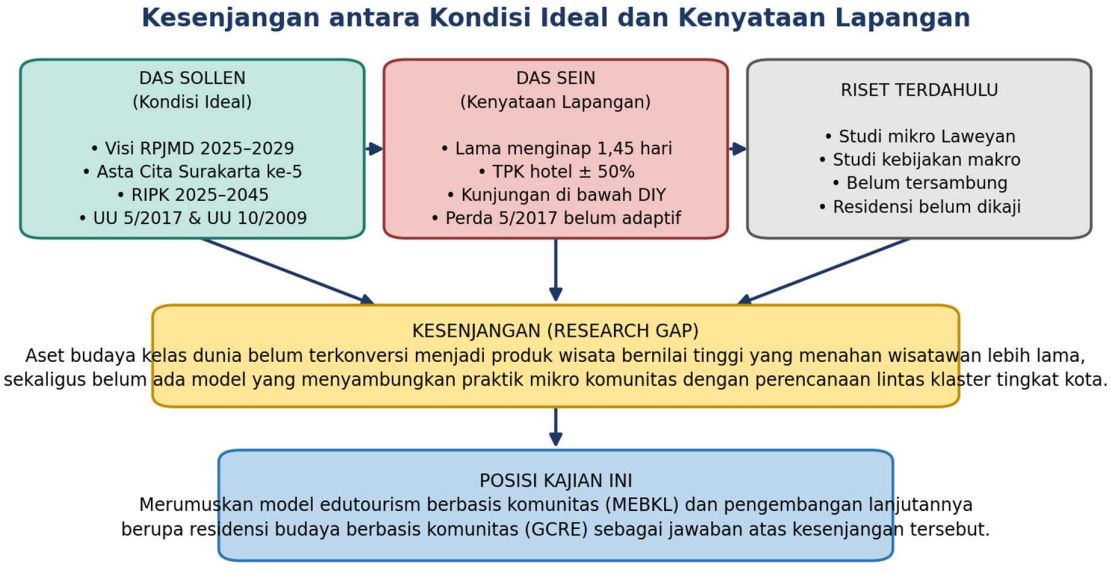
Visi tersebut diterjemahkan ke dalam **Asta Cita Surakarta**, yaitu delapan program prioritas daerah yang disampaikan Wali Kota pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 21 Februari 2025. Kedelapan program itu mencakup pengembangan kompetensi dan peluang kerja berbasis ekosistem ketenagakerjaan; penguatan daya saing UMKM berbasis ekosistem bisnis; Posyandu Plus berbasis standar minimal pelayanan; optimalisasi BUMD dan Pendapatan Asli Daerah; **penguatan daya saing kota berbasis _event_ pariwisata dan ekonomi kreatif**; penguatan ruang publik yang inklusif; Surakarta *Smart City*; serta pengembangan pusat distribusi logistik untuk mendukung ketahanan pangan (Radar Solo, 2025; Solopos, 2025). Program kelima inilah yang menjadi pintu masuk kebijakan bagi kajian ini.

Perlu dicatat bahwa penamaan "Asta Cita Surakarta" merupakan adopsi konsep Asta Cita nasional Presiden Prabowo Subianto ke dalam konteks daerah, sehingga keduanya tidak boleh dipertukarkan begitu saja. Ketelitian penyebutan ini penting karena rekomendasi kebijakan yang dihasilkan kajian ini harus dapat ditautkan pada

nomenklatur program yang benar-benar tercantum dalam dokumen perencanaan daerah, bukan pada nomenklatur nasional yang berbeda cakupannya.

Pada tingkat nasional, **Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) Tahun 2025–2045** menetapkan visi "Indonesia Bahagia Berlandaskan Keanekaragaman Budaya yang Mencerdaskan, Mendamaikan, dan Menyejahterakan" yang diwujudkan melalui tujuh misi, di antaranya penyediaan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan pendorongan interaksi budaya lintas kelompok (Presiden RI, 2024). Perpres ini juga memperkenalkan Indeks Pembangunan Kebudayaan sebagai alat ukur keberhasilan, dengan capaian 57,13 poin pada 2023 dan sasaran 68,15 poin pada 2045 (Media Indonesia, 2024). Yang paling relevan bagi kajian ini, RIPK secara tegas mengarahkan pemerintah daerah untuk berperan aktif menyusun program kebudayaan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Legitimasi hukumnya diperkuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Ekosistem regulasi daerah Kota Surakarta pun telah bergerak ke arah yang mendukung. Kota ini termasuk salah satu dari sedikit kota di Indonesia yang memiliki peraturan daerah tentang toleransi, yakni Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat, di samping Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Internalisasi Nilai Pancasila (Solopos, 2026). Keberadaan kedua perda ini bukan sekadar catatan administratif: bagi program yang mendatangkan pelaku budaya asing untuk tinggal dan berkarya di tengah komunitas, jaminan regulatif atas kehidupan bermasyarakat yang toleran adalah prasyarat yang nyata, bukan pelengkap.



Gambar 1.1 Kesenjangan antara Kondisi Ideal dan Kenyataan Lapangan

Sumber: diolah dari dokumen kebijakan dan data BPS Kota Surakarta (2025).

1.1.2 Kondisi Faktual: Profil Wilayah dan Capaian Pembangunan

Kota Surakarta terbagi ke dalam lima kecamatan — Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari — serta 54 kelurahan. Mengenai luas wilayah, kajian ini perlu bersikap transparan karena terdapat dua angka yang beredar dalam sumber resmi. Badan Pusat Statistik dan sejumlah dokumen perencanaan mencantumkan luas 44,04 km², sedangkan dokumen kependudukan administratif Kota Surakarta menggunakan angka 46,72 km². Selisih ini berimplikasi langsung pada perhitungan kepadatan penduduk, sehingga kajian ini mencantumkan keduanya dan menyatakan sumbernya masing-masing, alih-alih memilih salah satu tanpa penjelasan sebagaimana dilakukan pada naskah versi sebelumnya. Yang tidak berubah adalah kesimpulan substantifnya: dengan luas berapa pun di antara dua angka tersebut, Surakarta tergolong kota berkepadatan penduduk sangat tinggi di Jawa Tengah, dengan seluruh aset budaya utamanya terkonsentrasi dalam radius yang dapat ditempuh berjalan kaki.

Capaian pembangunan manusia Kota Surakarta berada pada kategori sangat tinggi. Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai kisaran 84–85 poin menempatkan Surakarta pada jajaran teratas di Provinsi Jawa Tengah. Capaian ini menciptakan fondasi kuat bagi pengembangan sektor pariwisata berbasis pengetahuan dan pendidikan. IPM yang tinggi bukan sekadar indikator kesejahteraan: ia mencerminkan kapasitas masyarakat lokal untuk berinteraksi secara setara dan bermakna dengan pengunjung — termasuk pengunjung internasional — sebuah kondisi yang membedakan Surakarta dari banyak destinasi wisata budaya di negara berkembang yang menghadapi kesenjangan kapasitas antara tuan rumah dan tamu.

Di sisi lain, tantangan struktural belum terselesaikan. Dalam pidato serah terima jabatan pada Februari 2025, Wali Kota Surakarta menyebutkan bahwa angka kemiskinan kota masih berada pada 8,31 persen pada tahun 2024 dan menegaskan perlunya kerja lebih keras untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui penguatan UMKM, penetapan Solo sebagai destinasi MICE terbaik, dan perluasan lapangan kerja (Pemerintah Kota Surakarta, 2025a). Angka ini penting dicatat karena naskah versi sebelumnya mencantumkan tingkat kemiskinan 7,69 persen tanpa rujukan rilis resmi yang dapat ditelusuri. Selama angka tersebut belum dapat dikonfirmasi melalui Berita Resmi Statistik BPS Kota Surakarta, kajian ini menggunakan angka yang disebutkan Wali Kota sebagai acuan dan menandai kebutuhan pemutakhiran melalui data resmi terbaru.

Nilai-nilai *gotong royong*, *tepa slira*, dan *andhap asor* yang hidup dalam masyarakat Surakarta bukan sekadar ornamen kultural — ia adalah fondasi modal sosial yang membentuk cara komunitas lokal berorganisasi, berkolaborasi, dan merespons perubahan. Bukti kelembagaan atas modal sosial ini terlihat dari posisi Surakarta dalam Indeks Kota Toleran yang disusun Setara Institute, di mana kota ini menempati peringkat kedua belas nasional pada penilaian tahun 2025 dan pemerintah kotanya secara terbuka menyatakan komitmen untuk terus berbenah

(Solopos, 2026). Bagi kajian ini, indikator toleransi bukan sekadar prestasi administratif — ia adalah prasyarat operasional bagi program yang mempertemukan pelaku budaya dari berbagai bangsa dengan komunitas kampung.

Destinasi-destinasi berbasis komunitas seperti Kampung Batik Laweyan dan Kampung Blangkon Potrojayan membuktikan bahwa komunitas akar rumput mampu mengubah warisan budaya menjadi ekosistem ekonomi kreatif yang hidup dan berkelanjutan (Sarjiyanto dkk., 2023; Modiash & Yuliastuti, 2025). Inilah fondasi strategis kajian ini: komunitas lokal Surakarta adalah aktor utama, bukan sekadar objek, dari pengembangan wisata edukasi.

1.1.3 Kesenjangan: Paradoks Potensi Besar dan Kinerja yang Belum Optimal

Meskipun potensi budaya Surakarta sangat besar, data menunjukkan paradoks yang tidak bisa diabaikan. Tingkat Penghunian Kamar hotel bintang yang tercatat 52,26 persen pada November 2024 dan 50,12 persen pada Mei 2025, serta rata-rata lama menginap yang hanya 1,45 hari, mengindikasikan perlunya inovasi yang mampu menghadirkan wisatawan berkualitas yang tinggal lebih lama, terlibat lebih dalam, dan memberi dampak lebih besar bagi komunitas lokal (BPS Kota Surakarta, 2025).

Angka rata-rata lama menginap 1,45 hari adalah indikator paling kritis dalam keseluruhan kajian ini, dan layak diperlakukan sebagai titik tolak analisis, bukan sekadar catatan statistik. Angka tersebut berarti wisatawan yang datang ke Surakarta pada umumnya menginap satu malam dan pergi keesokan harinya. Dalam rentang waktu sesingkat itu, secara praktis mustahil terjadi pembelajaran budaya yang bermakna, mustahil terbangun relasi personal antara pengunjung dan pengrajin, dan mustahil pengeluaran wisatawan menyebar ke banyak pelaku usaha kecil di kawasan. Dengan kata lain, persoalan Surakarta bukan terletak pada kurangnya daya tarik, melainkan pada belum tersedianya produk wisata yang memberi alasan cukup kuat bagi orang untuk tinggal lebih lama.

Hambatan dalam pengembangan pariwisata budaya di Kampung Batik Laweyan mencakup kurangnya pendidikan pariwisata berkelanjutan, keterbatasan modal, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan (Lestari dkk., 2024). Pelestarian budaya melalui pariwisata di Keraton Surakarta menghadapi tantangan berupa sumber daya finansial yang terbatas dan minimnya promosi digital (Lestari dkk., 2025). Pada tataran regulasi, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata belum mengakomodasi industri pariwisata kreatif secara eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku *edutourism* skala komunitas.

1.1.4 Apa yang Sudah Diteliti dan Celah yang Belum Terjawab

Kajian tentang *edutourism* dan pariwisata berbasis komunitas di Indonesia telah berkembang pesat. Pada tingkat mikro, transformasi Sentra Batik Laweyan menjadi kampung wisata edukasi telah dipetakan secara kualitatif (Nisrina & Pratama,

2024), demikian pula partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata budaya di kawasan yang sama (Lestari dkk., 2024) serta strategi adaptasi komunitas Laweyan pasca-kemunduran industri batik pada akhir abad ke-20 (Widodo & Putra, 2024). Pada tingkat keberlanjutan industri, faktor-faktor yang menopang keberlangsungan industri batik Laweyan dan kaitannya dengan pembangunan komunitas telah diteliti dengan survei berskala besar (Sarjiyanto dkk., 2023).

Pada tingkat kawasan lain di Surakarta, Kampung Blangkon Potrojayan telah dianalisis baik dari perspektif *collaborative governance* (Apalso, 2022) maupun dari perspektif tingkat keberlanjutan kampung tematik (Modiash & Yuliastuti, 2025). Pada tingkat institusi budaya, Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan telah dikaji sebagai sarana wisata edukasi sejarah (Puspitasari dkk., 2025), dan strategi pelestarian budaya melalui pariwisata di Keraton Surakarta telah dipetakan beserta kendalanya (Lestari dkk., 2025). Pada tingkat model, pengembangan kampung wisata melalui pelibatan komunitas menuju pariwisata kreatif berkelanjutan telah dirumuskan dengan konteks Surakarta (Setyaningsih dkk., 2024).

Dari peta tersebut tampak tiga celah yang belum terjawab. *Pertama*, literatur *edutourism* Surakarta terfragmentasi antara studi kasus mikro pada satu unit usaha atau satu kampung dengan kajian kebijakan makro pada tingkat kota; jembatan yang menghubungkan bukti empiris tingkat unit usaha dengan perencanaan lintas klaster tingkat kota nyaris belum ada. *Kedua*, seluruh studi yang tersedia menempatkan pengunjung dalam kerangka kunjungan singkat; dimensi tinggal berdurasi panjang dalam bentuk residensi budaya berbasis komunitas belum pernah dikaji dalam konteks Surakarta, padahal justru dimensi inilah yang secara logis menjawab persoalan lama menginap 1,45 hari. *Ketiga*, kaitan antara pariwisata berbasis komunitas dengan agenda diplomasi budaya sebagaimana diamanatkan RIPK 2025–2045 belum dirumuskan secara konseptual, sehingga potensi kota ini sebagai simpul pertukaran budaya internasional belum terkelola sebagai produk kebijakan.

Celah ketiga ini memperoleh urgensi tambahan dari fakta bahwa infrastruktur pertukaran budaya internasional di Surakarta sesungguhnya sudah tersedia. Solo International Performing Arts, yang berlangsung sejak 2009, secara rutin menghadirkan penari, pemusik, dan pemain teater dari berbagai negara di Pamedan Pura Mangkunegaran; penyelenggaraan tahun 2025 berlangsung pada 4–6 September dan menampilkan kelompok seniman dari beberapa negara termasuk Korea Selatan dan Spanyol (BPPD Surakarta, 2025). Pada 2026, Kota Solo menetapkan tiga belas *event* unggulan, dengan SIPA dijadwalkan pada 10–12 November 2026 di lokasi yang sama (Solopos, 2026). Sejumlah *event* Kota Solo — Grebeg Sudiro, SIPA, *International Mask Festival*, Solo Keroncong Festival, dan Festival Payung Indonesia — juga tercantum dalam Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata (Kementerian Pariwisata, 2026). Yang belum ada bukan kapasitas menyelenggarakan pertemuan budaya internasional, melainkan

formalisasinya sebagai produk *edutourism* berbasis komunitas yang terstruktur, berdurasi panjang, dan berkeadilan bagi komunitas tuan rumah.

1.1.5 Posisi Kajian Ini

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini memosisikan diri sebagai upaya menjembatani ketiga celah tersebut. Kajian ini bertolak dari model yang telah teruji di lapangan pada satu unit usaha perintis di Kampung Batik Laweyan, mengangkatnya menjadi model tingkat kawasan yang dapat direplikasi, lalu memproyeksikannya menjadi model tingkat kota dengan jangkauan internasional dalam bentuk residensi budaya berbasis komunitas.

Dengan demikian, kontribusi kajian ini bersifat ganda. Secara keilmuan, ia menawarkan model bertingkat yang menghubungkan praktik komunitas dengan perencanaan kota, disertai konsep Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas sebagai kerangka baru. Secara kebijakan, ia menyediakan rekomendasi yang berada dalam kewenangan perangkat daerah Kota Surakarta dan dapat dieksekusi melalui instrumen yang sudah tersedia, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan, revisi peraturan daerah, dan program peningkatan kapasitas UMKM yang sudah berjalan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi sepuluh persoalan pokok yang saling berkait.

1. Aset warisan budaya Kota Surakarta yang bertaraf nasional belum terkonversi menjadi produk wisata bernilai tambah tinggi, sehingga kinerja pariwisata belum mencerminkan besarnya potensi yang dimiliki.
2. Rata-rata lama menginap wisatawan yang hanya 1,45 hari menutup kemungkinan terjadinya pembelajaran budaya yang bermakna dan penyebaran manfaat ekonomi ke banyak pelaku usaha kecil.
3. Tingkat Penghunian Kamar hotel yang berkisar pada angka 50 persen menunjukkan hampir separuh kapasitas akomodasi belum termanfaatkan sepanjang tahun.
4. Program *edutourism* yang berjalan di tingkat pelaku usaha belum terstandardisasi, sehingga kualitas pengalaman, harga, dan sistem reservasinya beragam dan sulit dipasarkan secara kolektif.
5. Permintaan dari sektor pendidikan dan penelitian datang secara organik tanpa dikelola, sehingga potensi arus kunjungan yang terjadwal dan dapat diprediksi belum terkonversi menjadi pendapatan yang stabil bagi komunitas.
6. Kapasitas digital pelaku *edutourism* terhenti pada kemampuan teknis memproduksi konten dan belum sampai pada kemampuan menyusun strategi komunikasi digital yang terukur.

7. Kelembagaan komunitas seperti Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan dan kelompok sadar wisata umumnya belum berbadan hukum, sehingga tidak dapat menandatangani perjanjian kerja sama, membuka rekening kolektif, maupun mengajukan hibah secara mandiri.
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata belum mengakomodasi pariwisata kreatif berbasis komunitas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal perizinan, tarif, dan perlindungan usaha.
9. Tata kelola lima klaster destinasi budaya kota terfragmentasi pada entitas pengelola yang berbeda dengan tingkat kesiapan yang tidak seragam, sehingga sulit menciptakan pengalaman kunjungan yang kohesif lintas kawasan.
10. Rekam jejak pertukaran budaya internasional Kota Surakarta belum diformalkan menjadi produk *edutourism* berbasis komunitas dengan mekanisme distribusi manfaat yang jelas bagi komunitas tuan rumah.

1.3 Batasan Masalah

Agar kajian terfokus dan dapat dipertanggungjawabkan, ruang lingkupnya dibatasi pada lima dimensi berikut.

1.3.1 Batasan Substansi

Kajian membatasi diri pada empat gugus konsep, yaitu *edutourism* sebagai integrasi pengalaman belajar dan aktivitas wisata; *Community-Based Tourism* sebagai filosofi tata kelola; kearifan lokal Jawa sebagai konten pembelajaran sekaligus instrumen tata kelola; serta residensi budaya berbasis komunitas sebagai pengembangan lanjutan. Aspek teknis yang berada di luar keempat gugus tersebut — misalnya rekayasa tata ruang kawasan, analisis daya dukung lingkungan secara kuantitatif, atau kajian kelayakan finansial investasi akomodasi — tidak dibahas dan direkomendasikan sebagai riset lanjutan.

1.3.2 Batasan Geografis

Kajian dilaksanakan di wilayah administratif Kota Surakarta dengan fokus pada lima klaster destinasi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1. Kampung Batik Laweyan berperan sebagai laboratorium empiris utama karena di kawasan inilah data primer dikumpulkan; empat klaster lainnya dianalisis sebagai klaster pembanding dan calon replikasi berbasis data sekunder dan telaah literatur.

1.3.3 Batasan Temporal

Data dan informasi yang digunakan mencakup rentang 2022–2026, dengan horizon proyeksi mengikuti RPJMD Kota Surakarta 2025–2029 dan peta jalan implementasi hingga 2030. Analisis historis dilakukan secara terbatas, hanya sejauh diperlukan untuk memahami dinamika kemunduran dan kebangkitan industri batik Laweyan.

1.3.4 Batasan Subjek

Subjek kajian meliputi enam kelompok pemangku kepentingan: komunitas lokal sebagai informan utama; perangkat daerah Pemerintah Kota Surakarta; pengelola destinasi dan lembaga budaya; wisatawan nusantara dan mancanegara; akademisi dan praktisi pariwisata; serta pelaku budaya internasional sebagai calon peserta program residensi.

1.3.5 Batasan Metodologis

Komponen data primer kajian ini bertumpu pada wawancara mendalam dengan pengelola Batik Mahkota Laweyan. Rancangan survei berskala penuh sebagaimana diuraikan pada Bab III merupakan rancangan yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahap lanjutan, bukan rancangan yang telah selesai dieksekusi. Konsekuensinya, seluruh proyeksi ekonomi dalam kajian ini bersifat indikatif dan mekanistik — menjelaskan melalui jalur apa dampak terjadi — bukan klaim besaran kuantitatif yang pasti. Batasan ini dinyatakan secara terbuka sejak awal agar tidak ada pembaca yang memperlakukan angka proyeksi sebagai hasil pengukuran.

No.	Klaster Destinasi	Fokus Konten Edutourism dan Residensi	Peran dalam Kajian dan OPD Koordinator
1	**Kawasan Cagar Budaya Laweyan (Kampung Batik Laweyan)**	Batik tulis dan cap, desain tekstil, sejarah perdagangan batik, filosofi motif, tradisi *butulan*, *workshop* kolaboratif	**Studi kasus utama** — sumber data primer. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan (FPKBL)
2	**Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kawasan Baluwarti**	Tari klasik Jawa, gamelan, sastra Jawa Kuno, ritual keraton, arsitektur istana, homestay rumah tradisional	Klaster pembanding dan pengembangan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama pengelola Keraton
3	**Pura Mangkunegaran dan kawasan sekitarnya**	*Beksan* Mangkunegaran, seni pertunjukan, koleksi museum dan perpustakaan, penyelenggaraan SIPA	Klaster dengan kesiapan internasionalisasi tertinggi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama pengelola Pura Mangkunegaran
4	**Kampung Blangkon Potrojayan (Serengan)**	Kerajinan blangkon, kriya kulit dan logam, narasi identitas budaya Jawa	Klaster replikasi model. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama paguyuban dan Pokdarwis Potrojayan
5	**Kawasan Villapark Banjarsari dan destinasi pendukung**	Arsitektur kolonial-Jawa, kuliner tradisional dan jamu, seni rupa, pasar tradisional	Klaster pendukung. Lintas perangkat daerah dan komunitas seniman kota

Tabel 1.1 Klaster Destinasi Fokus Kajian, Konten Unggulan, dan Peran

Sumber: diolah dari dokumen kebijakan Kota Surakarta dan hasil telaah literatur (2026).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, kajian ini merumuskan tujuh pertanyaan penelitian.

1. Bagaimana potensi dan kondisi eksisting pengembangan *edutourism* berbasis komunitas dan budaya lokal di Kota Surakarta ditinjau dari aspek warisan budaya *tangible* dan *intangible*, kapasitas komunitas lokal, infrastruktur pendukung, serta tata kelola destinasi?
2. Bagaimana model pengembangan *edutourism* berbasis komunitas yang sesuai dengan karakteristik budaya lokal dan kebijakan pembangunan Kota Surakarta, sebagaimana tercermin dalam praktik Kampung Batik Laweyan?
3. Bagaimana bentuk partisipasi dan kapasitas komunitas lokal serta pemetaan peran antar-pemangku kepentingan dalam pengembangan *edutourism* di destinasi wisata budaya Kota Surakarta?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi *edutourism* berbasis komunitas di Kota Surakarta, baik pada skala unit usaha maupun skala kota?
5. Bagaimana peran kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Jawa dalam membentuk desain program *edutourism* yang autentik sekaligus menjadi instrumen tata kelola yang menjaga komunitas dari risiko komodifikasi?
6. Bagaimana model residensi budaya global berbasis komunitas dapat dirancang sebagai pengembangan lanjutan dari model *edutourism* yang ada, serta apa prasyarat kesiapan yang harus dipenuhi komunitas?
7. Bagaimana strategi pengembangan *edutourism* berbasis komunitas yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian warisan budaya, serta mendukung pencapaian target RPJMD Kota Surakarta 2025–2029, Asta Cita Surakarta, dan agenda RIPK 2025–2045?

1.5 Tujuan Penelitian

Setiap tujuan diturunkan langsung dari satu rumusan masalah, dengan hubungan satu banding satu.

1. **Memetakan potensi dan kondisi eksisting** pengembangan *edutourism* berbasis komunitas dan budaya lokal di Kota Surakarta, meliputi warisan budaya *tangible* dan *intangible*, kapasitas komunitas, infrastruktur pendukung, dan sistem tata kelola destinasi.
2. **Merumuskan model pengembangan _edutourism_ berbasis komunitas** yang sesuai dengan karakteristik budaya lokal dan kebijakan pembangunan Kota Surakarta, dengan Kampung Batik Laweyan sebagai laboratorium empiris utama.

3. **Menganalisis bentuk partisipasi dan kapasitas komunitas lokal** serta memetakan peran, kontribusi khas, dan kebutuhan penguatan setiap pemangku kepentingan dalam ekosistem *edutourism* kota.
4. **Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat** implementasi *edutourism* berbasis komunitas pada dua skala analisis serta merumuskan strategi mitigasinya.
5. **Menganalisis peran kearifan lokal dan nilai-nilai budaya Jawa** sebagai konten pembelajaran sekaligus instrumen tata kelola yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian autentisitas.
6. **Merancang model residensi budaya global berbasis komunitas** (*Global Community Residency Edutourism*/GCRE) sebagai pengembangan lanjutan yang kontekstual, aplikatif, dan berkontribusi pada penguatan diplomasi budaya kota.
7. **Merumuskan strategi dan rekomendasi kebijakan** yang seltingkat dengan RPJMD Kota Surakarta 2025–2029, Asta Cita Surakarta, dan RIPK 2025–2045, serta berada dalam kewenangan perangkat daerah untuk dilaksanakan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoretis

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan konsep *edutourism* berbasis komunitas dalam konteks kota warisan budaya di Indonesia.
2. Memperkaya literatur tentang integrasi *Community-Based Tourism* dengan *edutourism* melalui penambahan dimensi residensi budaya berdurasi panjang yang belum banyak dikaji dalam konteks kota bersejarah di Indonesia.
3. Menyumbangkan kerangka konseptual **Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas** (*Community Cultural Diplomacy*), yaitu bagaimana program residensi di tingkat komunitas dapat menjadi instrumen diplomasi informal yang melengkapi diplomasi formal antarnegara.
4. Menyediakan model bertingkat yang menghubungkan analisis tingkat unit usaha dengan perencanaan tingkat kota, sehingga dapat diadaptasi peneliti lain di kota-kota bersejarah dengan karakteristik serupa.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis kajian ini bagi masing-masing pemangku kepentingan dirangkum dalam tabel berikut.

Pemangku Kepentingan	Manfaat Konkret
Pemerintah Kota Surakarta (Wali Kota dan Bappeda)	Menyediakan kajian berbasis data dan rekomendasi kebijakan untuk perumusan program *edutourism* dan residensi budaya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan, guna mempercepat pencapaian sasaran RPJMD 2025–2029 dan Asta Cita Surakarta.

Pemangku Kepentingan	Manfaat Konkret
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Memberikan panduan operasional berbasis riset untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program *edutourism* sebagai produk wisata unggulan, termasuk standar pengelolaan tamu, kurikulum edukasi budaya, dan mekanisme kolaborasi dengan lembaga internasional.
Dinas Koperasi dan UMKM serta PLUT UMKM	Menyediakan basis data dan arah program peningkatan kapasitas bagi UMKM batik dan kriya yang bertransformasi menjadi pelaku *edutourism*, khususnya pada bidang legalitas, sertifikasi, dan pemasaran digital.
Komunitas lokal dan pelaku UMKM	Meningkatkan pemahaman komunitas tentang model CBT dan strategi pemanfaatan program *edutourism* untuk menciptakan sumber pendapatan baru dari *workshop* berbayar, homestay, produk kriya, hingga jasa pemandu budaya secara inklusif.
Pengelola destinasi dan Pokdarwis	Menyediakan model pengembangan dan panduan praktis untuk meningkatkan kualitas program wisata edukasi, memperpanjang durasi tinggal wisatawan, dan membangun jejaring kemitraan berkelanjutan.
Perguruan tinggi (UMS, ISI Surakarta, UNS)	Menyediakan data empiris dan model konseptual untuk pengembangan kurikulum pariwisata budaya, KKN tematik, program magang, serta penelitian lanjutan yang mendukung publikasi ilmiah bereputasi.
BRIDA Kota Surakarta	Memberikan kontribusi pada peningkatan Indeks Kualitas Kebijakan sebagai indikator kinerja utama, serta basis data riset daerah yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan.
Lembaga budaya asing dan mitra internasional	Membuka peluang kemitraan residensi yang terstruktur dan terjamin kualitasnya, menjadikan Surakarta destinasi residensi budaya pilihan di Asia Tenggara.

Tabel 1.2 Manfaat Praktis Kajian bagi Pemangku Kepentingan

Sumber: analisis penyusun (2026).

1.7 Keaslian dan Kebaruan Penelitian

Untuk menunjukkan bahwa kajian ini bukan pengulangan karya terdahulu, berikut disajikan perbandingan ringkas dengan penelitian yang paling berdekatan.

Peneliti dan Tahun	Fokus dan Lokus	Metode	Perbedaan dengan Kajian Ini
Sarjiyanto dkk. (2023)	Faktor keberlanjutan industri batik dan pembangunan komunitas di Kampung Batik Laweyan	Survei kuantitatif, 511 responden	Berfokus pada keberlanjutan industri, bukan pada rancangan produk wisata edukasi; tidak membahas kunjungan berdurasi panjang.
Nisrina & Pratama (2024)	Transformasi Sentra Batik Laweyan menjadi kampung wisata edukasi	Kualitatif deskriptif	Mendokumentasikan proses transformasi, tetapi belum merumuskan model yang dapat direplikasi lintas klaster maupun menjadi instrumen kebijakan.

Peneliti dan Tahun	Fokus dan Lokus	Metode	Perbedaan dengan Kajian Ini
Lestari dkk. (2024)	Partisipasi masyarakat lokal dalam pariwisata budaya Kampung Batik Laweyan	Kualitatif deskriptif	Memetakan dimensi partisipasi, tetapi tidak menghubungkannya dengan sasaran terukur dokumen perencanaan daerah.
Widodo & Putra (2024)	Strategi adaptasi komunitas Laweyan pasca-kemunduran industri batik	Historis-kualitatif	Berorientasi historis; tidak menawarkan rancangan program maupun proyeksi kebijakan ke depan.
Modiash & Yuliastuti (2025)	Tingkat keberlanjutan Kampung Blangkon Potrojayan	Skoring dan *Importance Performance Analysis*	Terbatas pada satu kampung tematik dan pada dimensi keberlanjutan permukiman, bukan pada rancangan produk *edutourism*.
Puspitasari dkk. (2025)	Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan sebagai sarana wisata edukasi sejarah	Kualitatif deskriptif	Menilai potensi museum keraton; belum menyentuh tata kelola komunitas maupun distribusi manfaat ekonomi.
Setyaningsih dkk. (2024)	Model pengembangan kampung wisata melalui pelibatan komunitas	Kualitatif dengan pemetaan budaya	Menyediakan model kampung wisata umum; belum mengintegrasikan dimensi diplomasi budaya dan program berdurasi panjang.
Kajian ini (2026)	Model *edutourism* berbasis komunitas lintas klaster Kota Surakarta dan pengembangannya menjadi residensi budaya global	*Mixed methods* sekuensial eksplanatoris dengan studi kasus mendalam	Menyambungkan bukti tingkat unit usaha dengan perencanaan tingkat kota; memperkenalkan dimensi residensi budaya; mengajukan konsep Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas.

Tabel 1.3 Perbandingan Kajian Ini dengan Penelitian Terdahulu

Sumber: analisis penyusun atas literatur terverifikasi (2026).

Kebaruan kajian ini karenanya terletak pada tiga hal. *Pertama*, penyambungan tingkat analisis: bukti empiris pada satu unit usaha perintis dinaikkan menjadi model kawasan, lalu menjadi kerangka kota lintas klaster. *Kedua*, pengenalan dimensi durasi: residensi budaya diperlakukan bukan sebagai jenis program yang berbeda, melainkan sebagai pendalaman logis dari *workshop* intensif yang sudah berjalan. *Ketiga*, penawaran konsep Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas yang menautkan literatur CBT dengan agenda RIPK 2025–2045.

1.8 Definisi Operasional dan Sistematika Penulisan

1.8.1 Definisi Operasional

Agar tidak terjadi perbedaan tafsir, sepuluh istilah kunci dalam kajian ini didefinisikan secara operasional sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4.

Istilah	Definisi Operasional dalam Kajian Ini	Indikator Pengamatan
Edutourism	Bentuk pariwisata yang secara sengaja merancang tujuan pembelajaran terstruktur ke dalam kegiatan kunjungan, sehingga pengunjung memperoleh pengetahuan atau keterampilan baru melalui interaksi langsung dengan objek, lingkungan, dan komunitas.	Ada modul atau alur belajar; ada fasilitator; ada luaran belajar yang dapat ditunjukkan pengunjung.
Community-Based Tourism	Pendekatan pengembangan pariwisata di mana masyarakat lokal memegang kendali substansial atas perencanaan, pengelolaan, dan distribusi manfaat, sehingga sebagian besar manfaat tetap berada di dalam komunitas.	Keterlibatan komunitas dalam pengambilan keputusan; proporsi manfaat yang tinggal di kawasan; keberadaan kelembagaan lokal.
Residensi budaya	Praktik berkesenian dan berbudaya di mana pelaku budaya tinggal dan berkarya dalam suatu komunitas selama periode tertentu sebagai mitra berkarya, bukan sebagai penonton.	Durasi tinggal 2–12 minggu; keberadaan mentor lokal; luaran karya kolaboratif.
Modal sosial	Jaringan hubungan, norma berbagi, dan kepercayaan dalam komunitas yang memudahkan koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama.	Frekuensi kegiatan kolektif; keberadaan norma berbagi pekerjaan; tingkat kepercayaan pada kelembagaan lokal.
Kearifan lokal	Pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang diwariskan turun-temurun dalam komunitas Surakarta dan terbukti efektif menjaga harmoni sosial serta melestarikan budaya.	Penerapan *gotong royong*, *tepa slira*, *andhap asor*, dan *rukun* dalam pengelolaan program.
Co-creation	Proses penciptaan nilai bersama antara komunitas tuan rumah dan pengunjung, di mana keduanya berkontribusi pada karya, makna, atau narasi yang dihasilkan.	Adanya ruang ekspresi bebas bagi pengunjung; adanya karya bersama; adanya perubahan pada praktik tuan rumah.
Autentisitas budaya	Kesesuaian antara yang disajikan kepada pengunjung dengan praktik budaya yang sungguh-sungguh dijalankan komunitas dalam kehidupan sehari-hari.	Pelaku adalah anggota komunitas; proses tidak disederhanakan demi kecepatan; tokoh budaya terlibat dalam penetapan konten.
Komodifikasi budaya	Pergeseran makna dan fungsi praktik budaya dari yang bernilai sakral atau sosial menjadi semata komoditas komersial.	Ritual dipentaskan di luar konteks dan waktunya; ruang sakral dibuka tanpa protokol; keputusan konten diambil pihak luar komunitas.
Lama menginap	Rata-rata jumlah malam yang dihabiskan tamu pada akomodasi di Kota Surakarta sebagaimana dihitung dan dirilis BPS.	Angka rata-rata lama menginap tamu hotel bintang dan nonbintang per periode rilis.

Istilah	Definisi Operasional dalam Kajian Ini	Indikator Pengamatan
Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas	Bentuk diplomasi budaya yang berlangsung melalui pertukaran antar-komunitas, bukan antarpemerintah, dan tumbuh dari interaksi personal yang berkelanjutan.	Jumlah alumni program yang aktif; kemitraan institusional yang lahir dari relasi personal; publikasi tentang Surakarta di negara asal peserta.

Tabel 1.4 Definisi Operasional Istilah Kunci

Sumber: dirumuskan penyusun dari landasan teori pada Bab II (2026).

1.8.2 Sistematika Penulisan

Naskah ini disusun dalam lima bab yang saling bertaut secara logis.

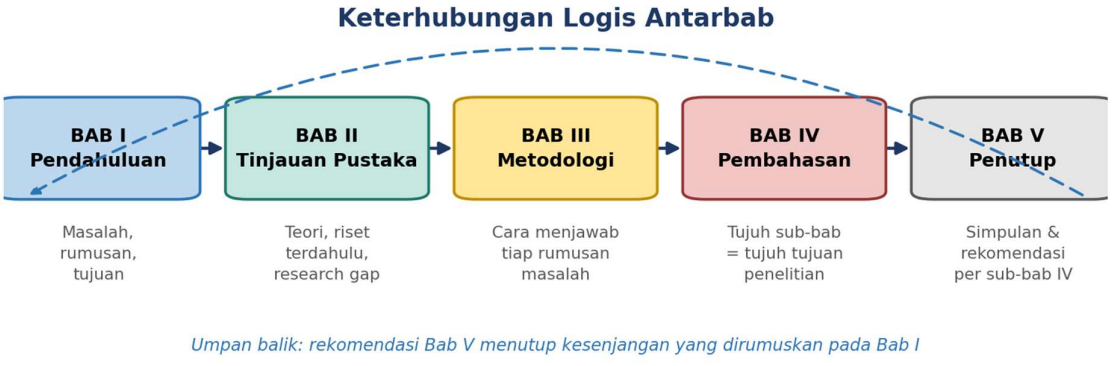
Bab I Pendahuluan memaparkan latar belakang masalah yang bergerak dari kondisi ideal ke kenyataan lapangan, kesenjangan di antara keduanya, peta penelitian terdahulu, celah yang belum terjawab, dan posisi kajian ini; dilanjutkan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, keaslian penelitian, serta definisi operasional.

Bab II Tinjauan Pustaka menyajikan landasan teori sebagai pisau analisis, sintesis penelitian terdahulu yang disusun secara tematik, perumusan *research gap*, kerangka berpikir, dan proposisi penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian menguraikan jenis dan pendekatan penelitian beserta alasan pemilihannya, lokasi dan waktu, populasi dan sampel, variabel dan definisi operasional, teknik pengumpulan data, uji instrumen, teknik analisis data, serta etika penelitian.

Bab IV Pembahasan terdiri atas tujuh sub-bab yang masing-masing menjawab satu tujuan penelitian secara berurutan.

Bab V Penutup memuat kesimpulan atas setiap sub-bab pembahasan serta rekomendasi yang dipilah menjadi rekomendasi penelitian dan rekomendasi kebijakan.



Gambar 1.2 Keterhubungan Logis Antarbab

Sumber: analisis penyusun (2026).

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini disusun mengikuti alur yang menuntun pembaca dari konsep menuju celah pengetahuan. Sub-bab 2.1 memaparkan landasan teori yang benar-benar dipakai sebagai pisau analisis, lengkap dengan alasan pemilihannya di antara mazhab yang ada. Sub-bab 2.2 menyintesiskan penelitian terdahulu secara tematik — bukan satu paragraf per artikel — untuk menunjukkan pola temuan yang telah mapan, titik-titik yang masih bertentangan, dan metode yang lazim dipakai. Sub-bab 2.3 merumuskan *research gap* yang menjustifikasi rumusan masalah. Sub-bab 2.4 menyajikan kerangka berpikir sebagai sintesis ketiganya, dan sub-bab 2.5 menurunkan proposisi penelitian yang akan diuji pada Bab IV.

Perlu disampaikan satu catatan metodologis di muka. Seluruh rujukan pada bab ini telah diverifikasi keberadaannya beserta nama penulis, nomor volume, dan halamannya. Rujukan yang tidak dapat diverifikasi — meskipun sebelumnya tercantum dalam naskah versi terdahulu — telah dikeluarkan, dan pernyataan yang bergantung padanya disesuaikan atau dihapus. Konsekuensinya, jumlah rujukan pada revisi ini lebih sedikit tetapi seluruhnya dapat ditelusuri keotentikannya. Rincian tindakan verifikasi disajikan pada Lampiran A.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Edutourism dan Pembelajaran Kontekstual

Edutourism atau wisata pendidikan merupakan bentuk pariwisata yang mengintegrasikan pengalaman belajar dengan aktivitas wisata, menciptakan nilai tambah edukatif bagi pengunjung sambil berkontribusi pada pelestarian warisan budaya dan lingkungan. Konsep ini berkembang sejak akhir abad ke-20 sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran wisatawan akan pentingnya pengalaman yang bermakna dalam perjalanan (Ritchie dkk., 2003).

Bodger (1998) mendefinisikan *edutourism* sebagai program wisata di mana peserta melakukan perjalanan ke suatu lokasi sebagai kelompok dengan tujuan utama terlibat langsung dalam pengalaman belajar yang terkait dengan lokasi tersebut. Falk dan Dierking (2000) menekankan bahwa pembelajaran dalam konteks kunjungan bersifat kontekstual: pengetahuan tidak berpindah melalui penyampaian searah, melainkan terbentuk melalui interaksi antara konteks pribadi pengunjung, konteks fisik tempat, dan konteks sosial-budaya yang melingkupinya. Poria dkk. (2006) menambahkan dimensi afektif: pada situs warisan budaya, yang menentukan kualitas pengalaman bukan semata banyaknya informasi yang diterima, melainkan terbangunnya koneksi emosional antara pengunjung dan nilai-nilai yang dilestarikan.

Ketiga rujukan tersebut dipilih karena bersama-sama menjelaskan tiga hal yang dibutuhkan kajian ini: **apa** yang membedakan *edutourism* dari wisata biasa

(Bodger), **bagaimana** pembelajaran itu terjadi (Falk dan Dierking), dan **mengapa** kedalaman pengalaman lebih penting daripada volume informasi (Poria dkk.). Implikasi teoretisnya bagi kajian ini bersifat langsung: jika pembelajaran bermakna menuntut interaksi kontekstual dan koneksi emosional, maka durasi kunjungan bukan variabel netral. Kunjungan satu setengah hari secara struktural membatasi kedalaman yang mungkin dicapai. Inilah dasar teoretis mengapa kajian ini memperlakukan perpanjangan durasi sebagai intervensi substantif, bukan sekadar penambahan jam.

2.1.2 Community-Based Tourism sebagai Filosofi Tata Kelola

Community-Based Tourism (CBT) merupakan pendekatan pengembangan pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan manfaat pariwisata. Okazaki (2008) mendefinisikan CBT sebagai bentuk pariwisata di mana masyarakat lokal memiliki kontrol substansial atas pengembangan dan pengelolaan pariwisata, serta sebagian besar manfaat tetap berada di dalam komunitas. Mtapuri dan Giampiccoli (2019) menegaskan bahwa CBT bukan sekadar soal partisipasi, melainkan soal pemberdayaan, keadilan distribusi manfaat, dan keberlanjutan jangka panjang. Tolkach dan King (2015) menunjukkan bahwa CBT bertujuan meminimalkan dampak negatif pariwisata massal sambil memaksimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat lokal.

Terdapat perdebatan yang perlu dinyatakan secara terbuka. Sebagian literatur memperlakukan CBT terutama sebagai **teknik operasional** — sekumpulan prosedur untuk melibatkan warga dalam kegiatan wisata. Sebagian lain, sebagaimana ditegaskan Okazaki serta Mtapuri dan Giampiccoli, memperlakukannya sebagai **filosofi tata kelola** yang menyangkut siapa yang berhak mengambil keputusan dan siapa yang memperoleh manfaat. Kajian ini memilih posisi kedua. Alasannya bersifat empiris, bukan ideologis: program yang mendatangkan orang asing untuk tinggal di rumah warga selama berminggu-minggu menyentuh ruang privat dan ruang sakral komunitas. Pada situasi semacam itu, pelibatan yang berhenti pada tataran teknis tidak memadai; komunitas harus memiliki kewenangan menolak, membatasi, dan menetapkan syarat. Konsekuensi pilihan ini terlihat pada rancangan model di Bab IV, di mana kendali komunitas ditempatkan pada tiga titik keputusan yang menentukan.

Enam prinsip dasar CBT yang dipakai sebagai indikator dalam kajian ini adalah kepemilikan dan kendali lokal, partisipasi aktif pada seluruh tahap, distribusi manfaat yang adil, pelestarian budaya dan lingkungan sebagai prioritas, pembangunan kapasitas masyarakat, serta kemitraan yang setara antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

2.1.3 Modal Sosial

Teori modal sosial merujuk pada jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama. Coleman (1988) memandang modal sosial sebagai sumber daya yang melekat pada struktur hubungan antarindividu dan memungkinkan tercapainya tujuan yang tidak dapat dicapai secara sendiri-sendiri. Putnam (1993) menunjukkan melalui studi komparatif di Italia bahwa kualitas kelembagaan sangat ditentukan oleh kepadatan jaringan keterlibatan warga dan norma timbal balik yang berlaku di dalamnya.

Dalam konteks Surakarta, nilai-nilai budaya Jawa — *gotong royong*, *tepa slira*, *andhap asor*, dan *rukun* — merupakan manifestasi modal sosial yang dapat dimobilisasi untuk tata kelola partisipatif. Teori ini dipakai untuk menjelaskan satu temuan yang tidak dapat diterangkan oleh teori CBT semata: mengapa pelaku usaha yang lebih mapan bersedia membina pelaku usaha yang lebih kecil tanpa adanya kewajiban regulatif apa pun. Perilaku semacam itu sulit dijelaskan sebagai kepatuhan pada aturan; ia lebih tepat dibaca sebagai bekerjanya norma timbal balik dalam pengertian Coleman dan Putnam.

2.1.4 Co-Creation dalam Pariwisata

Teori *co-creation* (Prahalad & Ramaswamy, 2004) menekankan bahwa nilai tidak diciptakan oleh produsen saja, melainkan melalui interaksi kolaboratif antara produsen dan konsumen. Dalam konteks *edutourism*, teori ini menunjukkan bahwa pengalaman pembelajaran yang bermakna tercipta bukan melalui penyajian searah budaya lokal kepada peserta, melainkan melalui proses di mana pengunjung dan komunitas bersama-sama menciptakan karya, makna, dan narasi baru.

Teori ini dipilih karena menyediakan penjelasan atas praktik yang tampak pada data primer kajian ini, yakni pemberian kebebasan ekspresi kreatif kepada pengunjung dalam medium batik. Praktik tersebut sering dibaca sekadar sebagai strategi pemasaran untuk menarik segmen muda. Melalui lensa *co-creation*, ia terbaca sebagai sesuatu yang lebih mendasar: pergeseran peran pengunjung dari penerima menjadi mitra pencipta, yang pada gilirannya mengubah pula posisi pengrajin dari penjual menjadi mentor.

2.1.5 Pariwisata Berkelanjutan

Teori pariwisata berkelanjutan menjadi kerangka normatif yang berlandaskan konsep pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan World Commission on Environment and Development (1987) dan diadaptasi UNWTO ke dalam konteks pariwisata. UNWTO (2005) mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, serta memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. Butler (1999) menekankan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian sumber daya, sementara Bramwell dan

Lane (2011) mengarahkan perhatian pada dimensi tata kelola — siapa yang berwenang memutuskan dan melalui mekanisme apa.

Dalam ranah pelestarian budaya, UNESCO (2003) melalui Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda menekankan pentingnya pelestarian yang hidup (*living heritage*), yaitu ketika tradisi budaya terus dipraktikkan dan ditransmisikan antargenerasi, bukan sekadar didokumentasikan. Timothy dan Boyd (2003) menjelaskan bahwa pariwisata warisan budaya dapat menjadi alat pelestarian yang efektif apabila dikelola dengan baik, karena menciptakan insentif ekonomi untuk memelihara situs dan tradisi. Smith (2006) menegaskan bahwa pelestarian budaya dalam konteks pariwisata harus melibatkan masyarakat lokal sebagai penjaga utama warisan, bukan sekadar sebagai objek tontonan.

Kombinasi UNESCO (2003) dengan Timothy dan Boyd (2003) menghasilkan satu implikasi yang menjadi prinsip perancangan dalam kajian ini: pelestarian yang paling kokoh adalah pelestarian yang secara ekonomi menguntungkan bagi pelakunya. Selama membatik lebih menguntungkan daripada meninggalkannya, regenerasi pengrajin berjalan dengan sendirinya. Karena itu, kajian ini tidak memperlakukan pelestarian dan komersialisasi sebagai dua kutub yang bertentangan, melainkan sebagai dua hal yang harus dirancang agar saling menopang — dengan syarat kendali atas apa yang boleh dikomersialkan tetap berada di tangan komunitas.

2.1.6 Residensi Budaya dan Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas

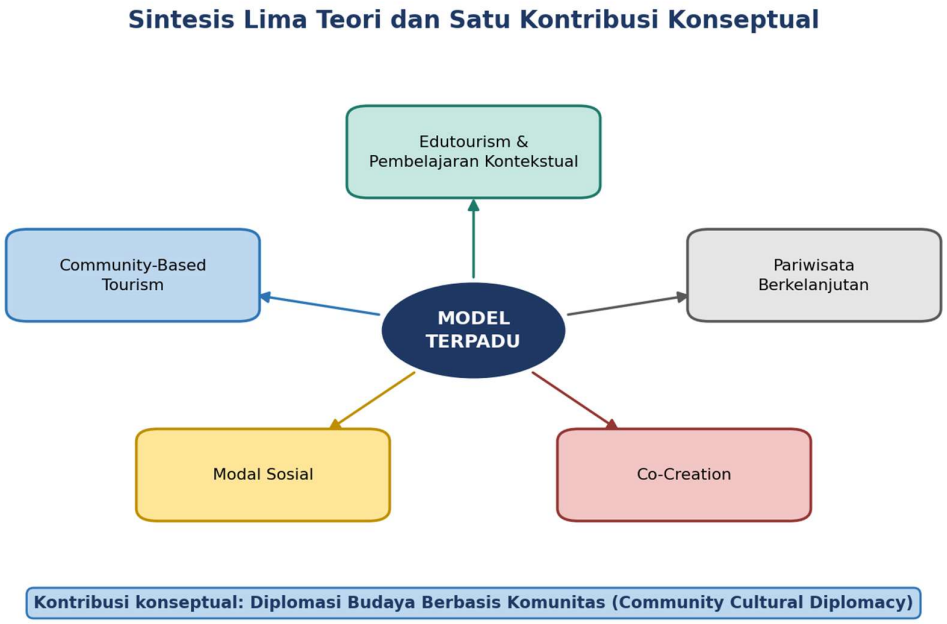
Residensi budaya (*cultural residency*) adalah praktik berkesenian dan berbudaya di mana seniman, akademisi, atau pelaku budaya tinggal dan berkarya dalam suatu komunitas atau lembaga selama periode tertentu, dengan tujuan memperoleh pengalaman baru, menghasilkan karya kolaboratif, dan memperluas jejaring budaya. Praktik ini berakar panjang dalam tradisi akademis dan seni, namun kini berkembang menjadi instrumen diplomasi budaya kontemporer yang mengedepankan interaksi dari bawah ke atas antarpelaku budaya lintas bangsa.

Landasan kebijakan bagi praktik ini di Indonesia bersifat kuat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menetapkan pembinaan sebagai salah satu dari empat aspek penguatan tata kelola kebudayaan di samping pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang RIPK 2025–2045 kemudian menempatkan pemajuan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya sekaligus kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia, dan secara eksplisit menjadikan RIPK acuan bagi gubernur serta bupati dan wali kota dalam memutakhirkan pokok pikiran kebudayaan daerah (Presiden RI, 2024). Dengan demikian, program residensi budaya di tingkat kota bukan gagasan yang berdiri di luar kerangka kebijakan; ia justru merupakan penerapan mandat yang sudah ada.

Dari titik ini kajian mengajukan kontribusi konseptualnya, yaitu **Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas** (*Community Cultural Diplomacy*). Konsep ini memandang

pertukaran budaya antar-komunitas — bukan antarpemerintah — sebagai bentuk diplomasi yang tumbuh organik dari interaksi manusiawi yang berkelanjutan. Perbedaannya dengan diplomasi budaya konvensional terletak pada empat hal: pelakunya adalah warga biasa dan bukan pejabat; arahnya dari bawah ke atas dan bukan sebaliknya; durasinya panjang dan bukan seremonial; serta luarannya berupa relasi personal yang bertahan, bukan dokumentasi acara. Perbedaan ini penting karena berimplikasi pada cara mengukur keberhasilan: indikatornya bukan jumlah kegiatan yang diselenggarakan, melainkan jumlah relasi yang masih hidup beberapa tahun setelah program berakhir.

Perlu ditegaskan bahwa konsep ini diajukan sebagai **proposisi konseptual yang masih memerlukan pengujian empiris**, bukan sebagai temuan yang telah terbukti. Naskah versi sebelumnya cenderung menyajikannya sebagai kontribusi teoretis yang sudah mapan; revisi ini menempatkannya secara lebih hati-hati sebagai hipotesis kerja yang justru menjadi salah satu agenda riset lanjutan pada Bab V.



Gambar 2.1 Sintesis Lima Teori dan Satu Kontribusi Konseptual

Sumber: analisis penyusun (2026).

2.1.7 Sintesis dan Pembagian Kerja Antarteori

Kelima teori tidak dipakai secara paralel, melainkan dengan pembagian kerja yang jelas sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. Pembagian ini sekaligus menjawab pertanyaan yang lazim diajukan penguji, yaitu untuk apa setiap teori digunakan pada bab-bab berikutnya.

Teori	Digunakan untuk Menjelaskan	Dipakai pada Sub-bab	Rujukan Utama
Edutourism dan pembelajaran kontekstual	Mengapa kedalaman dan durasi menentukan mutu pengalaman belajar	4.1, 4.2, 4.6	Bodger (1998); Falk & Dierking (2000); Poria dkk. (2006); Ritchie dkk. (2003)
Community-Based Tourism	Siapa yang berwenang memutuskan dan siapa yang memperoleh manfaat	4.2, 4.3, 4.6	Okazaki (2008); Mtapuri & Giampiccoli (2019); Tolkach & King (2015)
Modal sosial	Mengapa kerja sama sukarela antar pelaku usaha dapat terjadi tanpa paksaan regulasi	4.3, 4.5	Coleman (1988); Putnam (1993)
Co-creation	Mengapa kebebasan ekspresi pengunjung menaikkan nilai, bukan menurunkan autentisitas	4.2, 4.5	Prahalad & Ramaswamy (2004)
Pariwisata berkelanjutan	Bagaimana menyeimbangkan sasaran ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan tata kelola	4.1, 4.5, 4.7	UNWTO (2005); Butler (1999); Bramwell & Lane (2011); WCED (1987)
Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas *(kontribusi konseptual)*	Bagaimana relasi personal lintas bangsa menjadi aset diplomatik kota	4.6, 4.7	Diajukan penyusun dengan landasan UU 5/2017 dan Perpres 115/2024

Tabel 2.1 Pembagian Kerja Antarteori dan Penggunaannya dalam Kajian

Sumber: analisis penyusun (2026).

2.2 Penelitian Terdahulu (State of the Art)

Sintesis berikut disusun menurut isu, bukan menurut artikel, agar tampak pola temuan yang telah konsisten, titik yang masih diperdebatkan, dan kecenderungan metodologis yang berlaku.

2.2.1 Tema Pertama: Kebangkitan Kawasan Batik Laweyan sebagai Kasus yang Berulang Dikaji

Terdapat konsistensi yang kuat di antara studi-studi tentang Kampung Batik Laweyan. Sarjiyanto dkk. (2023), melalui survei terhadap 511 responden yang mencakup 254 unit usaha dan 257 anggota masyarakat, menemukan bahwa keberlanjutan industri batik di kawasan ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan komunal — secara sosial, ekonomi, politik, maupun kultural. Temuan ini diperkuat dari sudut historis oleh Widodo dan Putra (2024), yang menunjukkan bahwa kemunduran industri batik pada akhir abad ke-20 justru mendorong adaptasi komunitas melalui diversifikasi usaha dan inisiatif pariwisata. Nisrina dan Pratama

(2024) melengkapi gambaran tersebut dengan mendokumentasikan proses transformasi sentra industri menjadi kampung wisata edukasi, sementara Lestari dkk. (2024) memetakan partisipasi masyarakat lokal melalui wawancara dengan pelaku bisnis batik, pengurus masyarakat, tokoh masyarakat, perwakilan pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pola yang konsisten dari keempat studi tersebut adalah bahwa **kebangkitan Laweyan bersifat kolektif, bukan individual**. Tidak ada satu pun studi yang menjelaskan kebangkitan kawasan sebagai hasil keberhasilan satu pengusaha; seluruhnya menunjuk pada mekanisme kolektif berupa forum kawasan, berbagi sumber daya, dan pembentukan identitas bersama. Bagi kajian ini, konsistensi tersebut merupakan dasar empiris untuk memperlakukan kelembagaan komunitas sebagai variabel kunci, bukan sebagai pelengkap.

Perlu dicatat bahwa titik yang belum terjawab dari kelompok studi ini adalah dimensi infrastruktur fisik kawasan. Anugrahaningrum dkk. (2021) menemukan bahwa tingkat kesesuaian infrastruktur Kampung Batik Laweyan terhadap konsep ramah lingkungan hanya berada pada kategori sedang, dengan persoalan yang antara lain tampak pada kondisi Sungai Jenes. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan naratif dan kelembagaan kawasan belum sepenuhnya diikuti kesiapan fisik — sebuah ketidakselarasan yang akan menjadi pertimbangan pada perancangan standar homestay di Bab IV.

2.2.2 Tema Kedua: Kampung Tematik Kriya dan Batas Keberlanjutannya

Kelompok studi kedua memusatkan perhatian pada Kampung Blangkon Potrojayan di Kecamatan Serengan. Apalso (2022) menganalisis proses kolaborasi antar-pemangku kepentingan di kawasan ini menggunakan kerangka proses kolaboratif Ansell dan Gash (2008) yang terdiri atas dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, saling pemahaman, dan hasil antara. Studi tersebut mencatat bahwa kawasan ini mengalami degradasi selama kurang lebih dua dekade sebelum upaya revitalisasi dilakukan.

Modiash dan Yuliastuti (2025) melengkapi dengan pengukuran tingkat keberlanjutan, dan menemukan bahwa Kampung Blangkon Potrojayan berada pada tingkat cukup berkelanjutan dengan skor 2,21. Empat atribut yang menjadi prioritas utama pengembangan adalah kondisi jaringan jalan, jenis media promosi, ketersediaan pekerja yang kompeten, dan keikutsertaan dalam kegiatan pameran. Rekomendasi paling konkret dari studi tersebut adalah perlunya penetapan lahan khusus penjemuran blangkon komunal di kawasan rencana kampung wisata, agar pergerakan wisatawan dan warga lokal tidak saling mengganggu. Sebelumnya, Triratma dkk. (2019) telah mengusulkan model pengembangan kampung wisata blangkon berbasis konsep kearifan lokal.

Pola yang muncul dari kelompok studi ini berbeda dari kelompok pertama. Jika Laweyan menunjukkan kekuatan kelembagaan dengan kelemahan infrastruktur, Potrojayan menunjukkan **potensi konten yang kuat dengan kelembagaan dan**

promosi yang masih lemah. Perbedaan profil ini menjadi dasar penilaian kesiapan lintas klaster pada Bab IV, dan sekaligus menjelaskan mengapa strategi replikasi tidak dapat diseragamkan.

2.2.3 Tema Ketiga: Institusi Keraton sebagai Ruang Edukasi

Puspitasari dkk. (2025) menemukan bahwa Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Surakarta sama-sama memiliki museum dengan potensi tinggi sebagai daya tarik wisata edukasi sejarah, dan bahwa keduanya bersifat komplementer karena memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal asal-usul, gelar kebangsawanan, dan koleksi sejarah yang disimpan. Lestari dkk. (2025) memperdalam analisis pada Keraton Surakarta dan menemukan bahwa pelestarian budaya di sana berlangsung melalui penyelenggaraan upacara tradisional, pementasan seni klasik Jawa seperti gamelan dan wayang, serta pengelolaan museum yang menyimpan artefak sejarah dan koleksi kerajaan. Studi yang sama menekankan bahwa regenerasi abdi dalem merupakan bagian penting dari strategi pelestarian, karena tanpa regenerasi, kesinambungan budaya terputus.

Terdapat satu ketegangan yang belum terselesaikan dalam kelompok studi ini. Lestari dkk. (2025) mengingatkan bahwa pelestarian budaya tidak boleh berhenti menjadi hiburan bagi wisatawan, melainkan harus menjunjung nilai-nilai luhur budaya Jawa yang autentik. Namun studi yang sama juga menunjukkan bahwa pariwisata berkontribusi pada pemeliharaan bangunan keraton dan penyelenggaraan kegiatan budaya. Dengan kata lain, pariwisata sekaligus merupakan ancaman terhadap autentisitas dan sumber daya bagi pelestariannya. Ketegangan inilah yang harus dijawab oleh rancangan tata kelola, bukan dihindari — dan jawaban yang ditawarkan kajian ini berupa mekanisme kendali komunitas atas penetapan konten, sebagaimana diuraikan pada sub-bab 4.5.

2.2.4 Tema Keempat: Model Kampung Wisata dan Pelibatan Komunitas

Setyaningsih dkk. (2024) merumuskan model pengembangan kampung wisata melalui pelibatan komunitas menuju pariwisata kreatif berkelanjutan, dengan menekankan bahwa pengembangan pariwisata kreatif berkelanjutan bergantung pada partisipasi aktif dan kepedulian masyarakat lokal bersama pemerintah, dengan menonjolkan keunikan yang dimiliki setiap kampung wisata. Model ini penting bagi kajian ini karena menyediakan preseden metodologis untuk menaikkan pengalaman satu kampung menjadi kerangka yang dapat diterapkan pada kampung lain.

Namun terdapat batas yang jelas. Model tersebut dirancang untuk kunjungan berdurasi pendek dan tidak membahas skenario di mana pengunjung tinggal di dalam komunitas selama berminggu-minggu. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada skenario tinggal panjang — standar akomodasi, protokol interaksi harian, batas ruang privat, mekanisme penyelesaian perselisihan, dan pembagian hasil karya bersama — belum terjawab oleh literatur yang tersedia.

2.2.5 Kecenderungan Metodologis dan Titik Lemah Literatur

Dari telaah di atas dapat disimpulkan tiga kecenderungan metodologis. *Pertama*, mayoritas studi tentang *edutourism* dan CBT di Surakarta menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengecualian yang menonjol adalah Sarjiyanto dkk. (2023) yang menggunakan survei berskala besar dan Modiash serta Yuliastuti (2025) yang menggunakan skoring dan *Importance Performance Analysis*. *Kedua*, sangat sedikit studi yang menggunakan desain metode campuran, sehingga temuan kualitatif jarang divalidasi dengan pengukuran dan sebaliknya. *Ketiga*, hampir seluruh studi bersifat potret sesaat (*cross-sectional*); belum ada studi longitudinal yang menelusuri dampak program wisata terhadap pendapatan rumah tangga komunitas dalam rentang beberapa tahun.

Titik lemah yang paling berkonsekuensi bagi kebijakan adalah **kelangkaan pengukuran dampak ekonomi pada tingkat rumah tangga**. Sebagian besar studi menyimpulkan adanya "peningkatan pendapatan" tanpa menyajikan besaran, sebaran, maupun siapa yang paling diuntungkan. Akibatnya, perencana daerah tidak memiliki dasar untuk mengalibrasi target maupun untuk menilai apakah manfaat program benar-benar sampai pada lapisan pelaku usaha terkecil.

2.3 Research Gap

Berdasarkan sintesis di atas, kajian ini mengidentifikasi empat celah penelitian yang menjustifikasi rumusan masalah pada Bab I.

No.	Jenis Celah	Uraian Celah	Rumusan Masalah yang Dijustifikasi
1	Celah tingkat analisis	Literatur terbelah antara studi kasus mikro pada satu unit usaha atau satu kampung dengan kajian kebijakan makro tingkat kota. Belum ada studi yang secara sengaja menyambungkan keduanya sehingga bukti lapangan dapat menjadi dasar perencanaan lintas klaster.	Rumusan masalah 1, 2, dan 7
2	Celah konteks	Dimensi tinggal berdurasi panjang dalam bentuk residensi budaya berbasis komunitas belum pernah dikaji dalam konteks Kota Surakarta, padahal justru dimensi ini yang secara logis menjawab persoalan rata-rata lama menginap 1,45 hari.	Rumusan masalah 6
3	Celah konseptual	Kaitan antara pariwisata berbasis komunitas dengan agenda diplomasi budaya sebagaimana diamanatkan RIPK 2025–2045 belum dirumuskan; literatur diplomasi budaya sebagian besar berfokus pada hubungan antarnegara, bukan antar-komunitas.	Rumusan masalah 5 dan 6

No.	Jenis Celah	Uraian Celah	Rumusan Masalah yang Dijustifikasi
4	Celah metodologis dan pengukuran	Belum tersedia pengukuran dampak ekonomi *edutourism* pada tingkat rumah tangga komunitas, sehingga klaim manfaat ekonomi dalam literatur bersifat kualitatif dan tidak dapat dijadikan dasar kalibrasi target kebijakan.	Rumusan masalah 3, 4, dan 7

Tabel 2.2 Pemetaan Research Gap dan Justifikasi Rumusan Masalah

Sumber: analisis penyusun atas literatur terverifikasi (2026).

Keempat celah tersebut saling berkait dan tidak berdiri sendiri. Celah tingkat analisis menjelaskan mengapa temuan lapangan sulit naik menjadi kebijakan; celah konteks menjelaskan mengapa persoalan lama menginap tidak kunjung terpecahkan; celah konseptual menjelaskan mengapa modal diplomatik kota belum terkelola; dan celah pengukuran menjelaskan mengapa seluruh persoalan di atas sulit diperdebatkan secara berbasis bukti. Kajian ini menjawab tiga celah pertama secara langsung, dan menyiapkan instrumen untuk menjawab celah keempat melalui rancangan metodologi pada Bab III yang direkomendasikan dilaksanakan pada tahap lanjutan.

2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir kajian ini merupakan sintesis dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan *research gap*. Ia disusun dalam empat lapisan — Input, Proses, Output, dan Outcome — yang dihubungkan oleh mekanisme umpan balik, serta dipengaruhi faktor moderator dan mediator.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Pengembangan Edutourism Berbasis Komunitas

Sumber: analisis penyusun (2026).

2.4.1 Lapisan Input

Lapisan input mencakup empat kelompok sumber daya. **Potensi warisan budaya** meliputi warisan *tangible* berupa dua istana, bangunan bersejarah, koleksi museum, dan arsitektur permukiman Laweyan, serta warisan *intangible* berupa ritual, seni pertunjukan, keterampilan membatik dan membuat blangkon, dan filosofi Jawa. **Modal sosial komunitas** meliputi nilai-nilai budaya Jawa, jaringan sosial antarpengrajin dan seniman, serta kepercayaan komunitas terhadap kelembagaan lokal. **Kapasitas kelembagaan lokal** meliputi kemampuan forum kawasan, kelompok sadar wisata, paguyuban pengrajin, dan koperasi dalam mengelola program secara mandiri. **Dukungan kebijakan** meliputi RPJMD 2025–2029, Asta Cita Surakarta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dan RIPK 2025–2045.

2.4.2 Lapisan Proses

Lapisan proses mencakup partisipasi komunitas dalam tata kelola, yaitu keterlibatan dalam perencanaan program, penetapan protokol interaksi, dan penentuan mekanisme distribusi manfaat; integrasi kearifan lokal dalam kurikulum, yaitu pemanfaatan nilai-nilai Jawa sebagai konten pembelajaran sekaligus sistem

tata kelola; *co-creation* pengalaman wisata, yaitu pelibatan pengunjung sebagai mitra pencipta; serta penguatan kapasitas komunitas dan aktivasi jejaring digital.

2.4.3 Lapisan Output dan Outcome

Lapisan output mencakup tersedianya model *edutourism* yang terdokumentasi dan dapat direplikasi, peningkatan manfaat ekonomi komunitas, peningkatan volume dan kualitas kunjungan, serta penguatan transmisi budaya antargenerasi. Lapisan outcome mencakup peningkatan kontribusi pariwisata terhadap PDRB dan Pendapatan Asli Daerah, penguatan posisi Kota Surakarta sebagai destinasi budaya, terbentuknya ekosistem budaya yang mampu meregenerasi diri, serta kontribusi pada agenda diplomasi budaya nasional.

Satu penegasan penting perlu diberikan mengenai hubungan antarlapisan. Hubungan tersebut **tidak bersifat otomatis**. Input yang melimpah tidak dengan sendirinya menghasilkan output, dan output tidak dengan sendirinya menghasilkan outcome. Justru pada titik-titik peralihan inilah kegagalan program biasanya terjadi: potensi budaya yang besar tidak diikuti kapasitas kelembagaan, atau program yang berjalan baik tidak diikuti mekanisme distribusi manfaat sehingga menimbulkan kecemburuan dan akhirnya konflik. Karena itu, faktor moderator dan mediator diperlakukan sebagai bagian integral kerangka, bukan sebagai catatan kaki.

2.4.4 Faktor Moderator dan Mediator

Faktor **moderator** — yaitu faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel tanpa menjadi bagian dari rantai sebab-akibat — meliputi tekanan urbanisasi, fluktuasi pasar pariwisata, dinamika kebijakan fiskal dan harga bahan baku, serta perubahan generasional. Faktor **mediator** — yaitu faktor yang menjadi jembatan sebab-akibat sehingga tanpanya pengaruh tidak tersalurkan — meliputi tingkat kepercayaan antar-pemangku kepentingan, efektivitas kelembagaan lokal, dan ketersediaan infrastruktur digital. Pembedaan ini bukan sekadar kerapian konseptual: ia menentukan jenis intervensi kebijakan yang tepat. Faktor moderator umumnya berada di luar kendali pemerintah kota dan karenanya perlu diantisipasi, sedangkan faktor mediator berada dalam jangkauan intervensi dan karenanya menjadi sasaran program.

2.5 Proposisi Penelitian

Karena kajian ini menggunakan desain metode campuran dengan penekanan pada komponen kualitatif, hipotesis statistik tidak dirumuskan pada tahap ini. Sebagai gantinya diajukan tujuh **proposisi penelitian** yang diturunkan dari landasan teori dan temuan terdahulu, dan yang akan diuji melalui pembahasan pada Bab IV. Proposisi ini akan dikonversi menjadi hipotesis yang dapat diuji secara statistik pada tahap survei berskala penuh sebagaimana dirancang pada Bab III.

1. **Proposisi 1.** Kekuatan *edutourism* Kota Surakarta terletak pada keutuhan ekosistem budayanya dalam satu wilayah yang kompak, sehingga kendala

utamanya bukan ketersediaan daya tarik melainkan ketersediaan produk yang mengonversi daya tarik menjadi durasi tinggal. *(Diturunkan dari Falk & Dierking, 2000; Poria dkk., 2006; data BPS Kota Surakarta, 2025.)*

2. **Proposisi 2.** Model *edutourism* yang berkelanjutan pada konteks Surakarta bertumpu pada lima komponen yang saling bergantung, sehingga melemahnya satu komponen menurunkan kinerja keseluruhan model. *(Diturunkan dari Okazaki, 2008; Sarjiyanto dkk., 2023; Setyaningsih dkk., 2024.)*
3. **Proposisi 3.** Partisipasi komunitas dalam ekosistem *edutourism* Laweyan telah melampaui tahap keterlibatan dan mencapai tahap pemberdayaan, yang ditandai oleh mengalirnya kapasitas dari pelaku usaha mapan kepada pelaku usaha yang lebih kecil tanpa kewajiban regulatif. *(Diturunkan dari Coleman, 1988; Putnam, 1993; Mtapuri & Giampiccoli, 2019.)*
4. **Proposisi 4.** Hambatan utama pengembangan *edutourism* pada skala unit usaha bersifat strategis dan bukan teknis, sehingga dapat diatasi melalui pelatihan terarah dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada pembangunan kapasitas dari nol. *(Diturunkan dari temuan awal data primer dan Lestari dkk., 2024.)*
5. **Proposisi 5.** Nilai-nilai budaya Jawa berfungsi ganda, yaitu sebagai konten pembelajaran yang menjadi daya tarik dan sebagai instrumen tata kelola yang menahan laju komodifikasi. *(Diturunkan dari UNESCO, 2003; Smith, 2006; Lestari dkk., 2025.)*
6. **Proposisi 6.** Transisi dari model *edutourism* kunjungan singkat menuju model residensi berdurasi panjang merupakan pendalaman dari praktik yang sudah berjalan, bukan lompatan yang asing bagi komunitas, karena format *workshop* intensif yang ada secara struktural telah merupakan residensi berdurasi pendek. *(Diturunkan dari data primer dan Ritchie dkk., 2003.)*
7. **Proposisi 7.** Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan kajian ini memiliki peluang implementasi yang tinggi karena bergerak searah dengan arus kebijakan yang berlaku pada tingkat kota maupun nasional, sehingga yang diperlukan bukan perubahan struktur kebijakan melainkan formalisasi, standardisasi, dan penyesuaian regulasi teknis. *(Diturunkan dari DPRD Kota Surakarta, 2025; Presiden RI, 2024.)*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan cara kerja kajian, bukan menjelaskan metodologi sebagai ilmu. Karena itu penjelasan definisi umum sengaja ditekan seminimal mungkin, dan penekanan diberikan pada dua hal: alasan pemilihan setiap keputusan metodologis untuk kajian ini, serta pertautan yang jelas antara setiap rumusan masalah dengan teknik analisis yang akan menjawabnya.

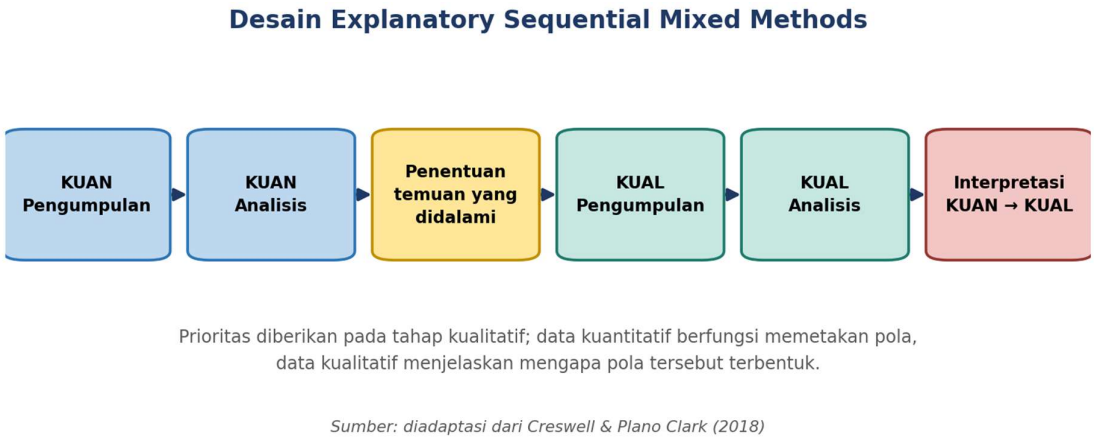
Satu penegasan diberikan di muka. Sebagaimana dinyatakan pada batasan masalah, komponen yang telah dilaksanakan dalam kajian ini adalah studi dokumentasi, telaah literatur, dan wawancara mendalam pada studi kasus utama. Rancangan survei berskala penuh yang diuraikan pada sub-bab 3.3 hingga 3.6 merupakan rancangan yang diusulkan untuk dieksekusi pada tahap lanjutan. Pemisahan ini dinyatakan terbuka agar pembaca dapat membedakan mana yang merupakan temuan dan mana yang merupakan rencana.

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan *mixed methods* atau metode campuran yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengembangan *edutourism* berbasis komunitas dan budaya lokal di Kota Surakarta. Creswell dan Plano Clark (2018) menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara mendalam melalui data kualitatif sambil mengukur pola-pola tertentu melalui data kuantitatif.

Pilihan ini bukan konvensi akademis, melainkan konsekuensi dari sifat masalah. Rumusan masalah kajian ini memuat dua jenis pertanyaan yang menuntut jenis bukti berbeda. Pertanyaan tentang tingkat partisipasi, persepsi wisatawan, dan kesediaan membayar menuntut pengukuran yang dapat digeneralisasi — dan itu hanya dapat diperoleh melalui survei. Sementara pertanyaan tentang bagaimana nilai *tepa slira* bekerja dalam pengelolaan tamu, atau syarat apa yang harus dipenuhi agar komunitas bersedia menerima tamu berdurasi panjang, tidak dapat dijawab dengan angka; ia menuntut penuturan orang yang mengalaminya. Menggunakan hanya satu pendekatan akan meninggalkan separuh rumusan masalah tanpa jawaban.

Desain yang digunakan adalah **_explanatory sequential design_** atau desain sekuensial eksplanatoris, di mana data kuantitatif dikumpulkan dan dianalisis terlebih dahulu, kemudian diikuti pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk menjelaskan dan memperdalam temuan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2018).



Gambar 3.1 Desain Explanatory Sequential Mixed Methods yang Digunakan

Sumber: diadaptasi dari Creswell dan Plano Clark (2018).

Alasan memilih desain sekuensial eksplanatoris di antara empat desain metode campuran yang tersedia perlu dinyatakan. Desain konvergen ditolak karena mengumpulkan kedua jenis data secara bersamaan sehingga temuan kuantitatif tidak dapat menuntun perumusan pertanyaan kualitatif. Desain eksploratoris sekuensial ditolak karena mengasumsikan konstruk belum dikenali sehingga instrumen harus dibangun dari nol, padahal konstruk *edutourism* dan CBT sudah cukup mapan dalam literatur. Desain *embedded* ditolak karena menempatkan salah satu pendekatan sebagai pelengkap, padahal kedua jenis pertanyaan dalam kajian ini sama pentingnya. Desain sekuensial eksplanatoris dipilih karena justru pola statistik yang tidak terduga — misalnya dukungan tinggi pada program berdampingan dengan kesediaan berpartisipasi yang rendah — yang paling memerlukan penjelasan kualitatif.

Jenis kajian ini bersifat **deskriptif, eksploratif, dan transformatif**: deskriptif dalam memetakan kondisi eksisting ekosistem *edutourism* Surakarta; eksploratif dalam mengidentifikasi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi; dan transformatif dalam menghasilkan rekomendasi model dan kebijakan yang konkret. Kajian ini juga bersifat *applied research* atau penelitian terapan yang bertujuan menghasilkan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan, bukan menguji teori untuk kepentingan pengembangan teori itu sendiri.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Kajian dilakukan di wilayah administratif Kota Surakarta yang mencakup lima kecamatan dan 54 kelurahan, dengan fokus pada lima klaster destinasi sebagaimana telah disajikan pada Tabel 1.1.

Pemilihan Kota Surakarta sebagai lokasi didasarkan pada empat pertimbangan yang bersifat substantif, bukan kemudahan akses. *Pertama*, Surakarta memiliki keutuhan ekosistem budaya Jawa yang jarang ditemukan di kota lain dalam satu

wilayah kompak: dua istana yang masih aktif menjalankan ritual, komunitas pengrajin yang masih berproduksi dengan teknik tradisional, dan agenda pertukaran budaya internasional yang berjalan rutin. *Kedua*, terdapat kesenjangan yang tajam dan terukur antara potensi tersebut dengan kinerja pariwisatanya, sehingga kota ini merupakan kasus yang secara analitis menarik. *Ketiga*, kerangka kebijakan daerah telah menyediakan mandat yang eksplisit melalui misi kedua dan ketiga RPJMD serta program kelima Asta Cita Surakarta. *Keempat*, terdapat pelaku *edutourism* perintis yang telah menjalankan program selama lebih dari dua dekade, sehingga tersedia praktik yang matang untuk dipelajari, bukan sekadar rencana.

Pemilihan Kampung Batik Laweyan sebagai lokasi studi kasus utama, dan Batik Mahkota Laweyan sebagai unit analisis, didasarkan pada teknik *purposive sampling* dengan kriteria kasus yang kaya informasi (*information-rich case*). Unit usaha ini memenuhi empat kriteria sekaligus: telah menjalankan program *edutourism* secara berkelanjutan; memiliki dua format program dengan durasi berbeda sehingga memungkinkan perbandingan internal; memiliki legalitas usaha lengkap sehingga dapat menjadi rujukan standar; serta terlibat aktif dalam kelembagaan kawasan sehingga dapat menuturkan dinamika kolektif, bukan hanya pengalaman pribadi.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kajian direncanakan berlangsung selama dua belas bulan untuk memastikan cakupan yang komprehensif dan mempertimbangkan variasi musiman dalam aktivitas pariwisata. Pembagian fase mencerminkan logika desain sekuensial: setiap fase menghasilkan pemahaman yang menjadi landasan bagi fase berikutnya.

Fase	Periode	Kegiatan Utama	Luaran
I — Persiapan	Bulan 1–2	Telaah literatur; penyusunan kerangka konseptual; penyusunan instrumen; validasi oleh panel ahli; rekrutmen dan pelatihan enumerator; uji coba instrumen pada 30 responden; revisi instrumen; pengurusan perizinan penelitian	Instrumen tervalidasi; izin penelitian
II — Pengumpulan data kuantitatif	Bulan 3–5	Survei terstruktur secara tatap muka kepada wisatawan, masyarakat lokal, dan pelaku usaha pariwisata di lima klaster, mengikuti kalender pariwisata kota agar mencakup periode ramai dan sepi	Data survei lengkap
III — Analisis data kuantitatif	Bulan 4–5	Penyuntingan dan pembersihan data; uji asumsi statistik; analisis deskriptif dan inferensial; identifikasi temuan yang memerlukan pendalaman kualitatif	Laporan analisis kuantitatif; daftar temuan yang akan didalami
IV — Pengumpulan data kualitatif	Bulan 6–8	Wawancara mendalam terhadap 30–40 informan kunci; lima sesi diskusi kelompok terarah; observasi partisipatif; studi dokumentasi — seluruhnya dipandu temuan Fase III	Transkrip verbatim; catatan lapangan; dokumentasi visual

Fase	Periode	Kegiatan Utama	Luaran
V — Analisis dan perancangan model	Bulan 9–10	Analisis tematik; analisis isi dokumen; analisis SWOT; proses hierarki analitik; triangulasi temuan; perancangan model; validasi melalui panel pakar	Draf model tervalidasi
VI — Validasi dan rekomendasi	Bulan 10–11	Pemeriksaan ulang oleh informan; diskusi antarpeneliti; presentasi temuan awal kepada pemangku kepentingan; perumusan model, strategi, dan rekomendasi kebijakan	Model dan strategi final; ringkasan kebijakan
VII — Pelaporan dan diseminasi	Bulan 11–12	Penulisan laporan akhir; seminar hasil bersama Bappeda dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; penyusunan panduan operasional; pengajuan publikasi ilmiah	Laporan final; panduan operasional; naskah publikasi

Tabel 3.1 Fase, Periode, Kegiatan, dan Luaran Penelitian

Sumber: rancangan penyusun (2026).

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

3.3.1 Populasi

Populasi kajian terdiri atas lima kelompok pemangku kepentingan yang membentuk ekosistem *edutourism* Kota Surakarta. **Kelompok pertama** adalah komunitas lokal di lima klaster destinasi: pengrajin batik di Laweyan, pengrajin blangkon dan kriya di Potrojayan, seniman dan pelaku seni pertunjukan di kawasan Keraton dan Mangkunegaran, pelaku UMKM kuliner dan kriya pendukung, serta masyarakat umum yang tinggal dan bekerja di kawasan destinasi. **Kelompok kedua** adalah wisatawan nusantara dan mancanegara yang berkunjung selama periode penelitian. **Kelompok ketiga** adalah pelaku usaha pariwisata dan pengelola destinasi. **Kelompok keempat** adalah pejabat dan staf perangkat daerah terkait. **Kelompok kelima** adalah akademisi dan praktisi, termasuk pelaku budaya internasional sebagai calon peserta program residensi.

3.3.2 Teknik dan Ukuran Sampel Kuantitatif

Ukuran sampel wisatawan ditetapkan sebanyak 400 responden. Dasar perhitungannya adalah rumus Slovin untuk populasi yang tidak diketahui secara pasti dengan tingkat kesalahan 5 persen, yang menghasilkan ukuran minimal 385 responden dan dibulatkan ke atas menjadi 400 untuk mengantisipasi kuesioner yang tidak terpakai. Ukuran sampel masyarakat lokal ditetapkan 300 responden dengan alokasi proporsional sekitar 60 responden per klaster, dan pelaku usaha pariwisata 150 responden.

Kelompok	Teknik Sampling	Ukuran Sampel	Dasar Penentuan
Wisatawan	*Systematic random sampling* dengan stratifikasi menurut jenis objek dan asal pengunjung	n = 400	Rumus Slovin, tingkat kesalahan 5 persen; alokasi proporsional per destinasi berdasarkan rata-rata kunjungan harian; periode pengambilan mencakup hari kerja dan akhir pekan
Masyarakat lokal	*Stratified random sampling* dengan strata kawasan tempat tinggal dan tingkat keterlibatan dalam pariwisata	n = 300	Alokasi proporsional pada lima klaster; rumus Slovin dengan *margin of error* 5 persen
Pelaku usaha pariwisata	*Stratified random sampling* dengan strata jenis usaha	n = 150	Berdasarkan populasi UMKM sektor *fashion*, batik, dan kerajinan di lima kecamatan
Pengelola destinasi	*Purposive sampling* dengan kriteria peran aktif dalam pengelolaan minimal satu tahun	n = 25	Lima pengelola per klaster, dipilih berdasarkan posisi strategis dan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan
Pejabat dan staf perangkat daerah	*Purposive sampling* dengan kriteria keterlibatan langsung dalam program pariwisata dan kebudayaan	n = 20	Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan, serta Bagian Kerja Sama
Total sampel kuantitatif	Gabungan *probability* dan *purposive*	**n ≈ 895**	Mencakup seluruh dimensi ekosistem *edutourism* Kota Surakarta

Tabel 3.2 Teknik Sampling, Ukuran Sampel, dan Dasar Penentuan

Sumber: rancangan penyusun (2026).

3.3.3 Informan Kualitatif, Kriteria Pemilihan, dan Saturasi Data

Pada komponen kualitatif, istilah sampel diganti dengan **informan**. Informan kunci dipilih melalui gabungan *purposive* dan *snowball sampling* dengan target 30 sampai 40 orang, mencakup tokoh budaya dan maestro seni, pengurus forum kawasan dan kelompok sadar wisata, pejabat perencana daerah, akademisi, serta pelaku usaha *edutourism*.

Empat kriteria pemilihan diterapkan: keterlibatan aktif dalam ekosistem *edutourism* sekurang-kurangnya tiga tahun; penguasaan pengetahuan mendalam tentang budaya lokal atau tata kelola pariwisata; kesediaan memberikan informasi secara terbuka; serta ketersediaan untuk dihubungi selama periode penelitian. Kriteria pertama ditetapkan agar informan mampu menuturkan perubahan dari waktu ke waktu, bukan sekadar keadaan sesaat.

Saturasi data ditetapkan tercapai apabila dua syarat terpenuhi secara bersamaan. *Syarat pertama* bersifat kuantitatif: tiga wawancara berturut-turut tidak lagi

memunculkan kode baru dalam proses pengodean. *Syarat kedua* bersifat kualitatif: setiap tema yang telah terbentuk memiliki kekayaan penjelasan yang memadai, dalam arti tersedia cukup variasi kasus untuk menjelaskan tema tersebut pada konteks yang berbeda. Penambahan syarat kedua penting karena ketiadaan kode baru saja dapat terjadi semata karena informan berasal dari lingkungan yang homogen. Untuk menghindarinya, pemilihan informan sengaja mencakup variasi maksimal pada tiga dimensi: klaster destinasi, generasi, dan posisi dalam rantai nilai.

Lima sesi diskusi kelompok terarah diselenggarakan, satu per klaster, dengan 8 sampai 12 peserta per sesi. Komposisi peserta dirancang untuk memastikan keterwakilan pengrajin, pelaku UMKM, pemuda, tokoh budaya, dan perempuan pengrajin. Perhatian khusus diberikan pada dinamika kuasa dalam diskusi — fasilitator ditugaskan memastikan suara perempuan pengrajin tidak tenggelam oleh tokoh komunitas yang cenderung lebih dominan berbicara.

3.4 Variabel dan Definisi Operasional

Variabel diturunkan langsung dari kerangka berpikir pada sub-bab 2.4. Tabel 3.3 menyajikan definisi operasional setiap variabel beserta indikator dan skala pengukurannya, sehingga setiap konstruk dapat diukur dan tidak berhenti pada tataran abstrak.

Lapisan	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Input	Potensi warisan budaya	Ketersediaan aset budaya benda dan takbenda yang layak dijadikan konten pembelajaran	Jumlah aset terdaftar; keaktifan praktik; ketersediaan pemegang pengetahuan	Rasio dan nominal
Input	Modal sosial komunitas	Kekuatan jaringan, norma berbagi, dan kepercayaan dalam komunitas destinasi	Frekuensi kegiatan kolektif; norma berbagi pekerjaan pada masa sepi; kepercayaan pada kelembagaan lokal	Likert 1–5
Input	Kapasitas kelembagaan lokal	Kemampuan organisasi komunitas menjalankan fungsi koordinasi dan administrasi program	Status badan hukum; keteraturan pertemuan; kemampuan mengelola keuangan kolektif	Likert 1–5 dan nominal
Input	Dukungan kebijakan	Persepsi pelaku terhadap keberpihakan dan kemudahan regulasi serta program pemerintah	Kemudahan perizinan; akses program pembinaan; kejelasan tarif dan ketentuan usaha	Likert 1–5
Proses	Partisipasi komunitas dalam tata kelola	Tingkat keterlibatan warga pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program	Kehadiran dalam forum; peran dalam pengambilan keputusan; keterlibatan dalam evaluasi	Likert 1–5

Lapisan	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Proses	Integrasi kearifan lokal	Sejauh mana nilai budaya Jawa dipakai sebagai konten belajar sekaligus aturan main program	Muatan filosofi dalam program; penerapan protokol berbasis nilai; pelibatan tokoh budaya	Likert 1–5
Proses	*Co-creation* pengalaman	Derajat keterlibatan pengunjung sebagai mitra pencipta, bukan penerima pasif	Ruang ekspresi bebas; karya bersama; umpan balik pengunjung yang diadopsi	Likert 1–5
Output	Kualitas program *edutourism*	Mutu pengalaman belajar yang dirasakan pengunjung	Autentisitas; relevansi materi; kepuasan; kesediaan merekomendasikan	Likert 1–5
Output	Manfaat ekonomi komunitas	Besaran dan sebaran manfaat ekonomi yang diterima pelaku di kawasan	Perubahan omzet; penyerapan tenaga kerja; jumlah pelaku yang menerima manfaat	Rasio
Output	Durasi tinggal pengunjung	Jumlah malam menginap pengunjung di Kota Surakarta	Rata-rata malam menginap per pengunjung program	Rasio
Outcome	Kontribusi pada sasaran daerah	Sumbangan program pada indikator pariwisata dalam dokumen perencanaan	Kontribusi terhadap PDRB dan PAD sektor pariwisata; jumlah pengunjung tempat bersejarah	Rasio
Outcome	Jejaring diplomasi budaya	Luas dan keberlanjutan relasi lintas bangsa yang lahir dari program	Jumlah alumni aktif; kemitraan institusional; publikasi tentang Surakarta di negara asal peserta	Rasio dan nominal

Tabel 3.3 Variabel, Definisi Operasional, Indikator, dan Skala Pengukuran

Sumber: diturunkan dari kerangka berpikir pada sub-bab 2.4.

Satu variabel memerlukan penjelasan tambahan. **Kesediaan membayar** (*willingness to pay*) diukur menggunakan pendekatan *contingent valuation* dengan format pertanyaan tawaran bertingkat (*bidding game*), yaitu responden diberi skenario program residensi yang dijelaskan secara rinci lalu ditanya kesediaannya membayar pada tingkat harga tertentu yang dinaikkan atau diturunkan bertahap. Variabel ini diperlakukan tersendiri karena menjadi dasar bagi kalibrasi seluruh proyeksi ekonomi yang pada kajian ini masih bersifat indikatif.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Lima teknik pengumpulan data digunakan secara saling melengkapi. Prinsip triangulasi sumber, metode, dan data dijaga sepanjang proses, karena dalam penelitian tentang ekosistem budaya yang kompleks, satu sumber tidak pernah cukup untuk menangkap keseluruhan realitas.

3.5.1 Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur — peneliti memiliki topik utama yang harus dijelajahi, tetapi tidak terikat pada urutan atau kata-kata baku. Fleksibilitas ini penting karena setiap informan membawa pengetahuan yang unik, dan sering kali hal paling bermakna muncul di luar pertanyaan yang direncanakan. Setiap wawancara berlangsung 60 sampai 90 menit di lokasi yang nyaman bagi informan, direkam dengan izin, ditranskrip verbatim, dan dikembalikan kepada informan untuk diperiksa sebelum digunakan.

Pedoman wawancara disusun dalam delapan topik: riwayat keterlibatan informan dalam ekosistem *edutourism*; proses nyata partisipasi komunitas dalam perencanaan dan pengelolaan program — yang benar-benar terjadi di lapangan, bukan yang tertulis dalam dokumen; peran nilai-nilai Jawa dalam membentuk cara komunitas mengelola relasi dengan tamu; pengalaman dan tantangan berinteraksi dengan tamu mancanegara; pandangan tentang konsep residensi budaya beserta kekhawatiran dan syarat yang harus dipenuhi; persepsi tentang dampak ekonomi dan budaya yang diharapkan; kebutuhan kapasitas yang masih perlu diperkuat; serta rekomendasi konkret bagi desain kebijakan.

3.5.2 Diskusi Kelompok Terarah

Diskusi kelompok terarah dipilih untuk menangkap dimensi yang tidak dapat diperoleh dari wawancara individual, yaitu bagaimana anggota komunitas menegosiasikan pandangan, merumuskan kesepakatan, dan mengungkapkan ketegangan. Setiap sesi berlangsung 90 sampai 150 menit, dipandu fasilitator terlatih dengan seorang pencatat. Penggunaan bahasa Jawa diizinkan dan didorong di samping bahasa Indonesia, mengingat banyak ekspresi nilai dan pengalaman budaya justru paling tepat diungkapkan dalam bahasa ibu. Rekaman ditranskrip verbatim dengan mempertahankan nuansa semantik asli.

3.5.3 Survei Terstruktur

Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan enumerator terlatih — bukan pengisian mandiri — untuk memastikan tingkat respons yang tinggi, meminimalkan butir yang terlewat, dan menjamin pemahaman yang konsisten, terutama bagi responden dari kalangan pengrajin yang lebih nyaman dengan komunikasi lisan. Penyebaran daring digunakan sebagai pelengkap. Kuesioner disusun dalam dua bahasa dan tiga versi yang disesuaikan dengan kelompok responden.

Bagian	Dimensi yang Diukur	Jumlah Butir	Variabel Terkait
A	Data demografi dan profil responden	8	Variabel kontrol dan deskripsi sampel

Bagian	Dimensi yang Diukur	Jumlah Butir	Variabel Terkait
B	Partisipasi komunitas dalam *edutourism*	9	Proses: partisipasi dalam tata kelola
C	Integrasi kearifan lokal Jawa	8	Proses: kearifan lokal sebagai konten dan tata kelola
D	Modal sosial komunitas	7	Input: modal sosial
E	*Co-creation* pengalaman wisata	7	Proses: *co-creation*
F	Kesiapan program berdurasi panjang	10	Input dan Proses: kapasitas kelembagaan dan kesiapan homestay
G	Kualitas program *edutourism*	8	Output: autentisitas, relevansi, kepuasan
H	Manfaat ekonomi komunitas	7	Output: pendapatan, lapangan kerja, durasi tinggal
I	Pelestarian warisan budaya dan regenerasi	7	Output: transmisi budaya antargenerasi
J	Jejaring kemitraan dan dampak diplomasi budaya	8	Outcome: jejaring dan dampak diplomatik
K	Dukungan kebijakan dan efektivitas kelembagaan	7	Input: dukungan kebijakan
Total	**11 bagian**	**86 butir**	Mencakup seluruh variabel dalam kerangka berpikir

Tabel 3.4 Struktur Kuesioner Penelitian

Sumber: rancangan penyusun (2026).

3.5.4 Observasi Partisipatif dan Studi Dokumentasi

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengikuti program *edutourism* yang berjalan di setiap klaster — bukan sekadar mengamati dari pinggir, melainkan terlibat sebagai peserta dalam *workshop* batik, tur terpandu, dan kegiatan komunitas lainnya. Keterlibatan langsung memungkinkan peneliti menangkap detail yang tidak muncul dalam kuesioner: tempo alami sebuah *workshop*, cara seorang pengrajin menjelaskan filosofi motif sambil tangannya terus bergerak, atau bagaimana komunitas merespons tamu asing yang kesulitan memahami instruksi. Lembar observasi memuat daftar periksa 24 aspek fisik, sosial, dan interaksional, dilengkapi panduan etika dokumentasi visual yang menghormati privasi dan sakralitas ruang budaya tertentu.

Studi dokumentasi mengkaji sumber primer kebijakan dan data resmi, meliputi dokumen RPJMD Kota Surakarta 2025–2029 dan dokumen Asta Cita Surakarta; publikasi dan Berita Resmi Statistik BPS Kota Surakarta tentang kunjungan, tingkat penghunian kamar, dan rata-rata lama menginap; data sektoral Portal SoloData; laporan program tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata; Peraturan

Daerah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat; serta Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang RIPK 2025–2045.

3.6 Uji Instrumen dan Keabsahan Data

3.6.1 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kuantitatif

Validitas kuesioner diuji melalui tiga lapis. **Validitas isi** diperoleh melalui penilaian panel ahli yang terdiri atas tiga akademisi dan dua praktisi pariwisata budaya, yang menilai keterwakilan dan ketepatan setiap butir dalam mengukur konstruknya. **Validitas konstruk** diuji melalui analisis faktor konfirmatori pada data uji coba untuk memverifikasi bahwa butir-butir dalam setiap bagian benar-benar mengukur satu konstruk yang sama; uji validitas butir menggunakan korelasi *product moment* Pearson dengan kriteria butir dinyatakan valid apabila nilai r hitung melampaui r tabel. **Validitas kriteria** diuji melalui korelasi skor instrumen dengan indikator eksternal yang dapat diamati.

Reliabilitas diuji melalui koefisien Cronbach Alpha dengan nilai minimum 0,70 untuk setiap bagian kuesioner, uji ulang dengan selang dua minggu pada subsampel 30 responden, serta uji keandalan antar-enumerator menggunakan koefisien korelasi intraklas. Butir yang tidak memenuhi ambang validitas dan reliabilitas direvisi atau dikeluarkan sebelum pengumpulan data utama.

3.6.2 Keabsahan Data Kualitatif

Keabsahan data kualitatif dijamin melalui lima strategi. **Pertama, triangulasi** yang mencakup triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan; triangulasi metode dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan; triangulasi peneliti dengan melibatkan lebih dari satu peneliti dalam pengodean; serta triangulasi teori dengan menggunakan beberapa perspektif teoretis dalam menafsirkan data.

Kedua, pemeriksaan ulang oleh informan. Transkrip dikirimkan kepada informan untuk diperiksa keakuratannya, dan temuan awal dipresentasikan kepada beberapa informan kunci untuk klarifikasi. Praktik ini bukan sekadar prosedur validasi, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap informan sebagai mitra intelektual yang setara — sejalan dengan nilai *tepa slira* dalam budaya Jawa itu sendiri.

Ketiga, diskusi antarpeneliti. Tafsir sementara secara berkala didiskusikan bersama rekan peneliti yang memiliki pengetahuan mendalam tentang konteks budaya lokal, untuk mengidentifikasi bias dan memperkuat ketepatan penafsiran. **Keempat, deskripsi yang kaya konteks**, sehingga pembaca dapat menilai sendiri sejauh mana temuan dapat dialihkan ke konteks serupa di kota bersejarah lain. **Kelima, jejak audit**, yaitu pendokumentasian sistematis seluruh tahapan penelitian dari desain, instrumen, data mentah, catatan lapangan, transkrip, kode, tema, hingga penafsiran, sehingga proses penelitian dapat diaudit pihak eksternal.

3.7 Teknik Analisis Data

Sub-bab ini menguraikan teknik analisis sampai ke tingkat uji spesifik, dan yang terpenting, memetakan secara eksplisit rumusan masalah mana dijawab dengan teknik apa. Pemetaan tersebut disajikan pada Tabel 3.5 dan berfungsi sebagai kontrak metodologis kajian ini.

Rumusan Masalah	Jenis Data	Teknik Analisis	Perangkat Lunak
RM 1	Sekunder (dokumen, statistik resmi) dan primer (observasi)	Analisis deskriptif; analisis isi dokumen kebijakan; pemetaan potensi lintas klaster	SPSS; NVivo
RM 2	Primer kualitatif (wawancara, observasi)	Analisis tematik enam tahap Braun dan Clarke (2006); penyusunan model induktif	NVivo atau Atlas.ti
RM 3	Primer kuantitatif dan kualitatif	Statistik deskriptif; uji beda antarkelompok responden dengan uji t dan ANOVA; analisis tematik atas dinamika partisipasi	SPSS; NVivo
RM 4	Primer kualitatif dan sekunder	Analisis tematik; analisis SWOT pada dua aras, yaitu unit usaha dan kota	NVivo
RM 5	Primer kualitatif	Analisis tematik dengan pengodean deduktif berbasis empat nilai budaya Jawa	NVivo
RM 6	Primer kuantitatif dan kualitatif	Analisis kesiapan komunitas; analisis *willingness to pay* dengan *contingent valuation*; validasi rancangan melalui panel pakar	SPSS
RM 7	Gabungan seluruh sumber	Triangulasi konvergen; proses hierarki analitik untuk memprioritaskan strategi; analisis kesenjangan kebijakan	Expert Choice atau *spreadsheet* AHP

Tabel 3.5 Pemetaan Rumusan Masalah, Jenis Data, dan Teknik Analisis

Sumber: rancangan penyusun (2026).

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif dan Inferensial

Analisis deskriptif meliputi distribusi frekuensi dan persentase untuk variabel kategorikal, ukuran tendensi sentral dan dispersi untuk variabel kontinu, serta tabulasi silang untuk mengidentifikasi pola hubungan awal. Analisis inferensial menggunakan analisis korelasi Pearson atau Spearman bergantung pada normalitas data; uji beda dengan uji t atau ANOVA untuk membandingkan persepsi antarkelompok responden; serta analisis regresi berganda untuk menganalisis pengaruh simultan. Untuk model jalur yang lebih kompleks, termasuk efek mediasi modal sosial dan efek moderasi dukungan kebijakan, digunakan pemodelan

persamaan struktural berbasis perangkat lunak AMOS atau SmartPLS. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Sebelum analisis inferensial, uji asumsi dilaksanakan secara sistematis meliputi normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, linearitas, homoskedastisitas dengan Breusch-Pagan, dan multikolinearitas dengan nilai VIF.

3.7.2 Analisis Tematik dan Analisis Isi

Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik induktif-deduktif yang mengikuti enam tahap Braun dan Clarke (2006): familiarisasi dengan data melalui pembacaan berulang seluruh transkrip; pengodean awal untuk menandai unit makna yang relevan; pencarian tema dengan mengelompokkan kode berdasarkan pola yang serupa; peninjauan dan penyempurnaan tema untuk memastikan konsistensi internal dan pembedaan antartema; pendefinisian dan penamaan tema; serta penulisan laporan yang menyajikan tema beserta kutipan ilustratif.

Analisis isi digunakan untuk dokumen kebijakan dengan pendekatan sistematis: identifikasi unit analisis berupa kalimat atau paragraf kebijakan yang relevan, pengembangan sistem kategori berdasarkan variabel dalam kerangka berpikir, pengodean secara independen oleh dua analis untuk memastikan keandalan antar-penilai dengan sasaran nilai Kappa Cohen sekurang-kurangnya 0,70, dan penafsiran temuan dalam konteks konsistensi antara dokumen perencanaan daerah, RIPK, dan kondisi empiris komunitas.

3.7.3 Analisis SWOT, Proses Hierarki Analitik, dan Triangulasi

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dilakukan pada dua aras: tingkat unit usaha melalui studi kasus dan tingkat kota melalui ekosistem secara keseluruhan. Matriks SWOT kemudian digunakan untuk merumuskan empat kelompok strategi. Proses hierarki analitik (Saaty, 1980) digunakan untuk memprioritaskan strategi berdasarkan penilaian ahli dan pemangku kepentingan, dengan hierarki yang mencakup tujuan utama, kriteria berupa dimensi ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, dan kelembagaan, serta alternatif strategi. Penilaian menggunakan skala Saaty 1 sampai 9 dengan perhitungan bobot prioritas dan rasio konsistensi.

Integrasi dilakukan melalui **triangulasi konvergen**: temuan dari survei, wawancara, diskusi kelompok, observasi, dan analisis dokumen dibandingkan secara sistematis. Di mana semua sumber menunjukkan arah yang konsisten, kepercayaan terhadap temuan meningkat. Di mana terdapat pertentangan — misalnya angka statistik menunjukkan dukungan tinggi terhadap suatu program sementara diskusi kelompok mengungkapkan kekhawatiran mendalam — pertentangan itu justru diperlakukan sebagai temuan yang paling berharga dan wajib didalami, bukan sebagai kesalahan pengukuran yang harus dirapikan.

3.8 Etika Penelitian

Kajian ini menjunjung prinsip etika penelitian sosial. Seluruh informan memperoleh penjelasan tentang tujuan penelitian dan memberikan persetujuan atas dasar informasi sebelum wawancara atau diskusi dimulai. Perekaman audio dan visual hanya dilakukan atas izin eksplisit. Identitas informan yang meminta anonimitas dijaga kerahasiaannya. Dokumentasi di ruang-ruang sakral dalam kawasan Keraton dan Pura Mangkunegaran dilakukan sesuai protokol yang ditetapkan pengelola.

Tiga ketentuan etika tambahan diberlakukan mengingat kajian ini menyentuh warisan budaya komunitas. *Pertama*, **kepemilikan pengetahuan budaya tetap berada pada komunitas**; pengetahuan yang bersifat tertutup atau hanya boleh diwariskan melalui jalur tertentu tidak didokumentasikan meskipun informan bersedia menyampaikannya, kecuali dengan persetujuan tokoh budaya yang berwenang. *Kedua*, **hasil penelitian dikembalikan kepada komunitas** melalui forum diseminasi di kawasan, bukan hanya melalui seminar akademik, sehingga komunitas yang menjadi subjek penelitian juga menjadi penerima manfaat langsung dari pengetahuan yang dihasilkan. *Ketiga*, **penggunaan kutipan wawancara** dalam publikasi memerlukan persetujuan ulang apabila kutipan tersebut menyangkut penilaian terhadap pihak lain, guna mencegah terganggunya hubungan sosial dalam komunitas setelah penelitian berakhir.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas tujuh sub-bab yang masing-masing menjawab satu tujuan penelitian secara berurutan, sehingga hubungan antara apa yang hendak dicapai dan apa yang ditemukan dapat ditelusuri langsung. Analisis berlandaskan data primer hasil wawancara mendalam dengan pengelola Batik Mahkota Laweyan sebagai pelaku *edutourism* perintis di kawasan Laweyan, didukung data sekunder dari dokumen kebijakan daerah, data statistik resmi, dan literatur terverifikasi sebagaimana disintesiskan pada Bab II.

Sebagaimana ditegaskan pada batasan masalah, setiap pernyataan yang bersumber dari proyeksi atau estimasi ditandai secara eksplisit dan dibedakan dari pernyataan yang bersumber dari data. Pembedaan ini dipertahankan secara konsisten sepanjang bab agar pembaca — khususnya perencana daerah yang akan menindaklanjuti kajian ini — tidak memperlakukan angka proyeksi sebagai hasil pengukuran.

4.1 Potensi dan Kondisi Eksisting Edutourism Kota Surakarta

Sub-bab ini menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu memetakan potensi dan kondisi eksisting pengembangan *edutourism* berbasis komunitas di Kota Surakarta ditinjau dari warisan budaya, kapasitas komunitas, infrastruktur pendukung, dan tata kelola destinasi.

4.1.1 Ekosistem Warisan Budaya sebagai Fondasi

Keunggulan komparatif Surakarta terletak pada kedalaman dan keutuhan ekosistem budaya Jawanya, yang tidak ditemukan di tempat lain dalam satu area yang begitu kompak. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan institusi budaya hidup yang masih menjalankan ritual, mempertahankan seni tari dan gamelan tradisional, serta menjaga koleksi benda pusaka. Demikian pula Pura Mangkunegaran, yang telah membangun jejaring budaya internasional melalui berbagai program pertukaran.

Temuan Puspitasari dkk. (2025) memperkuat gambaran ini dengan satu nuansa yang penting bagi perancangan produk wisata: kedua keraton bersifat **komplementer, bukan substitutif**. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal asal-usul, gelar kebangsawanan, dan koleksi sejarah yang disimpan. Implikasi praktisnya langsung: rute kunjungan yang menempatkan keduanya sebagai pilihan alternatif — sebagaimana lazim dalam paket wisata yang beredar — sesungguhnya membuang separuh nilai edukatif kawasan. Rute yang tepat justru menempatkan keduanya dalam satu alur naratif yang menjelaskan mengapa terdapat dua istana dalam satu kota, sebuah pertanyaan yang secara historis membuka seluruh kisah Perjanjian Giyanti dan dinamika politik Jawa abad ke-18.

Pada tingkat kawasan permukiman, Kampung Batik Laweyan menyediakan sesuatu yang tidak dimiliki institusi keraton, yaitu **kehidupan produksi yang masih**

berlangsung setiap hari. Sarjiyanto dkk. (2023), berdasarkan survei terhadap 511 responden yang terdiri atas 254 unit usaha dan 257 anggota masyarakat, menunjukkan bahwa keberlangsungan industri batik di kawasan ini tidak terpisahkan dari kehidupan komunal secara sosial, ekonomi, politik, maupun kultural. Inilah yang membuat Laweyan berfungsi sebagai laboratorium lapangan bagi pengunjung dari bidang desain tekstil, seni rupa, atau studi budaya material: proses yang dipelajari bukan rekonstruksi untuk wisatawan, melainkan pekerjaan yang memang sedang berjalan.

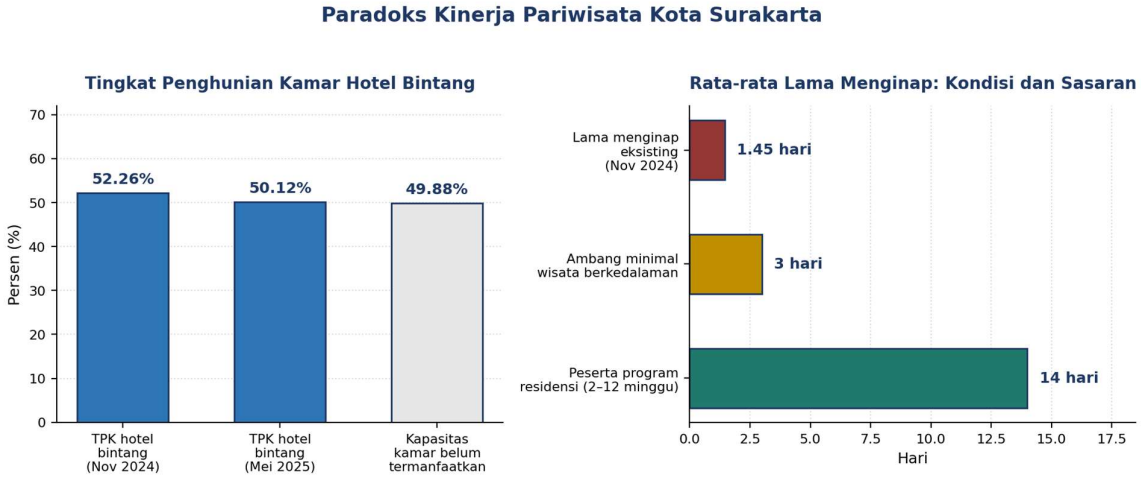
Kawasan ini memiliki nilai sejarah yang mendalam, termasuk tradisi *butulan* — pintu penghubung antara satu rumah dengan rumah lain — yang menggambarkan solidaritas komunitas pengusaha batik pada masa lampau.

> *"Di tiap rumah itu ada butulannya, butulannya seperti pintu yang menghubungi satu rumah ke rumah yang lain. Kita juga ada pangkatnya, itu yang ingin kita modernisasi, kita di edisi yang lebih fleksibel, lebih modern sehingga tidak cuma untuk anak muda, anak-anak muda juga lebih elok."*

Kutipan ini mengandung dua informasi sekaligus. Pertama, *butulan* adalah bukti arsitektural atas modal sosial yang dibahas pada sub-bab 2.1.3 — jaringan kepercayaan antarkeluarga saudagar batik yang begitu kuat sampai diwujudkan dalam bentuk bangunan. Kedua, dan ini yang sering luput, informan tidak memperlakukan warisan itu sebagai benda yang harus dibekukan; ia justru berbicara tentang memodernisasi penyajiannya agar menarik bagi generasi muda. Sikap semacam ini merupakan prasyarat yang sering tidak tersedia di destinasi warisan lain, dan menjadi salah satu alasan mengapa kawasan ini layak menjadi model.

4.1.2 Paradoks Data: Potensi Besar, Kinerja Belum Optimal

Data pariwisata Surakarta menyajikan paradoks yang mencolok. Di satu sisi, kota ini memiliki warisan budaya yang secara objektif tidak kalah dari kota destinasi wisata budaya utama di Indonesia. Di sisi lain, kinerja pariwisatanya belum mencerminkan keunggulan tersebut. Rata-rata lama menginap wisatawan pada hotel bintang tercatat 1,45 hari, sementara Tingkat Penghunian Kamar berada pada 52,26 persen pada November 2024 dan 50,12 persen pada Mei 2025 (BPS Kota Surakarta, 2025).



Sumber: BPS Kota Surakarta (2025); angka 14 hari merupakan sasaran indikatif model, bukan capaian.

Gambar 4.1 Paradoks Kinerja Pariwisata Kota Surakarta

Sumber: diolah dari BPS Kota Surakarta (2025). Angka 14 hari merupakan sasaran indikatif model, bukan capaian.

Pembacaan yang tepat atas paradoks ini menentukan seluruh arah rekomendasi kajian. Terdapat dua tafsir yang mungkin. **Tafsir pertama** menyatakan bahwa daya tarik Surakarta kurang kuat sehingga solusinya adalah menambah atraksi dan memperbesar anggaran promosi. **Tafsir kedua** menyatakan bahwa daya tariknya memadai tetapi belum tersedia produk yang mengonversi daya tarik itu menjadi alasan untuk tinggal lebih lama, sehingga solusinya adalah merancang produk berkedalaman.

Kajian ini memilih tafsir kedua dengan tiga alasan yang dapat diperiksa. *Pertama*, apabila daya tarik memang kurang, seharusnya kunjungan ke situs budaya juga rendah; kenyataannya arus kunjungan ke museum dan situs bersejarah kota tetap berlangsung. *Kedua*, permintaan dari segmen pendidikan dan penelitian datang secara organik tanpa upaya pemasaran khusus, sebagaimana ditunjukkan data primer pada sub-bab 4.2 — sebuah indikasi bahwa nilai edukatif kawasan sudah dikenali pasar. *Ketiga*, indikator yang bermasalah bukan jumlah pengunjung melainkan durasi tinggal; kedua hal ini menunjuk pada persoalan yang berbeda, dan mencampuradukkannya akan menghasilkan kebijakan yang salah sasaran. Menambah promosi terhadap produk yang hanya menyediakan pengalaman setengah hari akan menaikkan jumlah kunjungan tanpa menaikkan lama menginap, dan karenanya tidak akan menggerakkan indikator yang paling menentukan kontribusi ekonomi.

4.1.3 Kapasitas Komunitas dan Basis Ekonomi Kreatif

Kota Surakarta memiliki ekosistem UMKM yang beragam dan tersebar di lima kecamatan. Berdasarkan data Informasi UMKM Kota Surakarta Tahun 2025, total UMKM mencapai 18.143 unit usaha yang terdiri atas sektor kuliner, *fashion* dan batik, kerajinan tangan, jasa, dan perdagangan.

No.	Kecamatan	*Fashion* dan Batik (Mikro)	*Fashion* dan Batik (Kecil)	Kerajinan (Mikro)	Total UMKM
1	Banjarsari	102	2	124	5.199
2	Jebres	104	2	160	4.881
3	Laweyan	109	1	77	2.619
4	Pasar Kliwon	139	1	95	3.954
5	Serengan	68	1	93	1.481
	Jumlah	**522**	**7**	**549**	**18.143**

Tabel 4.1 Data UMKM Fashion, Batik, dan Kerajinan Menurut Kecamatan Tahun 2025

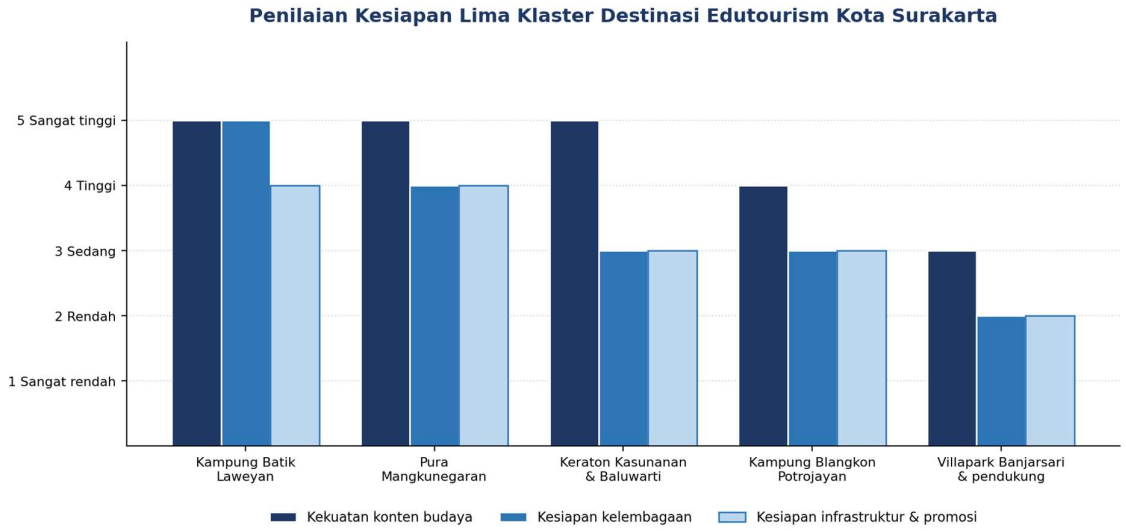
Sumber: Informasi UMKM Kota Surakarta (2025). Angka pada tabel ini perlu dimutakhirkan melalui basis data resmi Dinas Koperasi dan UMKM sebelum digunakan sebagai dasar penetapan sasaran program.

Pembacaan tabel ini menghasilkan dua temuan yang berimplikasi pada strategi. *Temuan pertama*, Kecamatan Laweyan bukan pemilik jumlah unit usaha *fashion* dan batik terbanyak; posisi itu dipegang Pasar Kliwon dengan 139 unit mikro. Keunggulan Laweyan karenanya tidak terletak pada volume, melainkan pada kepadatan sejarah, keberadaan kelembagaan kawasan, dan ekosistem wisata yang telah terbentuk. Ini penting dinyatakan agar kebijakan tidak keliru menganggap Laweyan sebagai pusat produksi terbesar, melainkan sebagai **pusat narasi dan tata kelola** yang paling matang.

Temuan kedua, Kecamatan Serengan memiliki 93 unit usaha kerajinan mikro meskipun total UMKM-nya paling kecil, yaitu 1.481 unit. Artinya, proporsi kerajinan terhadap keseluruhan usaha di Serengan jauh lebih tinggi dibanding kecamatan lain. Konsentrasi ini menegaskan posisi Serengan — lokasi Kampung Blangkon Potrojayan — sebagai kandidat terkuat untuk replikasi model berbasis kriya, sebuah kesimpulan yang sejalan dengan temuan Modiash dan Yuliastuti (2025) tentang potensi kawasan tersebut.

4.1.4 Kesiapan Lintas Klaster

Berdasarkan telaah dokumen dan literatur terverifikasi, kelima klaster destinasi menunjukkan profil kesiapan yang tidak seragam. Penilaian pada Gambar 4.2 disusun atas tiga dimensi: kekuatan konten budaya, kesiapan kelembagaan, dan kesiapan infrastruktur serta promosi.



Gambar 4.2 Penilaian Kesiapan Lima Klaster Destinasi Edutourism

Sumber: penilaian kualitatif penyusun berdasarkan telaah dokumen dan literatur; memerlukan validasi lapangan penuh pada tahap lanjutan.

Yang paling menarik dari gambar tersebut bukan peringkat antarklaster, melainkan **pola ketimpangan di dalam setiap klaster**. Seluruh klaster memiliki kekuatan konten budaya pada tingkat tinggi hingga sangat tinggi, tetapi tidak satu pun mencapai tingkat setara pada dimensi infrastruktur dan promosi. Dengan kata lain, kendala Kota Surakarta bersifat sistemik dan seragam: bukan kekurangan bahan, melainkan kekurangan kemasan dan saluran. Temuan ini konsisten dengan Lestari dkk. (2025) yang mengidentifikasi keterbatasan sumber daya finansial dan minimnya promosi digital sebagai tantangan pelestarian budaya melalui pariwisata di Keraton Surakarta, serta dengan Modiash dan Yuliastuti (2025) yang menempatkan jenis media promosi dan ketersediaan pekerja kompeten sebagai dua dari empat atribut prioritas pengembangan di Potrojayan.

Klaster	Konten Unggulan	Tingkat Kesiapan	Prioritas Intervensi
Kampung Batik Laweyan	Batik tulis dan cap, arsitektur saudagar, filosofi motif, tradisi *butulan*	**Tinggi** — kelembagaan kawasan aktif, program *workshop* telah berjalan	Standardisasi paket; digitalisasi promosi; penguatan legalitas UMKM mikro; perbaikan infrastruktur lingkungan
Pura Mangkunegaran	*Beksan*, seni pertunjukan, museum, penyelenggaraan SIPA	**Tinggi** — jejaring internasional telah terbangun	Formalisasi program edukasi berbayar; integrasi dengan agenda SIPA sebagai pintu masuk peserta residensi
Keraton Kasunanan dan Baluwarti	Tari klasik, gamelan, sastra Jawa Kuno, ritual, permukiman tradisional	**Sedang** — potensi besar dengan kendala	Pengembangan produk edukasi; promosi digital; kemitraan pendanaan;

Klaster	Konten Unggulan	Tingkat Kesiapan	Prioritas Intervensi
		finansial dan promosi digital	penyiapan homestay kawasan Baluwarti
Kampung Blangkon Potrojayan	Kriya blangkon, kriya kulit dan logam	**Sedang** — skor keberlanjutan 2,21 pada kategori cukup berkelanjutan	Perancangan ruang pamer dan bengkel kerja dengan spesifikasi edukatif; pelatihan pemandu; penetapan lahan penjemuran komunal
Villapark Banjarsari dan pendukung	Arsitektur kolonial-Jawa, kuliner dan jamu, pasar tradisional	**Awal** — belum terkelola sebagai produk edukasi	Pemetaan potensi; pengembangan rute tematik terpadu yang menautkannya dengan klaster utama

Tabel 4.2 Sintesis Potensi, Kesiapan, dan Prioritas Intervensi Lintas Klaster

Sumber: analisis penyusun berdasarkan Modiash dan Yuliastuti (2025), Lestari dkk. (2025), Puspitasari dkk. (2025), serta telaah dokumen kebijakan.

Implikasi kebijakan dari tabel di atas bersifat langsung: **urutan intervensi tidak boleh diseragamkan**. Klaster dengan kesiapan tinggi memerlukan formalisasi dan standardisasi, sedangkan klaster dengan kesiapan awal memerlukan pemetaan dan penyiapan dasar. Menerapkan program yang sama pada seluruh klaster secara serentak — pola yang lazim dalam penganggaran daerah — berisiko menghasilkan penyerapan anggaran yang merata tetapi dampak yang tidak merata.

4.2 Model Edutourism Berbasis Komunitas: Praktik Lapangan dan Rumusan MEBKL

Sub-bab ini menjawab tujuan penelitian kedua, yaitu merumuskan model pengembangan *edutourism* berbasis komunitas yang sesuai dengan karakteristik budaya lokal dan kebijakan pembangunan Kota Surakarta.

4.2.1 Profil Pelaku Perintis dan Perjalanan Transformasinya

Batik Mahkota Laweyan merupakan salah satu pelaku usaha batik yang telah memulai dan menerapkan model *edutourism* di Kampung Batik Laweyan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, usaha ini memiliki sejarah panjang sejak dekade 1950-an sebagai penjual batik konvensional. Perjalanan bisnis ini mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan dinamika industri batik nasional.

> *"Dari itu ya, jalan sebagaimana mestinya, jualan batik, kita punya kios di pasar Klewer. Itu juga kami menjual batik tulis. Itu kita punya stand di sana, sampai kisarannya waktu tiga tahun, tahun 90 itu sempat kami tutup, karena di tahun-tahun itu produk batik tulis semakin banyak."*

Penutupan usaha pada era 1990-an ini konsisten dengan temuan Widodo dan Putra (2024) tentang kemunduran industri batik Laweyan pada akhir abad ke-20 —

sebuah periode yang justru mendorong adaptasi masyarakat melalui diversifikasi usaha dan inisiatif pariwisata.

Puncak perubahan terjadi pada tahun 2004, ketika Batik Mahkota kembali beroperasi dengan konsep yang berbeda. Permulaan ini tidak sekadar memulihkan usaha batik konvensional, melainkan melakukan penataan ulang fundamental dengan menggabungkan dimensi edukasi ke dalam model bisnis.

> *"Kita menginisiasi kembali batik mahkota dengan konsep itu tadi, konsep yang berbeda dari sebelumnya, jenis itu memang tidak konvensional lagi, tapi kita membuat motif yang baru."*

Pendirian kembali Batik Mahkota pada tahun 2004 bersamaan dengan pembentukan Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan yang mendapat legalitas formal. Kebersamaan momen ini bukan kebetulan semata, melainkan mencerminkan kesadaran kolaboratif komunitas batik Laweyan bahwa revitalisasi kawasan memerlukan pendekatan baru yang menyatukan aspek produksi, pemasaran, dan wisata.

Bacaan teoretis atas peristiwa 2004 ini layak diberikan. Dari perspektif modal sosial (Coleman, 1988; Putnam, 1993), kebangkitan yang terjadi secara serempak pada tataran unit usaha dan tataran kelembagaan kawasan menunjukkan bahwa pemulihan tidak berlangsung melalui persaingan antarpelaku, melainkan melalui pembentukan norma kolektif baru. Inilah yang menjelaskan mengapa strategi kebangkitan Laweyan sulit ditiru semata dengan menyalin program: yang menentukan bukan jenis programnya, melainkan tersedianya modal sosial yang memungkinkan program itu disepakati bersama.

4.2.2 Skala Kunjungan dan Temuan tentang Permintaan Laten

Dari sisi kapasitas pelayanan, Batik Mahkota Laweyan melayani kunjungan dengan sistem yang fleksibel, mengikuti jadwal dan minat pengunjung. Volume kunjungan bervariasi dan tidak seragam setiap bulannya.

> *"Ya nggak mesti ya. Jadi kami ingat schedule-nya itu memang mengikuti atau melihat peminat dari konsumen ketika mereka menginginkan hari di lain jam tersebut kita juga melayani. Dan untuk kuotanya pengunjung-pengunjung Mahkota itu ya estimasi perbulannya sekitar 10-50an."*

Estimasi kunjungan 10 hingga 50 pengunjung per bulan menandakan bahwa *edutourism* Batik Mahkota masih berada pada fase pengembangan. Angka ini belum mencerminkan kapasitas maksimal yang dapat dilayani, melainkan menggambarkan kondisi permintaan yang perlu didorong melalui strategi promosi dan pengembangan program yang lebih terstruktur.

Dari sisi profil pengunjung, Batik Mahkota menerima berbagai kategori tamu, termasuk kunjungan dari lembaga pendidikan, peneliti, dan wisatawan mancanegara.

> *"Ketika kita sudah menjalani batik mahkota di Laweyan itu sudah ada banyak teman-teman di mahkota untuk melakukan penelitian, ada juga dari sekolah, dari sekolah ke sini untuk memberikan siswanya magang di sini."*

Temuan ini merupakan salah satu yang paling bernilai secara kebijakan dalam keseluruhan kajian, dan layak dinyatakan setegas mungkin: **segmen pendidikan dan penelitian datang dengan sendirinya, tanpa upaya pemasaran khusus**. Dalam bahasa ekonomi pariwisata, ini adalah permintaan laten yang belum dikelola. Konsekuensinya berlipat. Pertama, biaya akuisisi pelanggan untuk segmen ini mendekati nol, sehingga secara finansial ia merupakan segmen paling efisien untuk digarap lebih dahulu. Kedua, segmen ini bersifat institusional sehingga dapat diikat melalui perjanjian kerja sama dan dijadwalkan, yang berarti ia dapat mengubah pola kunjungan dari sporadis menjadi terprediksi. Ketiga, kunjungan sekolah dapat diselaraskan dengan kurikulum sehingga pembiayaannya bersumber dari anggaran satuan pendidikan secara rutin, bukan dari pengeluaran diskresioner keluarga yang mudah tergerus keadaan ekonomi.

4.2.3 Tiga Komponen Program yang Telah Berjalan

Model *edutourism* yang dikembangkan Batik Mahkota Laweyan terdiri atas tiga komponen utama yang saling mendukung.

Komponen pertama: _workshop_ batik, yang menjadi daya tarik utama program dan tersedia dalam dua format. Format *short cut* merupakan *workshop* singkat yang dapat diselesaikan dalam satu hari, dirancang bagi pengunjung dengan waktu terbatas. Format intensif berlangsung lima hari hingga satu minggu, memberikan pemahaman mendalam tentang teknik membatik dari tahap awal hingga produk jadi.

> *"Baik workshop short cut maupun yang intensif. Intensif itu durasinya itu lebih lama. Jadi nggak cuma sehari, bisa lima sampai satu minggu."*

Keberadaan format intensif merupakan temuan yang secara konseptual paling menentukan dalam kajian ini. Program berdurasi lima hari hingga satu minggu **secara struktural sudah merupakan program residensi berdurasi pendek**: ia menuntut peserta hadir berturut-turut, membangun relasi dengan instruktur yang sama, dan menyelesaikan satu karya utuh dari awal hingga akhir. Dengan demikian, transisi menuju model residensi bukan lompatan yang asing bagi pelaku *edutourism* Laweyan, melainkan pendalaman dari apa yang sudah mereka jalankan. Temuan ini menjadi dasar empiris bagi Proposisi 6 dan bagi rancangan model pada sub-bab 4.6.

Komponen kedua: edukasi sejarah dan filosofi batik. Program tidak sekadar mengajarkan teknik, melainkan memberikan pemahaman menyeluruh tentang batik sebagai warisan budaya, mencakup narasi sejarah, proses produksi dari bahan baku hingga produk jadi, dan makna filosofis di balik motif tradisional.

> *"Jadi mulai dari awal dulu lalu sejarahnya batik, sejarahnya dari awal kemudian menengah, itu kita sampe ngambil produk batiknya seperti apa, prosesnya kayak gimana. Sampe pada akhirnya nanti kita berikan kebebasan pada konsumen kalau ingin membuat versi batik mereka."*

Pendekatan ini sejalan dengan penekanan Poria dkk. (2006) bahwa *edutourism* di situs warisan budaya bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga tentang membangun koneksi emosional dan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai budaya yang dilestarikan.

Komponen ketiga: ruang eksplorasi kreatif. Salah satu inovasi penting adalah pemberian kebebasan kepada pengunjung untuk mengekspresikan desain mereka sendiri dalam medium batik.

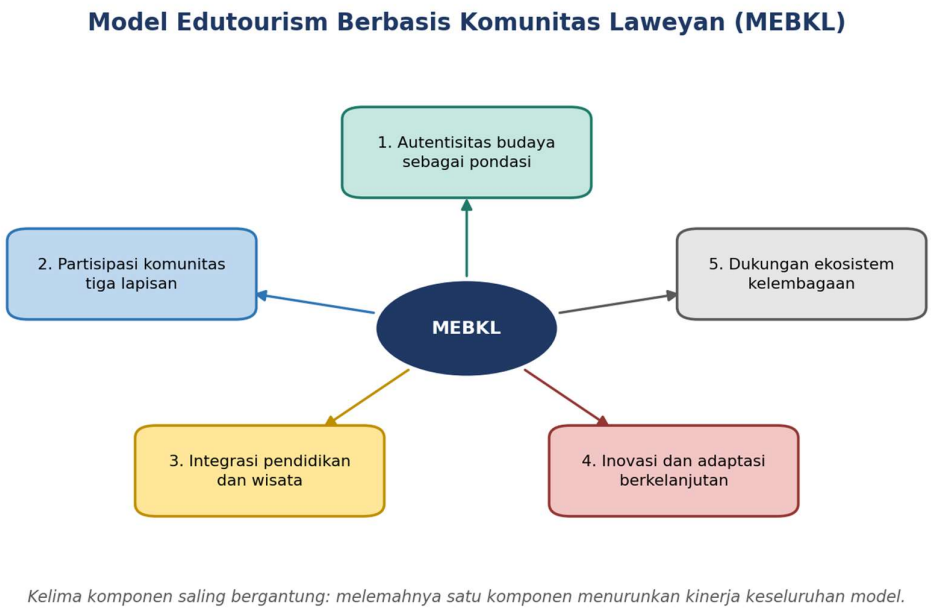
> *"Sekarang bebas, jadi mau mengespresikan desainnya yang nanti model yang unik, tau model doodle gak? Itu bisa juga berbeda, grafiti mungkin yang anak-anak muda itu bisa, jadi gak arahnya ke konservatif."*

Komponen ketiga ini merupakan wujud paling konkret dari teori *co-creation* (Prahalad & Ramaswamy, 2004) di lapangan. Nilai tidak diciptakan sepihak oleh pengrajin lalu dikonsumsi pengunjung; ia diciptakan bersama melalui proses di mana pengunjung membawa perspektif desain mereka dan pengrajin membawa penguasaan teknik dan filosofi.

Perlu diantisipasi satu keberatan yang lazim diajukan terhadap praktik ini, yaitu bahwa membuka medium batik bagi motif grafiti dan *doodle* mengancam autentisitas. Keberatan tersebut mengandaikan autentisitas terletak pada motif, padahal dalam kerangka *living heritage* UNESCO (2003), autentisitas terletak pada keberlangsungan praktik dan transmisinya antargenerasi. Selama teknik canting, pemahaman malam, dan proses pewarnaan diajarkan secara utuh oleh pemegang pengetahuan yang sah, kebebasan pada tataran motif justru memperluas basis orang yang menguasai tekniknya. Yang perlu dijaga bukan kebebasan motifnya, melainkan **kejelasan pembedaan** antara karya eksploratif peserta dengan motif tradisional bermakna sakral — sebuah pembedaan yang harus ditetapkan komunitas dan dinyatakan dalam protokol program.

4.2.4 Rumusan Model Edutourism Berbasis Komunitas Laweyan (MEBKL)

Berdasarkan analisis di atas dapat dirumuskan model konseptual yang berpotensi direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut, yang selanjutnya disebut **Model _Edutourism_ Berbasis Komunitas Laweyan (MEBKL)**, dengan lima komponen inti yang saling berinteraksi.



Gambar 4.3 Model Edutourism Berbasis Komunitas Laweyan (MEBKL)

Sumber: rumusan penyusun berdasarkan data primer dan literatur terverifikasi (2026).

Komponen pertama: autentisitas budaya sebagai pondasi. Keberhasilan *edutourism* bergantung pada kemampuan menyajikan pengalaman budaya yang asli dan tidak menyimpang demi kepentingan bisnis semata. Di Laweyan, autentisitas ini dibangun di atas tradisi batik yang telah berlangsung beberapa generasi dan terus dipraktikkan komunitas.

Komponen kedua: partisipasi komunitas yang aktif. Komponen ini memastikan manfaat ekonomi tersebar luas kepada komunitas, bukan hanya kepada pelaku usaha tertentu, melalui rekrutmen tenaga kerja lokal, keterlibatan dalam forum kawasan, dan pembinaan UMKM yang lebih kecil.

Komponen ketiga: integrasi pendidikan dan wisata yang terstruktur. Komponen inilah yang membedakan *edutourism* dari wisata biasa, mencakup sejarah, filosofi, proses produksi, dan ekspresi kreatif dalam satu alur belajar yang utuh.

Komponen keempat: inovasi dan adaptasi berkelanjutan. Kemampuan mewadahi ekspresi kreatif modern di atas fondasi tradisi batik merupakan contoh inovasi adaptif yang berhasil menghubungkan generasi.

Komponen kelima: dukungan ekosistem kelembagaan dan kebijakan, mencakup peran forum kawasan sebagai wadah kolaborasi, dukungan pemerintah melalui program fasilitasi dan pameran, serta kerangka regulasi yang mendukung.

Sifat hubungan antarkomponen perlu ditegaskan karena menentukan cara model ini dibaca. Kelima komponen bersifat **saling bergantung, bukan bertingkat**. Model ini tidak dapat dijalankan bertahap dengan mengerjakan komponen satu per satu, karena melemahnya satu komponen menurunkan kinerja keseluruhan. Autentisitas

tanpa partisipasi menghasilkan pertunjukan yang manfaatnya terkonsentrasi; partisipasi tanpa struktur pendidikan menghasilkan kunjungan yang ramah tetapi tidak edukatif; struktur pendidikan tanpa inovasi menghasilkan program yang benar tetapi tidak menarik bagi generasi muda; dan seluruhnya akan rapuh tanpa dukungan kelembagaan. Inilah rumusan Proposisi 2 dalam bentuk operasionalnya, dan inilah pula peringatan bagi replikasi: menyalin satu atau dua komponen saja tidak akan menghasilkan model yang bekerja.

4.3 Partisipasi Komunitas dan Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan

Sub-bab ini menjawab tujuan penelitian ketiga, yaitu menganalisis bentuk partisipasi dan kapasitas komunitas lokal serta memetakan peran, kontribusi khas, dan kebutuhan penguatan setiap pemangku kepentingan.

4.3.1 Model Keterlibatan Komunitas: Tiga Lapisan

Aspek keterlibatan komunitas dalam model Batik Mahkota mencerminkan prinsip *Community-Based Tourism* melalui tiga lapisan yang saling berinteraksi.

Lapisan pertama: rekrutmen tenaga kerja lokal. Tenaga kerja produksi direkrut dari warga sekitar kawasan Laweyan dan wilayah sekitarnya. Model rekrutmen lokal ini memastikan manfaat ekonomi mengalir langsung kepada masyarakat setempat sekaligus menjaga keaslian pengalaman budaya yang ditawarkan.

> *"Kami mengambil, ada yang dari asli Laweyan, ada juga kita merekomendasikan dari warga kota, seluruh Laweyan, ya ke Sukoharjo sama Sragen, terus yang selebihnya, ya yang punya rumah ini."*

Lapisan kedua: keterlibatan dalam forum kawasan. Batik Mahkota terlibat aktif dalam Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan yang menjadi platform koordinasi kolaboratif seluruh pelaku batik, mencakup partisipasi dalam pameran bersama, program sosialisasi dan pelatihan, serta kegiatan promosi kolektif. Lapisan ini merepresentasikan dimensi kelembagaan CBT yang diidentifikasi Lestari dkk. (2024).

Lapisan ketiga: pemberdayaan UMKM kecil di sekitar kawasan. Batik Mahkota secara aktif membantu pelaku usaha batik skala kecil yang belum memiliki standar produksi dan legalitas memadai.

> *"Itu yang produsen-produsen kecil yang kalau kita lihat masih standarnya belum begitu baik, mulai dari segi legalitasnya, segi produknya yang perlu kita ambil kita bantu, informasinya."*

Lapisan	Aktor	Bentuk Keterlibatan	Manfaat yang Mengalir	Dimensi CBT
Lapisan 1 — Inti	Tenaga kerja produksi dari	Rekrutmen lokal; pelaksana produksi dan instruktur	Upah langsung; transfer keterampilan	Ekonomi

Lapisan	Aktor	Bentuk Keterlibatan	Manfaat yang Mengalir	Dimensi CBT
	Laweyan dan sekitarnya			
Lapisan 2 — Kolektif	Forum kawasan dan sesama pelaku batik Laweyan	Pameran bersama; sosialisasi; pelatihan; promosi kolaboratif	Penguatan citra kawasan; akses pasar bersama; berbagi sumber daya	Kelembagaan
Lapisan 3 — Perluasan	UMKM batik mikro di sekitar kawasan	Pembinaan legalitas; standar produksi; akses informasi	Peningkatan kapasitas; legalitas; daya saing	Sosial-budaya dan pemberdayaan

Tabel 4.3 Tiga Lapisan Keterlibatan Komunitas dalam Model Edutourism

Sumber: analisis data primer (2026).

Lapisan ketiga adalah temuan yang paling penting secara teoretis, dan alasannya perlu dijelaskan dengan tepat. Pembinaan terhadap pesaing yang lebih kecil merupakan perilaku yang **tidak dapat dijelaskan oleh logika persaingan pasar maupun oleh kepatuhan regulasi**, karena tidak ada kewajiban hukum apa pun yang mengharuskannya dan tidak ada keuntungan langsung yang diperoleh. Ia hanya dapat dijelaskan melalui teori modal sosial: norma timbal balik yang berlaku dalam komunitas membuat bantuan hari ini dipahami sebagai simpanan sosial yang akan kembali dalam bentuk lain, sementara reputasi sebagai pihak yang membantu memiliki nilai tersendiri dalam struktur sosial kawasan (Coleman, 1988; Putnam, 1993).

Implikasinya bagi analisis CBT bersifat menentukan. Dalam kerangka Mtapuri dan Giampiccoli (2019), terdapat perbedaan tajam antara **partisipasi** — di mana komunitas dilibatkan dalam kegiatan yang dirancang pihak lain — dan **pemberdayaan** — di mana kapasitas mengalir sehingga pelaku baru mampu berdiri sendiri. Lapisan ketiga menunjukkan bahwa ekosistem Laweyan telah mencapai tahap kedua. Inilah dasar empiris Proposisi 3, dan inilah pula yang membedakan CBT sejati dari pariwisata yang sekadar menjadikan komunitas sebagai latar belakang atraksi.

4.3.2 Kelembagaan Partisipasi dan Kebutuhan Formalisasinya

Secara kelembagaan, partisipasi komunitas dalam ekosistem *edutourism* Surakarta terorganisasi melalui Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan yang aktif mengelola koordinasi pelaku batik dan arus wisatawan; kelompok sadar wisata serta paguyuban pengrajin di berbagai destinasi yang mengoordinasikan pemandu, jadwal kunjungan, dan distribusi pendapatan; serta komunitas penyelenggara agenda budaya internasional yang setiap tahun mengoordinasikan partisipasi seniman lintas negara.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa kelembagaan komunitas di Surakarta **tidak perlu dibangun dari nol** — ia perlu diformalkan dan diperlengkapi. Hambatan

yang paling nyata bersifat administratif dan karenanya dapat diselesaikan dengan cepat: tanpa status badan hukum berupa perkumpulan atau koperasi terdaftar, forum kawasan tidak dapat menandatangani perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi maupun lembaga budaya asing, tidak dapat membuka rekening kolektif untuk menampung pembayaran program, dan tidak dapat mengajukan hibah secara mandiri. Ketiga keterbatasan itu secara langsung menutup jalur pendanaan dan kemitraan yang justru paling dibutuhkan untuk menjalankan program berdurasi panjang.

4.3.3 Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan

Pengembangan *edutourism* memerlukan koordinasi yang cermat antara lima kelompok pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan, kapasitas, dan keterbatasan berbeda.

Pemangku Kepentingan	Peran Utama	Kontribusi Khas	Kebutuhan Penguatan
Komunitas lokal (pengrajin, seniman, penyedia homestay)	Tuan rumah, mentor budaya, mitra pencipta, pengelola harian program	Autentisitas; pengetahuan budaya yang tidak tergantikan; kehangatan sambutan	Bahasa Inggris dasar; standar layanan; literasi digital; kemampuan manajemen program
Pemerintah Kota (Bappeda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM)	Regulator, fasilitator kebijakan, koordinator lintas perangkat daerah, penyedia infrastruktur	Legitimasi kebijakan; akses anggaran daerah; data statistik resmi; perizinan	Penyesuaian Perda Nomor 5 Tahun 2017; mekanisme insentif; penyederhanaan perizinan
Perguruan tinggi (UMS, ISI Surakarta, UNS)	Penyedia kurikulum, mentor ahli, validator konten budaya, mitra riset	Legitimasi akademis; jaringan seniman; kapasitas dokumentasi	Protokol kolaborasi dengan komunitas nonakademis; mekanisme bagi hasil yang adil
Sektor swasta dan UMKM pendukung	Penyedia layanan pendukung: transportasi, kuliner, cendera mata, pemasaran	Kapasitas distribusi pasar; standar layanan; koneksi platform pemesanan	Pemahaman kebutuhan khusus segmen edukasi yang berbeda dari wisatawan konvensional
Lembaga budaya dan mitra eksternal	Rekrutmen dan kurasi peserta program berdurasi panjang	Seleksi peserta yang tepat; potensi dana beasiswa; publikasi internasional	Pemahaman mendalam atas budaya Jawa dan protokol interaksi komunitas

Tabel 4.4 Pemetaan Peran Pemangku Kepentingan dalam Ekosistem Edutourism

Sumber: analisis penyusun (2026).

4.3.4 Tiga Ketegangan yang Harus Dikelola

Partisipasi komunitas dalam program wisata tidak pernah berjalan linear tanpa ketegangan. Tiga dinamika berikut perlu dikelola secara sengaja, bukan diabaikan dengan harapan akan selesai sendiri.

1. **Ketegangan antara keterbukaan dan perlindungan.** Komunitas perlu terbuka terhadap pengunjung, namun sekaligus perlu menjaga privasi dan ruang sakral dari konsumsi wisata yang berlebihan. Ketegangan ini paling tajam pada klaster Keraton dan Mangkunegaran yang memiliki ruang berstatus sakral. Penyelesaiannya bukan melalui pembatasan menyeluruh maupun pembukaan menyeluruh, melainkan melalui penetapan protokol akses berjenjang yang disusun dan disahkan pengelola serta tokoh budaya.
2. **Risiko distribusi manfaat yang tidak merata.** Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi terkonsentrasi pada pelaku yang sudah memiliki akses lebih baik — kemampuan berbahasa asing, kehadiran daring, atau fasilitas yang memadai. Model tiga lapisan Batik Mahkota menunjukkan satu cara mengatasinya secara organik, tetapi mekanisme yang bergantung pada kesukarelaan tidak dapat dijadikan andalan pada skala kawasan. Diperlukan mekanisme formal berupa kesepakatan tertulis tentang rotasi penerimaan tamu dan proporsi bagi hasil.
3. **Peran generasi muda.** Terdapat paradoks yang perlu dicermati: *edutourism* berpotensi menjadi daya tarik bagi pemuda lokal untuk menghargai kembali budaya tradisional, tetapi hanya apabila mereka diberi peran aktif yang bermakna — bukan sekadar menjadi tenaga administrasi program yang dikelola pihak luar. Praktik Batik Mahkota yang membuka ruang ekspresi kreatif modern merupakan contoh konkret bagaimana ruang bermakna itu diciptakan, karena ia menempatkan kepekaan estetik generasi muda sebagai kontribusi yang dihargai, bukan sebagai penyimpangan yang ditoleransi.

4.4 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, dan Strategi Mitigasi

Sub-bab ini menjawab tujuan penelitian keempat, yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi *edutourism* berbasis komunitas pada dua tingkat analisis serta merumuskan strategi mitigasinya.

4.4.1 Faktor Pendukung Berbasis Data Primer

Pertama, ketersediaan tenaga pengajar berpengalaman. Batik Mahkota memiliki pengajar yang teruji kompetensinya melalui pengalaman panjang dalam industri batik. Kualifikasi pengajar dibuktikan tidak hanya dari lama pengalaman, tetapi juga dari kemampuan memberikan edukasi yang terstruktur dan menarik bagi berbagai segmen pengunjung.

> *"Kalau itu, kita lihat dan mengacunya ke yang sudah senior, berpengalaman juga, ya senior pun gak sampe tua atau apa, tapi kalau dilihat latar belakangnya itu kan kita sudah pernah melihat hasil batiknya. Nah itu yang kita buat menjadi pemandu atau instruktur dari si konsumennya itu sendiri."*

Kriteria pemilihan instruktur berdasarkan **kualitas karya, bukan usia atau senioritas formal**, merupakan praktik yang layak dijadikan standar dalam sertifikasi pemandu *edutourism* kawasan. Praktik ini penting karena membuka jalur bagi

pengrajin muda yang berbakat untuk memperoleh peran bernilai tinggi, dan dengan demikian menjawab langsung persoalan regenerasi yang menjadi keprihatinan hampir seluruh studi tentang kawasan batik.

Kedua, kelengkapan legalitas dan sertifikasi usaha. Batik Mahkota telah memiliki dokumen legalitas yang diperlukan, termasuk izin usaha dan sertifikasi produk, bahkan sertifikat atas motif yang diproduksi.

> *"Kalau itu semua kami sudah ada, Mbak, kayak SIUP, dari Pak Gubernur juga ada sertifikatnya, karena kami sudah legal ya, jadi memang sudah ada, bahkan motif yang kita produksi pun sudah ada sertifikatnya."*

Kelengkapan legalitas memberikan kepercayaan kepada pengunjung, khususnya dari kalangan institusi pendidikan dan penelitian yang memerlukan mitra berstatus hukum jelas untuk kerja sama formal. Yang perlu digarisbawahi, sertifikasi atas motif merupakan bentuk perlindungan kekayaan intelektual yang akan menjadi sangat menentukan ketika program residensi menghasilkan karya kolaboratif — sebuah persoalan yang dibahas pada sub-bab 4.6.

Ketiga, dukungan pemerintah melalui program fasilitasi dan pelatihan. Dinas terkait telah memberikan dukungan berupa peralatan batik, fasilitas bengkel kerja, kursus, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

> *"Ada, secara langsung dan secara tidak langsung, secara langsung seperti alat-alat batik, lalu ada fasilitas untuk kami semacam workshop, kursus sosialisasi, bintek, itu fasilitas-fasilitas dari dinas yang terkaitnya."*

Keempat, ekosistem forum dan jaringan kolektif kawasan. Keberadaan forum kawasan sebagai platform kolektif memungkinkan anggota berbagi sumber daya, berpartisipasi dalam pameran bersama, dan memperkuat citra kawasan Laweyan secara kolektif.

Kelima, pemanfaatan media sosial dan digitalisasi konten. Ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan aplikasi media sosial dan melakukan produksi konten digital menjadi aset berharga.

> *"Ya lalu pemanfaatan kita juga sudah ya, sebisanya aja, kita kegiatan, kita dokumentasi, media kita buat konten, kita juga ada admin untuk mengupload ke media sosial lainnya. Untuk memastikan konten itu tersampaikan."*

4.4.2 Faktor Penghambat Berbasis Data Primer

Tantangan pertama: keterbatasan strategi konten digital yang terstruktur. Meskipun media sosial telah dimanfaatkan, terdapat kesenjangan antara kemampuan teknis memproduksi konten dengan kemampuan strategis merancang komunikasi yang efektif.

> *"Jadi cuma sebatas tadi, tapi untuk mendalam, menjadikan konten itu bukan cuma video aja. Ada penyampaian mungkin tentang strategi seperti apa, itu mungkin kami masih ada kekurangan."*

Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa **masalahnya bukan ketiadaan kapasitas digital, melainkan ketiadaan strategi digital**. Pembedaan ini berkonsekuensi besar pada rancangan intervensi. Membangun kapasitas teknis dari nol menuntut pelatihan panjang, perangkat baru, dan perekrutan tenaga; sedangkan menutup kesenjangan strategis menuntut pelatihan terarah berdurasi pendek tentang algoritma platform, kalender konten, analitik, dan segmentasi pesan. Biaya kedua jenis intervensi ini berbeda jauh, dan kekeliruan mendiagnosis akan menghasilkan program peningkatan kapasitas yang mahal tetapi tidak menjawab persoalan. Inilah dasar empiris Proposisi 4.

Tantangan kedua: tekanan regulasi dan kebijakan fiskal. Perubahan kebijakan perpajakan dan kenaikan harga bahan baku menjadi beban signifikan bagi pelaku usaha batik skala menengah.

> *"Ya kalau untuk kebijakan ya itu memang universal dan itu perlu pengkajian, itu memang untuk bagi usaha, itu kalau yang saya amati mungkin arahnya ke pajak ya mbak. Pajak lalu ada regulasi menaikkan tarif harga bahan baku itu juga, bagi kami untuk sekarang ini kan juga terasa ya."*

Tantangan ketiga: intensitas pemeliharaan fasilitas. Konsep desain yang memadukan nuansa alam dengan elemen tradisional memerlukan tingkat pemeliharaan yang lebih serius.

> *"Itu memang perlu maintenance-nya lebih intensif, karena dengan konsep rumah yang ruang seperti ini, polanya harus ada, untuk penjagaan, maintenance itu yang perlu, itu sih yang mungkin perlu dikembangkan."*

Tantangan keempat: keterbatasan volume kunjungan dan ketidakstabilan permintaan. Volume 10 sampai 50 pengunjung per bulan dengan variasi antarbulan yang signifikan mempersulit perencanaan kapasitas dan pengelolaan sumber daya.

Tantangan kelima: regenerasi dan minat generasi muda. Meskipun ruang ekspresi kreatif telah dibuka, tantangan struktural regenerasi pengrajin tetap ada.

> *"Jadi kita ingin buat batik itu lebih mudah sehingga menarik minat utama."*

4.4.3 Tantangan Tambahan pada Skala Kota

Ketika model diperluas ke skala kota dan diperdalam menjadi program berdurasi panjang, muncul tujuh tantangan tambahan yang tidak tampak pada skala unit usaha.

1. **Keterbatasan akomodasi komunitas berstandar layak.** Sebagian besar akomodasi komunitas belum memenuhi ekspektasi pengunjung berdurasi panjang dalam hal privasi, akses internet, dan fasilitas sanitasi. Kekhawatiran ini diperkuat temuan Anugrahaningrum dkk. (2021) bahwa kesesuaian infrastruktur Kampung Batik Laweyan terhadap konsep ramah lingkungan masih berada pada kategori sedang.

2. **Keterbatasan kompetensi bahasa asing komunitas.** Penyelesaiannya bukan menggantikan pengrajin dengan tenaga profesional yang fasih berbahasa Inggris — yang justru mengorbankan autentisitas — melainkan menyediakan fasilitator budaya dwibahasa yang berperan sebagai jembatan, bukan pengganti.
3. **Kompleksitas regulasi keimigrasian untuk kunjungan jangka panjang.** Peserta program berdurasi satu sampai tiga bulan memerlukan jenis izin tinggal yang berbeda dari visa wisatawan standar. Persoalan ini berada di luar kewenangan pemerintah kota dan hanya dapat diselesaikan melalui koordinasi dengan Kantor Imigrasi dan kementerian terkait.
4. **Risiko komodifikasi dan kelelahan budaya komunitas.** Tanpa mekanisme yang cermat, program yang terlalu intensif dapat menimbulkan kelelahan komunitas akibat terlalu sering menampilkan budayanya kepada orang luar. Protokol rotasi dan pembatasan jumlah pengunjung per komunitas per periode menjadi komponen desain yang kritis.
5. **Keterbatasan kapasitas manajerial komunitas.** Mengelola program berskala institusional — dari rekrutmen peserta, pengelolaan kontrak, hingga pelaporan — memerlukan kapasitas yang melampaui yang saat ini dimiliki sebagian besar kelompok sadar wisata.
6. **Fragmentasi tata kelola antarklaster.** Lima klaster dikelola entitas berbeda dengan tingkat kesiapan yang tidak seragam. Koordinasi untuk menciptakan pengalaman yang kohesif lintas klaster memerlukan mekanisme yang belum tersedia.
7. **Regulasi daerah yang belum mengakomodasi pariwisata kreatif.** Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata belum secara eksplisit mengatur pariwisata kreatif berbasis komunitas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku *edutourism* skala komunitas dalam hal perizinan, tarif, dan perlindungan usaha.

4.4.4 Analisis SWOT dan Strategi Mitigasi

Sintesis faktor pendukung dan penghambat pada dua tingkat analisis disajikan dalam matriks SWOT berikut.

Faktor Positif	Faktor Negatif
KEKUATAN (_Strengths_) — internal. (1) Instruktur berpengalaman dengan kriteria pemilihan berbasis kualitas karya. (2) Kelengkapan legalitas dan sertifikasi usaha serta motif. (3) Kelembagaan kawasan yang aktif dan berpengalaman lebih dari dua dekade. (4) Program edukasi terstruktur yang memadukan sejarah, filosofi, teknik, dan ekspresi kreatif. (5) Format *workshop* intensif lima sampai tujuh hari	**KELEMAHAN (_Weaknesses_) — internal.** (1) Ketiadaan strategi konten digital yang terstruktur. (2) Volume kunjungan rendah dan berfluktuasi. (3) Biaya pemeliharaan infrastruktur yang tinggi. (4) Belum tersedia paket terstandar dan sistem reservasi terpadu. (5) Kelembagaan komunitas belum berbadan hukum. (6) Keterbatasan kompetensi bahasa asing dan kapasitas manajerial.

Faktor Positif	Faktor Negatif
sebagai embrio program residensi. (6) Modal sosial yang mendorong pembinaan antarpelaku secara sukarela.	
PELUANG (_Opportunities_) — eksternal. (1) Misi kedua dan ketiga RPJMD 2025–2029 serta program kelima Asta Cita Surakarta. (2) Mandat RIPK 2025–2045 bagi pemerintah daerah. (3) Permintaan laten dari sektor pendidikan dan penelitian yang datang tanpa pemasaran. (4) Agenda budaya internasional kota yang telah berjalan rutin dan masuk program nasional. (5) Program peningkatan kapasitas UMKM yang telah tersedia di tingkat kota. (6) Kerangka regulasi daerah yang menjamin kehidupan bermasyarakat yang toleran.	**ANCAMAN (_Threats_) — eksternal.** (1) Kenaikan harga bahan baku dan perubahan kebijakan perpajakan. (2) Persaingan produk batik cetak yang jauh lebih murah. (3) Perda Nomor 5 Tahun 2017 yang belum mengakomodasi pariwisata kreatif. (4) Risiko komodifikasi budaya apabila komersialisasi tidak terkendali. (5) Risiko melampaui daya dukung kawasan padat apabila model berbasis volume yang dipilih. (6) Kelelahan budaya komunitas akibat intensitas kunjungan yang tidak diatur.

Tabel 4.5 Matriks SWOT Ekosistem Edutourism Kota Surakarta

Sumber: analisis penyusun atas data primer, literatur terverifikasi, dan dokumen kebijakan (2026).

Strategi	Rumusan Strategi Mitigasi
SO	Manfaatkan instruktur berpengalaman dan kelembagaan kawasan untuk mengembangkan paket *edutourism* terstandar, lalu formalkan permintaan laten dari sekolah dan perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama agar kunjungan menjadi terjadwal dan dapat diprediksi. Manfaatkan momentum agenda budaya internasional kota sebagai pintu masuk perekrutan peserta program berdurasi panjang.
WO	Tutup kesenjangan strategi digital melalui pelatihan terarah pada program peningkatan kapasitas UMKM yang sudah tersedia — intervensi berbiaya rendah dengan dampak tinggi. Bangun sistem reservasi terpadu tingkat kawasan untuk menstabilkan volume kunjungan, dan dampingi kelembagaan komunitas hingga berbadan hukum agar dapat mengakses kemitraan dan hibah.
ST	Gunakan kekuatan legalitas dan sertifikasi motif untuk membedakan produk dari batik cetak; jadikan autentisitas proses dan kedalaman filosofi sebagai proposisi nilai yang tidak dapat ditiru produksi massal. Terapkan model berbasis kualitas dan durasi, bukan volume, agar tekanan pada daya dukung kawasan padat tetap terkendali.
WT	Dorong penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 beserta skema insentif bagi UMKM *edutourism*; bangun mekanisme distribusi manfaat dan protokol perlindungan budaya secara kolektif melalui kelembagaan kawasan sebelum program diperluas, bukan sesudahnya.

Tabel 4.6 Matriks Strategi SWOT Pengembangan Edutourism Kota Surakarta

Sumber: analisis penyusun (2026).

4.5 Peran Kearifan Lokal sebagai Konten Pembelajaran dan Instrumen Tata Kelola

Sub-bab ini menjawab tujuan penelitian kelima. Argumen pokoknya adalah bahwa nilai-nilai budaya Jawa dalam konteks *edutourism* Surakarta berfungsi ganda: sebagai bahan yang diajarkan sekaligus sebagai aturan main yang mengatur cara mengajarkannya.

4.5.1 Kearifan Lokal sebagai Konten Pembelajaran

Sebagai konten, manifestasi kearifan lokal dalam program *edutourism* Surakarta dapat dibedakan ke dalam empat kategori. *Kategori pertama* adalah **ritual dan upacara budaya** seperti Grebeg dan Sekaten di lingkungan keraton, yang memberikan pengalaman langsung atas praktik budaya Jawa yang masih hidup (Puspitasari dkk., 2025; Lestari dkk., 2025). *Kategori kedua* adalah **seni pertunjukan dan seni kriya tradisional** — wayang, gamelan, tari klasik — yang berfungsi bukan hanya sebagai hiburan melainkan sebagai media transmisi nilai filosofis dan moral. *Kategori ketiga* adalah **filosofi dan sistem nilai hidup Jawa**, yang memberikan landasan etis bagi pengembangan pariwisata yang menghormati lingkungan dan komunitas. *Kategori keempat* adalah **keterampilan tradisional** seperti membatik dan membuat blangkon, yang menjadi konten praktik langsung yang memungkinkan peserta belajar dari pemegang pengetahuan.

Perlu diberikan satu peringatan metodologis di sini. Keempat kategori tersebut tidak memiliki tingkat keterbukaan yang sama. Keterampilan kriya pada umumnya dapat diajarkan secara terbuka, sedangkan ritual keraton memiliki batas partisipasi yang ditentukan tradisi. Kekeliruan yang lazim terjadi dalam pengemasan produk wisata budaya adalah memperlakukan seluruh kategori dengan derajat keterbukaan yang sama, sehingga ritual dipentaskan di luar konteks dan waktunya demi kenyamanan jadwal kunjungan. Justru pada titik inilah komodifikasi bermula, dan justru pada titik inilah fungsi kedua kearifan lokal — sebagai instrumen tata kelola — menjadi diperlukan.

4.5.2 Kearifan Lokal sebagai Instrumen Tata Kelola

Empat nilai budaya Jawa dapat diterjemahkan menjadi aturan main program yang operasional, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.7. Penerjemahan ini merupakan sumbangan spesifik kajian ini, karena literatur yang tersedia umumnya berhenti pada penyebutan nilai tanpa menunjukkan bagaimana nilai itu bekerja sebagai mekanisme tata kelola.

Nilai	Makna dalam Praktik Sosial	Terjemahan sebagai Aturan Program	Risiko yang Dicegah
Gotong royong	Kerja bersama dengan pembagian beban dan hasil yang dirasakan adil oleh seluruh pihak	Rotasi penerimaan tamu antar-rumah tangga penyedia homestay; proporsi bagi hasil disepakati dan tertulis sebelum program berjalan	Konsentrasi manfaat pada segelintir pelaku yang sudah lebih siap
Tepa slira	Kemampuan menempatkan diri pada posisi orang lain dan menahan diri karenanya	Protokol interaksi harian yang mengatur jam berkunjung, batas pendokumentasian, dan ruang privat keluarga; orientasi wajib bagi peserta sebelum tinggal	Gangguan terhadap kehidupan keluarga tuan rumah dan kelelahan budaya

Nilai	Makna dalam Praktik Sosial	Terjemahan sebagai Aturan Program	Risiko yang Dicegah
Andhap asor	Kerendahan hati; menempatkan pengetahuan orang lain sebagai sesuatu yang patut dihormati	Peserta ditempatkan sebagai murid pada tahap awal program, bukan sebagai konsultan atau kurator; mentor lokal berwenang menentukan urutan materi	Pengambilalihan definisi budaya oleh pihak luar yang lebih fasih berbahasa akademis
Rukun	Pemeliharaan harmoni sosial dan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah	Forum musyawarah kawasan sebagai mekanisme penyelesaian perselisihan tingkat pertama sebelum jalur formal ditempuh	Perselisihan yang mengeras menjadi konflik terbuka dan merusak kelembagaan kawasan

Tabel 4.7 Penerjemahan Nilai Budaya Jawa menjadi Instrumen Tata Kelola Program

Sumber: rumusan penyusun berdasarkan data primer dan landasan teori pada sub-bab 2.1 (2026).

Bukti bahwa mekanisme semacam ini bukan rekaan konseptual dapat dilihat pada lapisan ketiga model keterlibatan komunitas yang dibahas pada sub-bab 4.3.1. Pembinaan sukarela terhadap UMKM yang lebih kecil pada dasarnya adalah *gotong royong* yang bekerja tanpa dituliskan. Yang direkomendasikan kajian ini bukanlah menciptakan mekanisme baru, melainkan **menuliskan dan meresmikan mekanisme yang sudah bekerja**, agar ia tetap berjalan ketika skala program membesar dan ketika pelaku yang terlibat tidak lagi saling mengenal secara personal.

Di sinilah pula letak jawaban atas ketegangan yang belum terselesaikan dalam literatur sebagaimana dicatat pada sub-bab 2.2.3, yakni bahwa pariwisata sekaligus merupakan ancaman terhadap autentisitas dan sumber daya bagi pelestariannya. Ketegangan itu tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikelola apabila **kewenangan menetapkan batas berada pada pihak yang menanggung akibatnya**. Selama komunitas dan tokoh budaya yang menentukan apa yang boleh ditampilkan, kapan, dan kepada siapa, komersialisasi tidak otomatis berarti komodifikasi. Sebaliknya, ketika kewenangan itu berpindah kepada penyelenggara luar atau kepada pertimbangan target kunjungan, komodifikasi hampir pasti terjadi berapa pun ketatnya panduan tertulis.

4.6 Rancangan Model Residensi Budaya Global Berbasis Komunitas

Sub-bab ini menjawab tujuan penelitian keenam, yaitu merancang model residensi budaya global berbasis komunitas sebagai pengembangan lanjutan dari MEBKL, beserta prasyarat kesiapan yang harus dipenuhi komunitas.

4.6.1 Logika Transisi dari MEBKL ke GCRE

Model yang diusulkan, *Global Community Residency Edutourism* (GCRE), bukan pengganti MEBKL melainkan pendalamannya. MEBKL adalah fondasi operasional yang telah terbukti; GCRE adalah perluasan durasi, kedalaman, dan jangkauan

pasarnya. Dasar empiris transisi ini telah dikemukakan pada sub-bab 4.2.3: *workshop* intensif berdurasi lima hari hingga satu minggu yang telah berjalan secara struktural sudah merupakan program residensi berdurasi pendek. Yang membedakan GCRE hanyalah tiga penambahan, yaitu perpanjangan durasi, penambahan komponen homestay komunitas dan pendampingan maestro, serta formalisasi tata kelola dan distribusi manfaat.

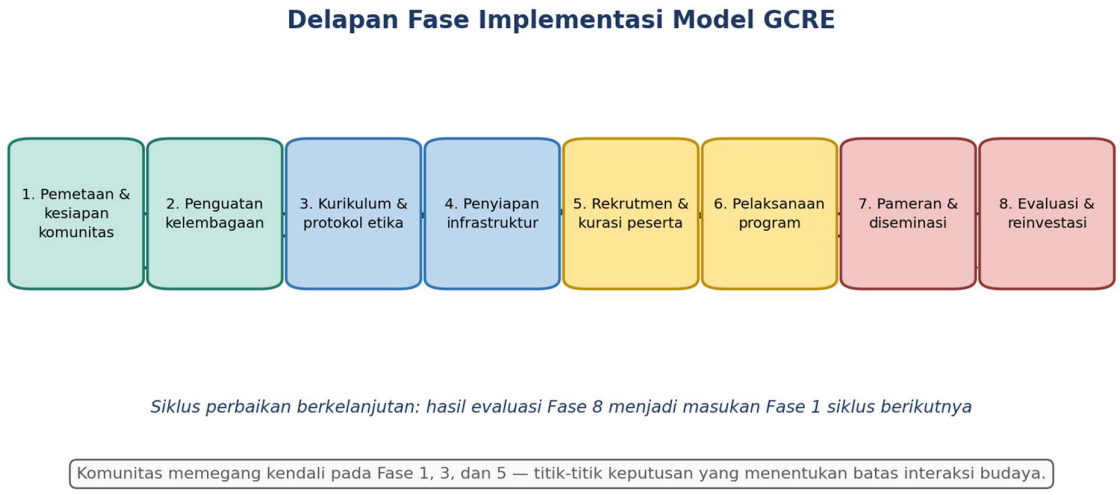
Aspek	MEBKL (kondisi eksisting)	GCRE (pengembangan lanjutan)
Durasi	Tiga jam sampai satu minggu	Dua sampai dua belas minggu
Akomodasi	Pengunjung menginap mandiri di hotel	Homestay komunitas terstandar dengan rotasi antarrumah tangga
Pembelajaran	*Workshop* teknik dengan edukasi sejarah dan filosofi	Kurikulum tiga tingkat dengan pendampingan maestro
Peran pengunjung	Peserta belajar	Mitra pencipta yang aktif berkontribusi
Luaran	Karya batik pribadi	Karya kolaboratif, dokumentasi, dan pameran akhir
Distribusi manfaat	Informal melalui upah dan penjualan	Formal berdasarkan skema yang disepakati sebelum program berjalan
Dampak	Ekonomi lokal dan edukasi	Ekonomi, edukasi, regenerasi budaya, dan diplomasi

Tabel 4.8 Perbandingan MEBKL dan GCRE

Sumber: rumusan penyusun (2026).

4.6.2 Delapan Fase Implementasi

Model GCRE terdiri atas delapan fase implementasi yang berurutan dan membentuk siklus perbaikan berkelanjutan.



Gambar 4.4 Delapan Fase Implementasi Model GCRE

Sumber: rancangan penyusun (2026).

Tiga di antara delapan fase merupakan **titik kendali komunitas**, dan penempatannya bersifat sengaja. Pada Fase 1, komunitas sendiri yang menetapkan batas kesediaannya — berapa tamu yang sanggup diterima, pada periode apa, dan kegiatan apa yang tidak bersedia dibuka. Pada Fase 3, komunitas bersama tokoh budaya menetapkan kurikulum dan protokol etika, termasuk pembedaan antara materi yang terbuka dan yang tertutup. Pada Fase 5, komunitas memegang kewenangan menyeleksi siapa yang boleh masuk dan tinggal di kawasan mereka. Apabila ketiga titik ini diambil alih penyelenggara luar — pola yang lazim terjadi ketika program dikelola berdasarkan target kunjungan — maka model ini kehilangan sifat berbasis komunitasnya dan berubah menjadi program wisata biasa yang kebetulan berlokasi di kampung.

4.6.3 Desain Kurikulum Tiga Tingkat

Tingkat	Durasi	Fokus Pembelajaran	Luaran yang Diharapkan	Metode Utama
Tingkat 1 — Orientasi	Minggu 1–2	Konteks budaya Jawa: nilai dasar, protokol sosial, sejarah Surakarta, pengantar seni dan bahasa Jawa	Kemampuan berinteraksi dasar dengan komunitas; pemahaman konteks yang cukup untuk belajar lebih dalam	Kuliah pengantar; kunjungan terpandu; sesi bahasa Jawa
Tingkat 2 — Imersi	Minggu 3–8	Pendalaman intensif pada satu atau dua bidang seni dan kriya pilihan bersama maestro lokal; partisipasi dalam kehidupan komunitas sehari-hari	Penguasaan teknik dasar hingga menengah; relasi personal dengan mentor; apresiasi mendalam atas filosofi budaya Jawa	Pendampingan maestro; homestay aktif; *workshop* harian

Tingkat	Durasi	Fokus Pembelajaran	Luaran yang Diharapkan	Metode Utama
Tingkat 3 — Ko-kreasi	Minggu 9–12	Proyek kolaboratif bersama komunitas yang mensintesiskan perspektif peserta dengan kearifan lokal	Karya kolaboratif; dokumentasi digital; pameran akhir; rencana keberlanjutan pascaprogram	Studio terbuka; *workshop* ko-kreasi; forum lintas budaya

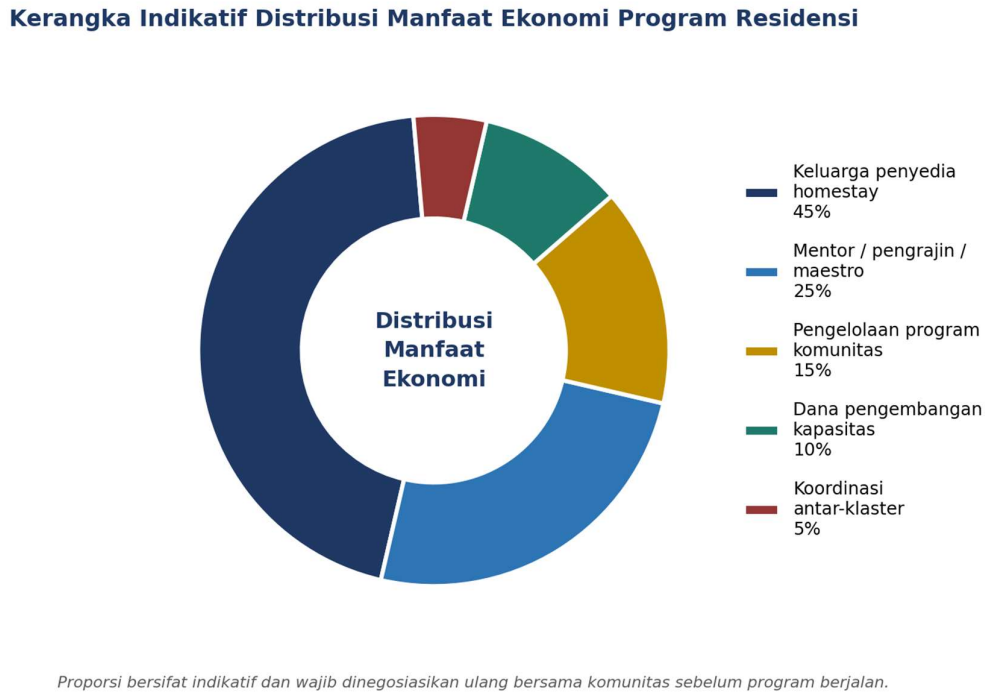
Tabel 4.9 Desain Kurikulum Tiga Tingkat Program Residensi Budaya

Sumber: rancangan penyusun (2026).

Perlu ditegaskan bahwa tidak semua peserta harus menempuh ketiga tingkat. Tingkat 1 dapat berdiri sendiri sebagai produk dua minggu bagi peserta dengan waktu terbatas, dan justru pada tingkat inilah peluang pasar terbesar berada karena hambatan masuknya paling rendah. Perancangan bertingkat semacam ini juga berfungsi sebagai mekanisme penyaringan alami: hanya peserta yang menunjukkan komitmen pada tingkat sebelumnya yang melanjutkan ke tingkat berikutnya, sehingga komunitas tidak menanggung beban menerima tamu jangka panjang yang belum teruji kesungguhannya.

4.6.4 Mekanisme Distribusi Manfaat Ekonomi

Untuk mencegah konsentrasi manfaat yang tidak adil, model GCRE mengusulkan kerangka distribusi berbasis prinsip *gotong royong* sebagai **kerangka awal yang perlu dinegosiasikan dan disepakati bersama komunitas**, bukan sebagai ketentuan yang dipaksakan dari luar.



Gambar 4.5 Kerangka Indikatif Distribusi Manfaat Ekonomi Program Residensi

Sumber: rancangan penyusun (2026). Proporsi bersifat indikatif dan wajib dinegosiasikan ulang bersama komunitas.

Penerima	Proporsi Indikatif	Dasar Pertimbangan
Keluarga penyedia homestay	45%	Menanggung biaya akomodasi, konsumsi, dan beban keseharian yang paling besar, termasuk berkurangnya ruang privat keluarga
Mentor, pengrajin, dan maestro	25%	Menyediakan transfer pengetahuan yang merupakan inti nilai program dan tidak dapat digantikan pihak lain
Pengelolaan program komunitas	15%	Biaya operasional, koordinasi, dan administrasi yang dijalankan kelembagaan kawasan
Dana pengembangan kapasitas komunitas	10%	Dikelola kolektif untuk pelatihan dan perbaikan fasilitas, sehingga sebagian hasil kembali menjadi investasi
Koordinasi antarklaster	5%	Menjaga kohesi jaringan destinasi lintas kawasan agar klaster yang lebih siap tidak menyerap seluruh manfaat

Tabel 4.10 Kerangka Indikatif Distribusi Manfaat Ekonomi Program Residensi

Sumber: rancangan penyusun (2026).

Satu ketentuan tambahan bersifat menentukan dan harus ditetapkan **sebelum** program dimulai, bukan sesudah karya dihasilkan, yaitu pembagian hak atas karya ko-kreasi. Ketika seorang perancang tekstil asing bekerja bersama pengrajin Laweyan dan menghasilkan motif baru, pertanyaan tentang siapa pemilik hak, siapa

yang berhak memproduksi secara komersial, dan bagaimana royalti dibagi harus sudah terjawab dalam kontrak. Ketiadaan ketentuan ini merupakan risiko nyata, dan pengalaman Batik Mahkota yang telah menyertifikasi motif produksinya menunjukkan bahwa kesadaran atas perlindungan kekayaan intelektual sudah tumbuh di kawasan — tinggal diperluas menjadi standar kawasan.

4.6.5 Prasyarat Kesiapan Komunitas

Model ini tidak dapat diterapkan pada komunitas mana pun tanpa syarat. Enam prasyarat berikut harus dipenuhi sebelum sebuah klaster dinyatakan siap menjalankan program residensi, dan pemenuhannya sebaiknya diverifikasi melalui asesmen independen, bukan melalui pernyataan kesediaan semata.

1. Kelembagaan komunitas telah berbadan hukum sehingga mampu menandatangani kontrak dan mengelola dana kolektif secara akuntabel.
2. Tersedia sekurang-kurangnya lima rumah tangga penyedia homestay yang memenuhi standar minimum privasi, sanitasi, dan konektivitas, dengan kesediaan yang dinyatakan secara sukarela.
3. Tersedia sekurang-kurangnya tiga pemegang pengetahuan yang bersedia menjadi mentor dan diakui komunitas sebagai pemilik otoritas dalam bidangnya.
4. Protokol etika dan batas interaksi telah disusun bersama tokoh budaya serta disahkan melalui musyawarah kawasan.
5. Skema distribusi manfaat telah disepakati secara tertulis dan dipahami seluruh pihak yang terlibat.
6. Tersedia sekurang-kurangnya satu fasilitator dwibahasa yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi, bukan sebagai pengganti pengrajin.

Berdasarkan penilaian kesiapan pada sub-bab 4.1.4, klaster Pura Mangkunegaran dan Kampung Batik Laweyan merupakan dua kandidat terkuat untuk uji coba, sedangkan klaster lain memerlukan penyiapan lebih dahulu. Rekomendasi kajian ini adalah menjalankan uji coba pada satu sampai dua klaster terlebih dahulu, mengevaluasinya secara terbuka, lalu memperluas — bukan meluncurkan program serentak di lima klaster yang berisiko menghasilkan kegagalan yang menyeluruh.

4.7 Strategi Pengembangan dan Keselarasan dengan Kebijakan Pembangunan

Sub-bab ini menjawab tujuan penelitian ketujuh, yaitu merumuskan strategi dan menunjukkan keselarasannya dengan kerangka kebijakan yang berlaku.

4.7.1 Lima Strategi Pengembangan

Strategi pertama: penguatan konten dan narasi budaya. Pengembangan cerita budaya yang kuat merupakan dasar dari *edutourism* yang berkesan. Kawasan Laweyan memiliki keunikan berupa hubungan historis dengan sejarah batik

Indonesia, termasuk tradisi *butulan* yang menggambarkan solidaritas komunitas saudagar batik. Strategi yang direkomendasikan mencakup pengembangan program bertutur yang dikemas dalam beberapa paket tematik, serta digitalisasi cerita budaya melalui video pendek, siniar sejarah, dan tur virtual yang berfungsi ganda sebagai media promosi dan sebagai dokumentasi warisan.

Strategi kedua: pengembangan paket dan segmentasi pasar. Lima segmen pasar utama dapat diidentifikasi sebagaimana disajikan pada Tabel 4.11, masing-masing dengan format program, durasi, dan pendekatan pemasaran yang berbeda.

Segmen Pasar	Karakteristik	Format Program	Durasi	Catatan Strategis
Pelajar SD–SMA	Kunjungan terorganisir dari sekolah dengan fokus edukasi budaya	*Workshop* singkat dan tur kawasan	3–4 jam	Dapat diselaraskan dengan kurikulum sehingga dibiayai anggaran sekolah secara rutin — mengubah kunjungan sporadis menjadi terjadwal
Mahasiswa dan peneliti	Kunjungan akademik dengan fokus riset dan dokumentasi	*Workshop* intensif dan wawancara pengrajin	1–5 hari	Permintaan sudah datang secara organik; yang diperlukan hanya formalisasi melalui perjanjian kerja sama
Wisatawan domestik	Keluarga dan rombongan dengan fokus pengalaman dan cendera mata	Coba membatik dan belanja produk	2–3 jam	Segmen volume yang penting untuk arus kas harian, tetapi bukan penggerak indikator lama menginap
Wisatawan mancanegara	Fokus pada keaslian budaya dan pengalaman autentik	Pengalaman budaya imersif	Setengah sampai satu hari	Lebih tertarik pada proses dan filosofi daripada produk jadi; memerlukan fasilitator dwibahasa
Peserta program berdurasi panjang	Seniman, perancang, dan akademisi yang ingin mendalami	*Workshop* intensif, homestay, dan pendampingan maestro	2–12 minggu	Segmen bernilai tertinggi per pengunjung; satu-satunya segmen yang menjawab langsung persoalan lama menginap

Tabel 4.11 Segmentasi Pasar dan Format Program Edutourism

Sumber: analisis penyusun berdasarkan data primer (2026).

Strategi ketiga: penguatan infrastruktur digital dan promosi. Sesuai diagnosis pada sub-bab 4.4.2, intervensi difokuskan pada penutupan kesenjangan strategis, bukan pembangunan kapasitas teknis dari nol. Komponennya mencakup pelatihan penyusunan kalender konten dan pembacaan analitik, pembangunan sistem reservasi terpadu tingkat kawasan, serta penyediaan materi promosi dwibahasa yang menampilkan proses dan filosofi, bukan sekadar produk jadi.

Strategi keempat: penguatan jaringan dan kolaborasi lintas sektor, melalui pembentukan forum koordinasi antarklaster, perjanjian kerja sama dengan

perguruan tinggi, dan kemitraan dengan lembaga budaya asing yang dikurasi bersama komunitas.

Strategi kelima: pelibatan generasi muda dan keberlanjutan, melalui program magang kreatif yang memadukan keterampilan membatik tradisional dengan desain modern, fotografi produk, dan produksi konten digital — sehingga keterlibatan generasi muda memiliki jalur karier yang jelas, bukan sekadar seruan moral untuk mencintai budaya sendiri.

4.7.2 Proyeksi Kontribusi terhadap Sasaran Pembangunan Daerah

Tabel 4.12 menyajikan jalur kontribusi model *edutourism* terhadap sasaran pembangunan daerah. Sebelum membaca tabel ini, dua catatan wajib diperhatikan. *Pertama*, proyeksi bersifat **mekanistik** — ia menjelaskan melalui jalur apa kontribusi terjadi, bukan mengklaim besaran kuantitatif yang pasti. *Kedua*, angka sasaran yang beredar dalam naskah versi sebelumnya menyebut tahun 2030 sebagai tahun capaian, padahal periode RPJMD adalah 2025–2029. Ketidaksesuaian ini perlu dikonfirmasi langsung pada dokumen RPJMD yang telah ditetapkan sebelum angka mana pun dijadikan dasar penetapan target program, dan karena itu kolom sasaran pada tabel berikut sengaja tidak mencantumkan besaran yang belum terverifikasi.

Indikator Sasaran Daerah	Kondisi yang Tercatat	Jalur Kontribusi Model Edutourism
Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	Perlu dikonfirmasi pada dokumen RPJMD yang ditetapkan	Peningkatan omzet UMKM batik dan kriya dari *workshop* berbayar, penjualan produk, dan jasa pemanduan; pendapatan program berdurasi panjang; efek pengganda belanja peserta pada kuliner, transportasi lokal, dan cendera mata
Kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	Perlu dikonfirmasi pada dokumen RPJMD yang ditetapkan	Pajak dan retribusi dari akomodasi komunitas yang terdaftar; retribusi program; pajak UMKM seiring naiknya omzet pengrajin
Rata-rata lama menginap	1,45 hari (November 2024)	Peserta program berdurasi panjang tinggal 14 sampai 84 hari; paket terpadu lintas klaster memperpanjang kunjungan wisatawan reguler dari satu menjadi dua hingga tiga malam
Tingkat Penghunian Kamar	52,26% (November 2024); 50,12% (Mei 2025)	Pengalihan sebagian permintaan ke akomodasi komunitas menaikkan hunian secara agregat pada kawasan destinasi, sekaligus memperluas penerima manfaat di luar sektor perhotelan formal
Jumlah pengunjung tempat bersejarah	Perlu dikonfirmasi pada dokumen RPJMD dan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Paket edukasi sekolah yang terjadwal; rute tematik lintas klaster; promosi organik dari alumni program di negara asal
Jejaring kemitraan budaya	Agenda budaya internasional kota	Jaringan alumni program dan kemitraan institusional yang tumbuh berkelanjutan dan dapat diukur melalui

Indikator Sasaran Daerah	Kondisi yang Tercatat	Jalur Kontribusi Model Edutourism
	telah berjalan rutin sejak 2009	jumlah relasi yang masih aktif beberapa tahun setelah program

Tabel 4.12 Jalur Kontribusi Model Edutourism terhadap Sasaran Pembangunan Daerah

Sumber: analisis penyusun berdasarkan BPS Kota Surakarta (2025) dan dokumen kebijakan daerah.

4.7.3 Keselarasan dengan Kebijakan Nasional dan Daerah

Model yang dikembangkan bukan eksperimen tanpa landasan kebijakan. Ia berada dalam arus utama kebijakan pembangunan yang sedang bergerak di semua tingkatan.

Instrumen Kebijakan	Ketentuan yang Relevan	Titik Sambung dengan Model
RPJMD Kota Surakarta 2025–2029	Visi “Gotong Royong Mewujudkan Surakarta Berbudaya, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”; Misi 2 tentang berbudaya untuk kemajuan dan ketahanan sosial; Misi 3 tentang daya saing ekonomi untuk kesejahteraan	Model menempatkan kebudayaan sebagai sumber penghidupan sekaligus sumber ketahanan sosial, sehingga menjawab kedua misi sekaligus dalam satu program
Asta Cita Surakarta	Program kelima tentang penguatan daya saing kota berbasis *event* pariwisata dan ekonomi kreatif; program kedua tentang penguatan daya saing UMKM berbasis ekosistem bisnis	Program residensi dapat dirangkai dengan agenda budaya kota yang telah berjalan sebagai pintu masuk peserta; pelaku *edutourism* adalah UMKM sehingga penguatannya beririsan langsung dengan program kedua
Perpres Nomor 115 Tahun 2024 tentang RIPK 2025–2045	Pemajuan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia; menjadi acuan bagi wali kota dalam memutakhirkan pokok pikiran kebudayaan daerah	Program residensi merupakan penerapan langsung mandat pembinaan kebudayaan pada tingkat kota, sehingga dapat diusulkan sebagai muatan pokok pikiran kebudayaan daerah
UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Pembinaan sebagai salah satu dari empat aspek pemajuan kebudayaan	Menyediakan dasar hukum bagi program pendampingan maestro dan transmisi pengetahuan lintas generasi
UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Menyediakan dasar bagi model berbasis kualitas dan durasi yang tidak menambah tekanan pada daya dukung kawasan padat
Perda Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017	Penyelenggaraan usaha pariwisata	**Titik kesenjangan** — belum mengakomodasi pariwisata kreatif berbasis komunitas; menjadi prioritas penyesuaian regulasi

Instrumen Kebijakan	Ketentuan yang Relevan	Titik Sambung dengan Model
Perda Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2025	Penyelenggaraan toleransi bermasyarakat	Menyediakan jaminan regulatif atas kehidupan bermasyarakat yang toleran, yang merupakan prasyarat nyata bagi program yang mempertemukan pelaku budaya lintas bangsa dengan komunitas kampung

Tabel 4.13 Keselarasan Model dengan Instrumen Kebijakan Nasional dan Daerah

Sumber: analisis penyusun atas dokumen kebijakan terverifikasi (2026).

Kesimpulan yang dapat ditarik dari tabel di atas bersifat menenangkan sekaligus menuntut. Menenangkan, karena model ini tidak memerlukan perubahan struktur kebijakan yang besar — ia bergerak searah, bukan melawan, arus kebijakan yang berlaku. Menuntut, karena justru dengan demikian tidak tersedia alasan struktural untuk menunda: yang diperlukan hanyalah formalisasi, standardisasi, penyesuaian satu peraturan daerah, dan dukungan anggaran bagi ekosistem yang sebenarnya sudah tumbuh secara organik di Surakarta. Inilah rumusan Proposisi 7 dalam bentuk kesimpulannya.

Sumber data Bab IV: data primer hasil wawancara mendalam dengan pengelola Batik Mahkota Laweyan; Informasi UMKM Kota Surakarta (2025); BPS Kota Surakarta (2025); dokumen kebijakan daerah dan nasional; serta sumber sekunder sebagaimana disitasi.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan berikut disusun mengikuti urutan sub-bab pembahasan pada Bab IV, sehingga setiap butir dapat ditelusuri kembali ke dasar analisisnya.

5.1.1 Kesimpulan atas Potensi dan Kondisi Eksisting

Ekosistem budaya Kota Surakarta merupakan fondasi yang tidak tergantikan: dua istana yang masih aktif menjalankan ritual, kawasan permukiman dengan produksi kriya yang masih berlangsung setiap hari, dan agenda pertukaran budaya internasional yang berjalan rutin, seluruhnya terkonsentrasi dalam wilayah yang kompak. Namun kondisi eksisting menunjukkan paradoks yang tajam: rata-rata lama menginap 1,45 hari dan Tingkat Penghunian Kamar sekitar 50 persen menandakan bahwa aset budaya tersebut belum terkonversi menjadi produk yang menahan pengunjung.

Pembacaan kajian ini atas paradoks tersebut adalah bahwa persoalannya terletak pada **ketiadaan produk berkedalaman, bukan pada kurangnya daya tarik**. Tiga dasar mendukung kesimpulan ini: arus kunjungan ke situs budaya tetap berlangsung; permintaan dari segmen pendidikan dan penelitian datang tanpa upaya pemasaran; dan indikator yang bermasalah adalah durasi, bukan jumlah. Konsekuensi kebijakannya penting — menambah anggaran promosi atas produk yang hanya menyediakan pengalaman setengah hari akan menaikkan kunjungan tanpa menggerakkan indikator yang paling menentukan kontribusi ekonomi. Penilaian lintas klaster memperkuat kesimpulan ini: seluruh klaster kuat pada dimensi konten budaya, tetapi tidak satu pun setara pada dimensi infrastruktur dan promosi.

5.1.2 Kesimpulan atas Model Edutourism Berbasis Komunitas

Model *Edutourism* Berbasis Komunitas Laweyan (MEBKL) yang dirumuskan dari praktik lapangan terdiri atas lima komponen yang **saling bergantung, bukan bertingkat**: autentisitas budaya sebagai pondasi, partisipasi komunitas yang aktif, integrasi pendidikan dan wisata yang terstruktur, inovasi dan adaptasi berkelanjutan, serta dukungan ekosistem kelembagaan dan kebijakan. Sifat saling bergantung ini berimplikasi langsung pada replikasi: menyalin satu atau dua komponen saja tidak akan menghasilkan model yang bekerja.

Temuan yang paling menentukan pada sub-bab ini adalah bahwa format *workshop* intensif lima hari hingga satu minggu yang telah berjalan **secara struktural sudah merupakan program residensi berdurasi pendek**. Dengan demikian, transisi menuju model berdurasi panjang bukan lompatan yang asing bagi pelaku *edutourism* Laweyan, melainkan pendalaman dari praktik yang sudah mereka kuasai. Temuan kedua yang bernilai kebijakan tinggi adalah adanya permintaan laten dari segmen pendidikan dan penelitian yang datang tanpa pemasaran,

sehingga biaya akuisisi pelanggannya mendekati nol dan segmen ini merupakan sasaran paling efisien untuk digarap lebih dahulu.

5.1.3 Kesimpulan atas Partisipasi Komunitas dan Peran Pemangku Kepentingan

Partisipasi komunitas dalam ekosistem *edutourism* Laweyan berlangsung dalam tiga lapisan: rekrutmen tenaga kerja lokal, keterlibatan dalam kelembagaan kawasan, dan pembinaan sukarela terhadap UMKM yang lebih kecil. Lapisan ketiga merupakan temuan yang paling bernilai secara teoretis karena tidak dapat dijelaskan oleh logika persaingan pasar maupun kepatuhan regulasi; ia hanya dapat dijelaskan melalui bekerjanya norma timbal balik dalam kerangka modal sosial. Keberadaan lapisan ini menunjukkan bahwa ekosistem Laweyan **telah melampaui tahap partisipasi dan mencapai tahap pemberdayaan** — pembeda antara pariwisata berbasis komunitas yang sejati dengan pariwisata yang sekadar menjadikan komunitas sebagai latar.

Pada tingkat kelembagaan, kesimpulannya adalah bahwa organisasi komunitas di Surakarta **tidak perlu dibangun dari nol, melainkan perlu diformalkan**. Hambatan yang paling nyata bersifat administratif: tanpa status badan hukum, kelembagaan kawasan tidak dapat menandatangani perjanjian kerja sama, membuka rekening kolektif, maupun mengajukan hibah secara mandiri — tiga keterbatasan yang secara langsung menutup jalur pendanaan dan kemitraan yang paling dibutuhkan.

5.1.4 Kesimpulan atas Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung utama pada tingkat unit usaha meliputi ketersediaan instruktur berpengalaman dengan kriteria pemilihan berbasis kualitas karya, kelengkapan legalitas dan sertifikasi motif, dukungan fasilitasi pemerintah, kelembagaan kawasan yang aktif, serta kemampuan dasar produksi konten digital. Faktor penghambatnya meliputi ketiadaan strategi konten digital, tekanan kebijakan fiskal dan harga bahan baku, intensitas pemeliharaan fasilitas, ketidakstabilan permintaan, dan tantangan regenerasi.

Kesimpulan diagnostik yang paling berguna bagi perancangan program adalah bahwa hambatan digital yang dihadapi bersifat **strategis, bukan teknis**. Kapasitas memproduksi konten sudah ada; yang belum ada adalah kemampuan merancang komunikasi yang terukur. Pembedaan ini menurunkan biaya intervensi secara drastis, karena yang diperlukan adalah pelatihan terarah berdurasi pendek, bukan pembangunan kapasitas dari nol. Pada tingkat kota, tujuh tantangan tambahan teridentifikasi, dengan tiga yang paling menuntut penanganan lintas lembaga, yaitu standar akomodasi komunitas, regulasi keimigrasian untuk tinggal jangka panjang, dan fragmentasi tata kelola antarklaster.

5.1.5 Kesimpulan atas Peran Kearifan Lokal

Nilai-nilai budaya Jawa berfungsi ganda dalam ekosistem *edutourism* Surakarta: sebagai konten pembelajaran yang menjadi daya tarik, sekaligus sebagai instrumen tata kelola yang menahan laju komodifikasi. Kajian ini menerjemahkan empat nilai menjadi aturan main yang operasional — *gotong royong* menjadi rotasi penerimaan tamu dan bagi hasil tertulis; *tepa slira* menjadi protokol interaksi harian dan batas pendokumentasian; *andhap asor* menjadi penempatan peserta sebagai murid pada tahap awal; dan *rukun* menjadi mekanisme penyelesaian perselisihan melalui musyawarah kawasan.

Kesimpulan pokoknya adalah bahwa ketegangan antara pelestarian dan komersialisasi tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dikelola apabila **kewenangan menetapkan batas berada pada pihak yang menanggung akibatnya**. Selama komunitas dan tokoh budaya yang menentukan apa yang boleh ditampilkan, kapan, dan kepada siapa, komersialisasi tidak otomatis berarti komodifikasi. Sebaliknya, ketika kewenangan itu berpindah pada pertimbangan target kunjungan, komodifikasi hampir pasti terjadi berapa pun ketatnya panduan tertulis.

5.1.6 Kesimpulan atas Rancangan Model Residensi

Model *Global Community Residency Edutourism* (GCRE) dirancang sebagai pendalaman MEBKL melalui tiga penambahan: perpanjangan durasi menjadi dua sampai dua belas minggu, penambahan komponen homestay komunitas dan pendampingan maestro, serta formalisasi tata kelola dan distribusi manfaat. Model ini dijalankan melalui delapan fase yang membentuk siklus perbaikan berkelanjutan, dengan tiga fase di antaranya ditetapkan sebagai titik kendali komunitas — penetapan batas kesediaan, penyusunan kurikulum dan protokol etika, serta seleksi peserta. Apabila ketiga titik ini diambil alih penyelenggara luar, model kehilangan sifat berbasis komunitasnya.

Kurikulum disusun dalam tiga tingkat yang tidak seluruhnya wajib ditempuh, sehingga tingkat pertama dapat berdiri sendiri sebagai produk dua minggu dengan hambatan masuk paling rendah. Distribusi manfaat dirancang dengan proporsi terbesar pada keluarga penyedia homestay sebagai pihak yang menanggung beban keseharian terbesar. Satu ketentuan bersifat menentukan dan harus ditetapkan sebelum program berjalan, yaitu pembagian hak atas karya ko-kreasi. Enam prasyarat kesiapan komunitas dirumuskan, dan berdasarkan penilaian kesiapan, dua klaster teridentifikasi sebagai kandidat terkuat untuk uji coba awal.

5.1.7 Kesimpulan atas Strategi dan Keselarasan Kebijakan

Lima strategi pengembangan dirumuskan, meliputi penguatan konten dan narasi budaya, pengembangan paket dan segmentasi pasar, penguatan infrastruktur digital dan promosi, penguatan jaringan lintas sektor, serta pelibatan generasi muda. Dari lima segmen pasar yang teridentifikasi, hanya segmen program berdurasi panjang yang menjawab langsung persoalan lama menginap, sedangkan

segmen lain berperan menopang arus kas harian dan memperluas basis pengenalan.

Pada tingkat keselarasan kebijakan, model ini bergerak searah dengan Misi 2 “Berbudaya untuk kemajuan dan ketahanan sosial” dan Misi 3 “Daya saing ekonomi untuk kesejahteraan” pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Program kedua “Program Penguatan Daya Saing UMKM Berbasis Ekosistem Bisnis” dan Program kelima “Program Penguatan Daya Saing Kota Berbasis Budaya, Pariwisata, Olahraga, dan Ekonomi Kreatif” pada Asta Cita Surakarta, mandat Perpres Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) Tahun 2025–2045, serta dua undang-undang sektoral. Satu titik kesenjangan teridentifikasi, yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang belum mengakomodasi pariwisata kreatif berbasis komunitas. Kesimpulannya bersifat menuntut: karena model ini tidak memerlukan perubahan struktur kebijakan yang besar, tidak tersedia alasan struktural untuk menunda pelaksanaannya.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Penelitian

Kajian ini memiliki empat keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka, dan dari keterbatasan itulah agenda riset lanjutan diturunkan.

Keterbatasan pertama berkaitan dengan cakupan narasumber: komponen data primer bertumpu pada wawancara mendalam dengan satu pelaku usaha perintis, sehingga perspektif pelaku batik lain, wisatawan, aparat pemerintah, dan pengurus kelembagaan kawasan belum terwakili secara komprehensif. **Keterbatasan kedua** adalah belum dilaksanakannya survei kuantitatif berskala penuh sebagaimana dirancang pada Bab III, sehingga seluruh proyeksi ekonomi bersifat indikatif dan memerlukan validasi. **Keterbatasan ketiga** adalah fokus geografis yang terbatas pada satu kawasan untuk komponen data primer, sehingga generalisasi ke klaster lain perlu dilakukan dengan kehati-hatian metodologis. **Keterbatasan keempat** adalah bahwa model GCRE masih bersifat konseptual dan belum diuji melalui pelaksanaan rintisan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, delapan agenda riset lanjutan direkomendasikan.

1. **Pelaksanaan survei berskala penuh** sesuai rancangan Bab III dengan sasaran sekitar 895 responden, disertai uji validitas dan reliabilitas instrumen, sebagai prasyarat bagi kalibrasi seluruh sasaran program.
2. **Survei kesediaan membayar** (*willingness to pay*) terhadap calon peserta program berdurasi panjang menggunakan pendekatan *contingent valuation*, guna menggantikan proyeksi indikatif dengan angka yang terukur.

3. **Analisis rantai nilai dan dampak ekonomi pada tingkat rumah tangga**, guna menjawab kelangkaan pengukuran yang teridentifikasi sebagai titik lemah literatur pada sub-bab 2.2.5. Riset ini perlu mengukur bukan hanya besaran manfaat, melainkan juga sebarannya dan siapa yang paling diuntungkan.
4. **Studi daya dukung kawasan** cagar budaya Surakarta untuk menetapkan batas jumlah pengunjung harian yang aman bagi struktur bangunan, kenyamanan warga, dan kelestarian lingkungan — sebagai landasan penetapan kuota program.
5. **Uji coba terbatas model GCRE** pada satu sampai dua klaster dengan desain evaluasi yang ditetapkan sejak awal, mencakup pengukuran sebelum dan sesudah pada indikator pendapatan komunitas, kepuasan tuan rumah, dan kualitas pembelajaran peserta.
6. **Pengujian empiris konsep Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas** melalui penelusuran alumni program pertukaran budaya yang telah berjalan, guna menguji apakah relasi personal benar-benar bertahan dan menghasilkan dampak diplomatik yang dapat diamati.
7. **Studi komparatif** antara model *edutourism* Kampung Batik Laweyan dengan destinasi batik di kota lain seperti Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon, guna mengidentifikasi praktik yang dapat diadopsi dan yang tidak dapat dipindahkan karena bergantung pada konteks.
8. **Riset efektivitas format program** dalam meningkatkan minat generasi muda terhadap warisan budaya, khususnya menguji apakah pembukaan ruang ekspresi kreatif modern benar-benar meningkatkan keterlibatan jangka panjang atau hanya meningkatkan kunjungan sesaat.

Satu rekomendasi metodologis bersifat lintas agenda. Riset lanjutan sebaiknya dirancang **longitudinal**, bukan potret sesaat, karena seluruh pertanyaan penting tentang keberlanjutan — regenerasi pengrajin, kelelahan budaya, ketahanan kelembagaan — hanya dapat dijawab dengan pengamatan lintas waktu. Kelangkaan studi longitudinal merupakan salah satu titik lemah paling nyata dalam literatur *edutourism* Surakarta sebagaimana disimpulkan pada Bab II.

5.2.2 Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi berikut disusun agar dapat dilaksanakan dalam kewenangan masing-masing pemangku kepentingan, menggunakan instrumen yang sudah tersedia. Untuk kebijakan yang sudah berjalan, rekomendasi berbentuk peningkatan atau penyempurnaan kinerja, bukan usulan program baru.

A. Bappeda

1. **Memasukkan _edutourism_ berbasis komunitas sebagai kegiatan bernomenklatur dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan**, ditautkan pada Misi 2 dan Misi 3 RPJMD serta program kedua dan kelima Asta Cita Surakarta, dengan indikator kinerja yang terukur. Penautan pada program

yang sudah ada lebih dianjurkan daripada pengusulan program baru karena mempercepat proses penganggaran.

2. **Menyempurnakan sistem pemantauan yang sudah berjalan** dengan menambahkan indikator *edutourism* ke dalam portal data terbuka daerah, mencakup jumlah program terstandar, jumlah pelaku bersertifikat, durasi tinggal peserta program, dan sebaran penerima manfaat. Portal data telah tersedia; yang direkomendasikan adalah pengayaan cakupan indikatornya.
3. **Mengklarifikasi dan mempublikasikan angka sasaran sektor pariwisata** dalam dokumen RPJMD yang telah ditetapkan, termasuk tahun capaiannya, guna menghilangkan ketidaksesuaian penyebutan tahun sasaran yang beredar dalam berbagai dokumen turunan.

B. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1. **Menyusun standar paket _edutourism_ kawasan** yang mencakup durasi, kandungan pembelajaran, rasio pemandu terhadap peserta, dan rentang tarif, sebagai rujukan bersama bagi seluruh pelaku di lima klaster. Standardisasi ini menjawab langsung persoalan keberagaman kualitas yang menyulitkan pemasaran kolektif.
2. **Membentuk Forum Koordinasi _Edutourism_ Antarklaster** dengan mandat dan anggaran operasional yang jelas, beranggotakan perwakilan lima klaster, perangkat daerah terkait, dan perguruan tinggi, dengan agenda tetap penyelarasan jadwal program dan perencanaan rute tematik lintas kawasan.
3. **Menyempurnakan program promosi yang sudah berjalan** dengan mengalihkan sebagian penekanan dari promosi produk jadi menuju promosi proses dan filosofi, serta menyediakan materi dwibahasa. Berdasarkan temuan kajian, wisatawan mancanegara lebih tertarik pada proses daripada produk, sehingga materi promosi yang menonjolkan produk melewatkan proposisi nilai yang paling kuat.
4. **Menyusun Peraturan Wali Kota tentang tata kelola program budaya berdurasi panjang** yang mengatur standar akomodasi komunitas, protokol interaksi budaya, mekanisme seleksi peserta, pembagian manfaat ekonomi, dan koordinasi prosedur keimigrasian — sehingga komunitas memiliki kepastian hukum dalam mengelola program.
5. **Mengintegrasikan program residensi dengan agenda budaya kota yang telah berjalan**, dengan menjadikan agenda tersebut sebagai pintu masuk perekrutan peserta. Agenda budaya internasional kota telah berlangsung rutin; yang direkomendasikan adalah pemanfaatannya sebagai saluran rekrutmen, bukan penyelenggaraan agenda baru.

C. Dinas Koperasi dan UMKM serta Layanan Terpadu UMKM

1. **Memperluas cakupan program peningkatan kapasitas yang sudah berjalan** kepada pelaku *edutourism* di Laweyan dan Potrojayan, dengan modul yang difokuskan pada strategi digital — kalender konten, pembacaan

analitik, dan segmentasi pesan — bukan pada keterampilan teknis produksi konten yang sebagian besar sudah dikuasai.

2. **Mendampingi legalitas usaha dan pendaftaran kekayaan intelektual**, mencakup pengurusan Nomor Induk Berusaha, sertifikasi produk, dan pendaftaran hak atas motif orisinal. Pendaftaran motif menjadi semakin mendesak seiring rencana program ko-kreasi yang akan menghasilkan karya bersama.
3. **Menyiapkan skema pembiayaan yang sesuai karakter usaha budaya**, berupa pinjaman berbasis usaha budaya, hibah pendampingan digitalisasi, atau dana bergulir yang dikelola kelembagaan kawasan dengan dukungan teknis lembaga keuangan daerah.

D. Bagian Hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. **Mengkaji dan menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata** agar secara eksplisit mengakomodasi pariwisata kreatif berbasis komunitas, mencakup definisi usaha *edutourism* skala komunitas, pengaturan tarif yang proporsional, dan skema perizinan yang disederhanakan. Penyesuaian ini merupakan prioritas tertinggi di antara seluruh rekomendasi regulasi karena menghilangkan ketidakpastian hukum yang menghambat formalisasi pelaku.
2. **Memasukkan usulan penyesuaian tersebut ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah**, sehingga penyesuaian berjalan melalui mekanisme yang telah tersedia dan memiliki kepastian jadwal.

E. Badan Riset dan Inovasi Daerah

1. **Menindaklanjuti agenda riset pada sub-bab 5.2.1**, dengan prioritas pada survei berskala penuh dan analisis dampak ekonomi tingkat rumah tangga, karena kedua riset inilah yang menghasilkan angka untuk mengalibrasi sasaran program.
2. **Memfasilitasi diseminasi hasil kajian kepada komunitas**, bukan hanya kepada perangkat daerah, melalui forum di kawasan destinasi — sehingga komunitas yang menjadi subjek penelitian juga menjadi penerima manfaat pengetahuan yang dihasilkan.
3. **Membangun basis data riset daerah bidang pariwisata budaya** yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, sehingga kajian yang dihasilkan tidak berhenti sebagai dokumen melainkan menjadi masukan berulang bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

F. Kelembagaan Komunitas dan Pelaku Edutourism

1. **Memformalkan kelembagaan kawasan menjadi badan hukum** berupa perkumpulan atau koperasi terdaftar di setiap klaster. Ini merupakan rekomendasi paling mendesak pada tataran komunitas karena membuka kemampuan menandatangani kontrak, membuka rekening kolektif, dan mengajukan hibah secara mandiri.

2. **Menyusun protokol perlindungan budaya dan batas interaksi secara kolektif**, disahkan melalui musyawarah kawasan, mencakup pembedaan materi terbuka dan tertutup serta batas pendokumentasian di ruang privat dan ruang sakral.
3. **Menyepakati skema distribusi manfaat secara tertulis sebelum program berjalan**, termasuk rotasi penerimaan tamu antarrumah tangga dan pembagian hak atas karya ko-kreasi.
4. **Melanjutkan dan memformalkan praktik pembinaan terhadap UMKM yang lebih kecil** yang selama ini berjalan sukarela, agar tetap berlangsung ketika skala program membesar dan pelaku yang terlibat tidak lagi saling mengenal secara personal.
5. **Menetapkan kriteria sertifikasi pemandu berbasis kualitas karya**, mengikuti praktik yang telah berjalan di kawasan, sehingga membuka jalur peran bernilai tinggi bagi pengrajin muda berbakat dan menjawab persoalan regenerasi.

G. Perguruan Tinggi dan Pengelola Institusi Budaya

1. **Melembagakan perjanjian kerja sama dengan kelembagaan komunitas** yang mencakup program magang, KKN tematik, dan riset bersama, disertai mekanisme bagi hasil yang adil dan protokol yang menempatkan komunitas sebagai mitra, bukan sebagai objek penelitian.
2. **Menyediakan pendampingan penyusunan kurikulum edukasi budaya** bersama tokoh budaya, sekaligus mendampingi dokumentasi digital warisan budaya kawasan.
3. **Menetapkan protokol akses berjenjang bagi ruang sakral** di lingkungan keraton dan pura, sehingga keterbukaan terhadap pengunjung tidak dipertentangkan dengan perlindungan atas ruang yang memiliki status khusus.
4. **Mengembangkan produk edukasi berbayar yang terstruktur** pada institusi budaya, sebagai jalur pendapatan mandiri yang menjawab keterbatasan sumber daya finansial yang teridentifikasi dalam literatur.

5.2.3 Peta Jalan Implementasi 2026–2030

Seluruh rekomendasi di atas disusun ke dalam peta jalan lima tahap agar dapat dilaksanakan secara berurutan sesuai kesiapan, bukan serentak.



Gambar 5.1 Peta Jalan Implementasi Edutourism Berbasis Komunitas 2026–2030

Sumber: rancangan penyusun (2026).

Tahap	Tema	Program Utama	Indikator Keberhasilan
I (2026)	Membangun fondasi	Pelatihan strategi digital terarah; pendampingan legalitas UMKM mikro; penyusunan standar paket *edutourism* kawasan; penyusunan naskah penyesuaian Perda Nomor 5 Tahun 2017	Standar paket tersedia dan digunakan; naskah penyesuaian perda masuk program pembentukan peraturan daerah; pertumbuhan kunjungan organik
II (2027)	Konsolidasi dan digitalisasi	Sistem reservasi terpadu kawasan; pembentukan badan hukum kelembagaan kawasan; perjanjian kerja sama dengan sekurang-kurangnya tiga perguruan tinggi; program magang bagi mahasiswa seni dan desain	Sistem reservasi beroperasi; kelembagaan kawasan berbadan hukum di dua klaster; kunjungan segmen pendidikan menjadi terjadwal
III (2028)	Ekspansi dan replikasi	Replikasi model ke Kampung Blangkon Potrojayan dan kawasan Baluwarti; peluncuran rute tematik lintas klaster; uji coba terbatas program residensi pada satu sampai dua klaster	Dua kawasan baru beroperasi sebagai destinasi edukasi; uji coba residensi terlaksana dan terevaluasi secara terbuka
IV (2029)	Pelembagaan	Forum koordinasi antarklaster beroperasi rutin; konsorsium perguruan tinggi dan dinas aktif; sistem pemantauan dampak terintegrasi pada portal data daerah	Sistem pemantauan aktif; publikasi ilmiah tentang model Surakarta; sasaran RPJMD sektor pariwisata mendekati capaian
V (2030)	Pemantapan posisi	Panduan operasional *edutourism* berbasis komunitas dirilis sebagai rujukan; jaringan destinasi kota beroperasi penuh; program residensi berjalan reguler	Panduan diadopsi kota lain; rata-rata lama tinggal peserta program berdurasi panjang tercapai; distribusi manfaat terverifikasi merata

Tabel 5.1 Peta Jalan Implementasi dan Indikator Keberhasilan

Sumber: rancangan penyusun (2026).

Sebagai penutup, kajian ini menegaskan satu hal yang sederhana. Kota Surakarta memiliki hampir seluruh unsur yang dibutuhkan: dua istana yang masih hidup, pengrajin yang masih menggerakkan cantingnya setiap pagi, pengrajin blangkon yang bekerja di teras rumahnya, pemuda yang masih belajar gamelan, nilai-nilai yang masih mengatur cara bertetangga, dan kerangka kebijakan yang sudah memberi mandat. Yang belum tersedia bukanlah potensi, melainkan bentuk — cara mengemas seluruh unsur itu menjadi produk yang memberi alasan bagi orang untuk tinggal lebih lama, belajar lebih dalam, dan pulang membawa cerita. Itulah pekerjaan yang direkomendasikan kajian ini, dan itulah pekerjaan yang berada dalam jangkauan untuk dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Anugrahaningrum, A. A., Yudana, G., & Aliyah, I. (2021). Tingkat kesesuaian infrastruktur Kampung Batik Laweyan Kota Surakarta berdasarkan konsep ramah lingkungan. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif*, *16*(2), 358–381. https://doi.org/10.20961/region.v16i2.30842

Apalso, M. A. (2022). Pengembangan pariwisata kreatif berbasis kearifan lokal dalam perspektif collaborative governance: Studi di Kampung Blangkon Potrojayan, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, *13*(2), 103–113. https://doi.org/10.31506/jap.v13i2.15392

Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Surakarta. (2025, 18 September). *SIPA 2025 bentuk kolaborasi lintas budaya, dorong pertumbuhan pariwisata*. https://solotourismpromotionboard.org/

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2025). *Kota Surakarta dalam angka 2025*. BPS Kota Surakarta. https://surakartakota.bps.go.id/

Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2025). *Perkembangan pariwisata dan transportasi udara* (Berita Resmi Statistik). BPS Kota Surakarta. https://surakartakota.bps.go.id/

Bodger, D. (1998). Leisure, learning, and travel. *Journal of Physical Education, Recreation & Dance*, *69*(4), 28–31. https://doi.org/10.1080/07303084.1998.10605532

Bramwell, B., & Lane, B. (2011). Critical research on the governance of tourism and sustainability. *Journal of Sustainable Tourism*, *19*(4–5), 411–421. https://doi.org/10.1080/09669582.2011.580586

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Butler, R. W. (1999). Sustainable tourism: A state-of-the-art review. *Tourism Geographies*, *1*(1), 7–25. https://doi.org/10.1080/14616689908721291

Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, *94*, S95–S120. https://doi.org/10.1086/228943

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. (2025). *Wali Kota Surakarta paparkan lima misi pembangunan dalam Ranwal RPJMD 2025–2029*. https://dprd.surakarta.go.id/

Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2000). *Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning*. AltaMira Press.

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2026). *Karisma Event Nusantara 2026*. Kemenpar RI. https://eventdaerah.kemenparekraf.go.id/

Lestari, D. A., Restama, A., Subarkah, J., & Huda, E. (2024). Partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata budaya di Kampung Batik Laweyan Solo. *Gemawisata: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, *20*(3), 376–384. https://doi.org/10.56910/gemawisata.v20i3.729

Lestari, D. A., Huda, E., Subarkah, J., & Restama, A. (2025). Cultural preservation strategy through tourism: A case study of the Surakarta Palace. *An International Journal Tourism and Community Review*, *2*(2), 85–89. https://doi.org/10.69697/tourcom.v2i2.283

Media Indonesia. (2024, 15 Oktober). *Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 2025-2045 diteken Presiden*. https://mediaindonesia.com/humaniora/709146/

Modiash, A., & Yuliastuti, N. (2025). Pengembangan kampung tematik berkelanjutan pada Kampung Blangkon Potrojayan Serengan Kota Surakarta. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, *21*(1), 51–67. https://doi.org/10.14710/pwk.v21i1.58801

Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2019). Tourism, community-based tourism and ecotourism: A definitional problematic. *South African Geographical Journal*, *101*(1), 22–35. https://doi.org/10.1080/03736245.2018.1522598

Nisrina, N. F., & Pratama, Y. (2024). Transformasi Sentra Batik Laweyan menjadi kampung wisata edukasi. *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia*, *6*(1), 108–119. https://doi.org/10.37253/altasia.v6i1.8980

Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, *16*(5), 511–529. https://doi.org/10.1080/09669580802159594

Pemerintah Kota Surakarta. (2025a). *Respati Ardi dan Astrid Widayani resmi terima jabatan, awali kepemimpinan baru Kota Surakarta*. Sekretariat Daerah Kota Surakarta. https://setda.surakarta.go.id/

Pemerintah Kota Surakarta. (2025b). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2025–2029*. Bappeda Kota Surakarta.

Poria, Y., Butler, R., & Airey, D. (2006). Tourist perceptions of heritage exhibits: A comparative study. *Tourism Management*, *27*(5), 1012–1020. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.10.014

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). *The future of competition: Co-creating unique value with customers*. Harvard Business School Press.

Presiden Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Tahun 2025–2045*. Sekretariat Negara. https://peraturan.bpk.go.id/Details/303839/

Puspitasari, A. D., Natalia, D. C., Marsudi, M., & Marmoah, S. (2025). Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai sarana wisata edukasi sejarah. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, *6*(1), 55–70. https://doi.org/10.36276/jap.v5i2.481

Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.

Radar Solo. (2025, 21 Februari). *Sebut Asta Cita Surakarta, kemiskinan, hingga sinergitas Subosukawonosraten: Pidato lengkap Respati Ardi usai resmi jabat Wali Kota Solo*. https://radarsolo.jawapos.com/

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan*. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*. Sekretariat Negara.

Ritchie, B. W., Carr, N., & Cooper, C. (2003). *Managing educational tourism*. Channel View Publications.

Saaty, T. L. (1980). *The analytic hierarchy process*. McGraw-Hill.

Sarjiyanto, Sarwoto, Gunaratne, M. S., & Firdaus, R. B. R. (2023). Sustainable industry, culture and community development: A case study of Kampung Batik Laweyan, Indonesia. *Journal of Sustainability Science and Management*, *18*(1), 163–180. https://doi.org/10.46754/jssm.2023.01.010

Setyaningsih, W., Syawaludin, A., & Ramadhani, A. R. (2024). Tourism kampong development model through community involvement towards sustainable creative-based tourism. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *19*(11), 4323–4330. https://doi.org/10.18280/ijsdp.191121

Smith, M. K. (2006). *Issues in cultural tourism studies* (2nd ed.). Routledge.

Solopos (Espos.id). (2025, 3 Juni). *100 hari kerja, 3 program utama Respati-Astrid di Kota Solo sudah jalan*. https://solopos.espos.id/

Solopos (Espos.id). (2026, 3 Januari). *Diawali Grebeg Sudiro, ini daftar 13 event unggulan Kota Solo pada 2026*. https://solopos.espos.id/

Solopos (Espos.id). (2026, 23 April). *Solo peringkat ke-12 kota paling toleran 2025, Respati: Kami terus berbenah*. https://solopos.espos.id/

Timothy, D. J., & Boyd, S. W. (2003). *Heritage tourism*. Pearson Education.

Tolkach, D., & King, B. (2015). Strengthening community-based tourism in a new resource-based island nation: Why and how? *Tourism Management*, *48*, 386–398. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2014.12.013

Triratma, B., Winarto, Y., & Yuliani, S. (2019). Model pengembangan kampung wisata blangkon di Surakarta berbasis konsep kearifan lokal. *Arsitektura*, *17*(2), 293–302. https://doi.org/10.20961/arst.v17i2.24532

UNESCO. (2003). *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*. UNESCO.

UNWTO. (2005). *Making tourism more sustainable: A guide for policy makers*. United Nations World Tourism Organization.

Widodo, I. C., & Putra, H. M. S. (2024). The adaptive strategies of Kampoeng Batik Laweyan community in response to the late 20th century decline in batik industry. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora*, *8*(1), 257–266. https://doi.org/10.36526/santhet.v8i1.3405

World Commission on Environment and Development. (1987). *Our common future*. Oxford University Press.